



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Jawa Barat tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 58 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bappeda adalah OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah di Jawa Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Transisi dan mengacu pada RKP.
13. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berisi program dan kegiatan suatu OPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

RKPD merupakan :

- a. dokumen perencanaan Daerah untuk periode tahun 2014, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014; dan
- b. penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui Musrenbang.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
 - a. penyusunan Renja OPD;
 - b. penyusunan KUA, PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014; dan
 - c. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2014.
- (2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk :
 - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
 - e. mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Buku I tentang Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- b. Buku II tentang Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMORSERI

BAB I PENDAHULUAN

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum.....	I-3
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
	1.5. Sistematika	I-7
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.....	II -1
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II -1
	2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis	II -1
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II -3
	2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II -7
	2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-11
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Jalan	II-19
	2.3. Permasalahan Pembangunan	II-29
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III -1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III -1
	3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat.....	III -1
	3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan 2015	III-10
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-25
	3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-26
	3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-30
	3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-32
	3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-37
	3.3. Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	III-41
	3.3.1. APBN	III-41

3.3.2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)		
Dan program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	III-43	
3.3.3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	III-46	
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1. Prioritas Pembangunan Daerah		IV-1
4.1.1. Isu Strategis		IV-1
4.1.2. Prioritas Pembangunan Daerah		IV-2
4.1.3. Prioritas Kewilayahan		IV-5
4.2. Program Pembangunan Daerah Tahun 2014		IV-6
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....	V- 1
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Tematik		V- 1
5.1.1. Rencana Program dan Kegiatan Tematik Sektorial		V- 1
5.1.2. Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan		V-21
5.2. Rencana Program dan Kegiatan <i>Non Common Goals</i> (Non Tematik)		V-24
5.3. Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan		V-24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Penduduk Jawa Barat yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 2011	II-2
Tabel 2.2.	Kondisi Pelayanan Umum Pada Aspek Pendidikan	II-7
Tabel 2.3.	Kondisi Pelayanan Umum Pada Aspek Kesehatan	II-8
Tabel 2.4.	Kondisi Pelayanan Pada Bidang Transportasi	II-10
Tabel 2.5.	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Penanaman Modal Tahun 2008-2012 ..	II-18
Tabel 2.6.	Evaluasi Capaian Misi Satu RPJMD s/d 2012	II-20
Tabel 2.7.	Evaluasi Capaian Misi Dua RPJMD s/d 2012	II-21
Tabel 2.8.	Evaluasi Capaian Misi Tiga RPJMD s/d 2012	II-22
Tabel 3.1.	Struktur Ekonomi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2012	III-2
Tabel 3.2.	Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2011-2012	III-3
Tabel 3.3.	PDRB per Kapita Jawa Barat tahun 2011-2012	III-6
Tabel 3.4.	Indikator Ketenagakerjaan dan Kemiskinan di Jawa Barat 2011-2012	III-9
Tabel 3.5.	Perkiraan Indikator Ekonomi Regional Makro Tahun 2013	III-9
Tabel 3.7.	Peluang Ekonomi Indonesia	III-15
Tabel 3.8.	Proyeksi Beberapa Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2015	III-17
Tabel 3.9.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Jawa Barat Tahun 2014-2015 ..	III-18
Tabel 3.10.	Proyeksi Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2015 Menurut Lapangan Usaha (ADH Konstan 2000) ..	III-20
Tabel 3.11.	Prospek Perekonomian Jawa Barat	III-23
Tabel 3.12.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 2014	III-28
Tabel 3.13.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2011-2014	III-37
Tabel 3.14.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2014	III-40
Tabel 3.15.	Jumlah Dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013	III-41
Tabel 3.16.	Alokasi dana Dekonsentrasi Berdasarkan OPD di Provinsi Jawa Barat	III-42
Tabel 3.17.	Alokasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013 ..	III-43
Tabel 3.18.	Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJSPL/PKBL Jabar Sumber Dana Perusahaan BUMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012	III-44

Tabel 3.19. Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJSPL/PKBL Jabar Sumber Dana Perusahaan BUMN Provinsi Jawa Barat Tahun 2012	III-45
Tabel 3.20. Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJSPL/PKBL Jabar Sumber Dana PMDN/PMA Provinsi Jawa Barat Tahun 2012	III-45
Tabel 3.21. Rekap DIPA Tahun 2012 Provinsi Jawa Barat	III-46
Tabel 3.22. Alokasi Dana PHLN berdasarkan Kementerian di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012	III-46

DAFTAR GAMBAR

Proses Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

Gambar 1.1.	Bagan Alur Proses Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 ..	I-2
Gambar 2.1.	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2012	II-2
Gambar 3.1.	Perkembangan LPE Jawa Barat Tahun 2008-2013	III-2
Gambar 3.2.	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB Jabar	III-5
Gambar 3.3.	Inflasi di Jawa Barat	III-5

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

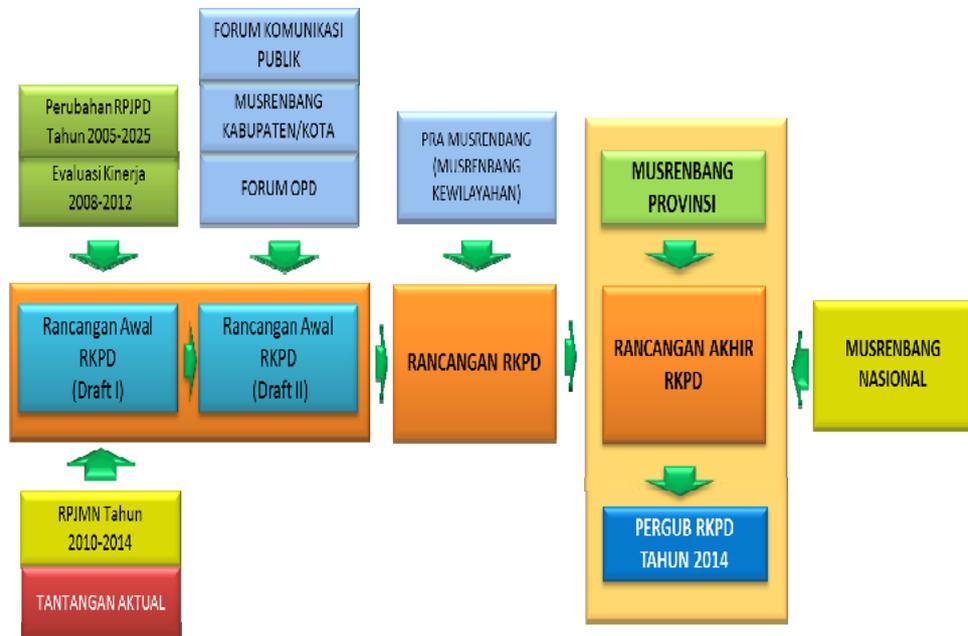
Pembangunan di Provinsi Jawa Barat dari tahun ketahun dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran seluruh masyarakat Jawa Barat. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaan.

Berdasarkan perencanaan jangka panjang daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 berada pada tahapan untuk memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh sebagai upaya menyiapkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat dalam berbagai bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu RKPD juga merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk tahun yang sama.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 telah selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, dengan titik berat pada upaya penanggulangan masalah kemiskinan (*pro poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), penciptaan lapangan kerja (*pro job*), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (*pro environment*) serta pencapaian target-target *Millenium Development Goals* (MDGs). Tantangan Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 44.257.000 pada Tahun 2011, adapun untuk Tahun 2012 jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 44.548.431 jiwa, total penduduk Jawa Barat sebesar 18,24% dari total penduduk Indonesia dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,66%.. Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap penyediaan dan peningkatan layanan publik serta pemenuhan pangan.

Kebijakan pembangunan Jawa Barat pada Tahun 2014 menekankan pada peningkatan kualitas sarana prasarana dan pendidikan serta pemerataan pelayanan pendidikan; peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan daya saing tenaga kerja dan industri serta peningkatan akses untuk pertumbuhan ekonomi daerah; peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah. Pengendalian keseimbangan daya dukung lingkungan dan peningkatan mitigasi bencana serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) juga masih menjadi penekanan di Tahun 2014.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1
Bagan Alur Proses Penyusunan RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

Prinsip Penyusunan RKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA), perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

- b) Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- c) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- d) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- e) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
- f) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- g) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sisrenbangda. Penyusunan RKPD mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, **RPJMD Transisi Tahun 2014** serta hasil evaluasi pembangunan Tahun 2008-2012.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dimaksudkan untuk menjadi acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2014. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 adalah :

- 1) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat;
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; serta
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.

1.5. Sistematika

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014..

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA PENCAPAIAN KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun 2012.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

2.3 Permasalahan Pembangunan

Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2012.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2014

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2014 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun 2014, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2014, instansi pelaksana/OPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain:

- a. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di OPD dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Kewenangan serta peran/tanggung jawab/tugas OPD;
- b. Peranan stakeholder pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD;
- c. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan APBD;
- d. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

1. Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah daratan seluas 3.709.528,44 hektar dengan garis pantai sepanjang 724,85 km. Secara Geografis Provinsi Jawa Barat terletak di antara 7° 50' 00" Lintang Selatan dan 104°48' -108°48' Bujur Timur, dengan batas wilayahnya meliputi :

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- d. Sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Banten.

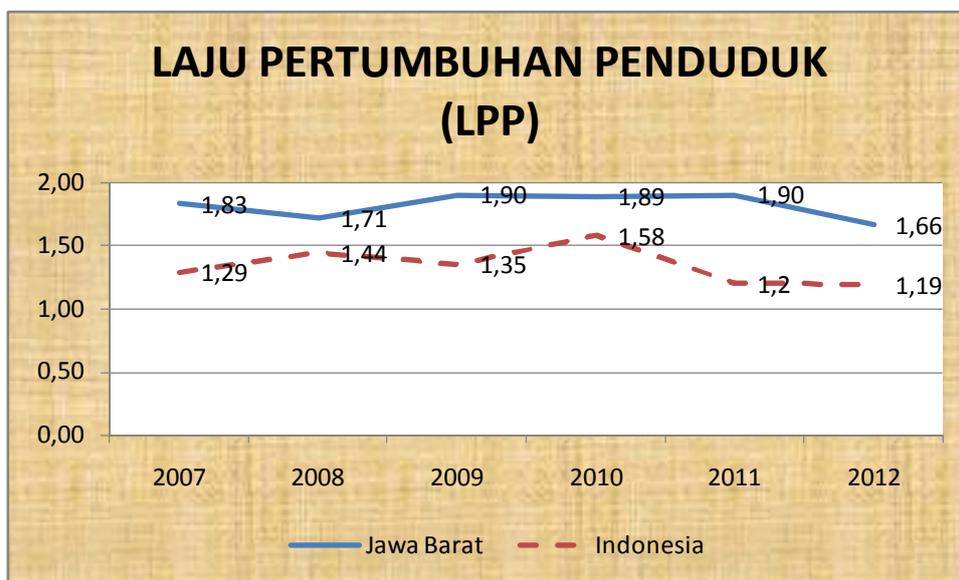
Kondisi topografinya beragam mulai dari dataran rendah hingga tinggi. Seluas 330.946,92 hektar berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut (dpl), 312.037,34 hektar berada pada ketinggian 25-100 meter dpl, 650.086,65 hektar berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 585.348,37 hektar berada pada ketinggian 500-1000 meter dpl dan 284.022,53 hektar berada pada ketinggian 1000 meter lebih dpl.

Secara administratif pemerintahan, wilayahnya terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Pangandaran serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Kota Banjar.

2. Gambaran Umum Demografis

Gambaran umum demografis wilayah Provinsi Jawa Barat, tercermin dari jumlah penduduk Jawa Barat yang hingga akhir Tahun 2011 mencapai 44.257.000 jiwa dan tahun 2012 mencapai 44.548.431 Jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,66%. Pada periode 2007-2011, Laju Pertumbuhan

Penduduk (LPP) Jawa Barat fluktuatif yaitu, dari sebesar 1,83 persen pada Tahun 2007 turun menjadi 1,71% pada Tahun 2008, kemudian meningkat menjadi 1,90% pada tahun 2009, namun terjadi penurunan lagi pada tahun 2010 menjadi 1,89% dan menurun lagi pada tahun 2011 menjadi 1,51%.



Sumber : BPS Jawa Barat, 2007-2012

Gambar 2.1
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat
Tahun 2007-2012

Berdasarkan 22.609.621 jiwa dan perempuan sebanyak 21.938.810 jiwa. Selanjutnya, gambaran penduduk Jawa Barat berdasarkan jenis pekerjaan, dapat ditunjukkan dari sebaran penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penduduk Jawa barat yang Bekerja Menurut lapangan Usaha
Tahun 2008-2011

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Pertanian	3.792.677	3.964.243	3.964.243	3.675.713
Industri	695,261	3.389.287	3.389.287	3.571.915
Perdagangan	2.370.356	4.206.889	4.206.889	4.554.503
Jasa-jasa	543,313	2.657.172	2.657.172	2.699.014
Lainnya	1.766.475	2.724.853	2.724.853	2.953.636
JUMLAH	9.168.082	16.942.444	16.942.444	17.454.781

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kondisi umum Kesejahteraan masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan di Provinsi Jawa Barat pada kurun tahun 2011-2012 mengalami peningkatan. Berdasarkan angka estimasi dari BPS Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2012 capaian IPM Provinsi Jawa Barat **73,19 dan tahun 2011 sebesar 72,82**. Peningkatan IPM setiap tahunnya, merupakan dampak dari meningkatnya komponen-komponen pembentuk IPM.

Komponen pendidikan tahun 2011 mencapai 82,55 dan tahun 2012 **menjadi sebesar 82,75**. Peningkatan indeks pendidikan diakibatkan oleh peningkatan dua komponen penyusunnya, yaitu indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah. Angka Melek Huruf tahun 2012 (angka perkiraan BPS Provinsi Jawa Barat, 6 Maret 2013) **sebesar 96,97% dan tahun 2011 sebesar 96,48%** dan Rata-rata Lama Sekolah tahun 2012 (angka perkiraan BPS Provinsi Jawa Barat, 6 Maret 2013) **sebesar 8,15 tahun dan tahun 2011 sebesar 8,20 tahun**.

Indeks kesehatan pada tahun 2011 mencapai 72,34 dan tahun 2012 menjadi **72,67**. Komponen kesehatan mengalami peningkatan sebagai dampak dari meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup pada tahun 2012 (angka perkiraan BPS Provinsi Jawa Barat, 6 Maret 2013) mencapai **68,60** tahun dan tahun 2011 yaitu 68,40 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini ditentukan dari angka kematian bayi yang menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun menjadi 30 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012.

Komponen pembentuk IPM lainnya, yaitu indeks daya beli yang menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengakses perekonomian. Pada tahun 2012 indeks daya beli sebesar **64,17 dan tahun 2011 sebesar 63,57** sedangkan angka indeks daya beli tahun 2012 sebesar Rp. 637,67 ribu dan tahun 2011 sebesar Rp. 635,10 ribu.

2. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan daerah di Jawa Barat difokuskan pada pemerataan ekonomi dan kualitas masyarakat di bidang sosial. Fokus pemerataan ekonomi dilihat dari indeks daya beli, pemerataan pendapatan, dan PDRB Perkapita.

Pemerataan ekonomi di Jawa Barat tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, dimana laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 6,48% dan tahun 2012 sebesar 6,21%. Kondisi ini disebabkan pengaruh global yang berdampak terhadap kinerja sektor industri pengolahan, dimana pada tahun 2012 tumbuh sekitar 4% dibandingkan tahun 2011 mencapai 6% dari darisisi penggunaan laju pertumbuhan ekspor dan impor sebesar 5,52% dan 3,42% dibandingkan tahun 2011.

Pembangunan ekonomi suatu wilayah juga dapat dilihat Indeks Gini yaitu untuk melihat ketimpangan pendapatan yang memperlihatkan bias dari distribusi pendapatan riil terhadap distribusi yang ideal. Indeks Gini Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 adalah 0,3719 dan pada tahun 2012 sebesar 0,41, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat secara umum dapat dikategorikan kedalam tingkat ketimpangan rendah.

3. Kesejahteraan Sosial

Aspek pembangunan masyarakat pada bidang sosial diukur dengan melihat Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Keadaan kesehatan gizi masyarakat, jumlah grup kesenian ada di daerah, sarana prasarana kesenian, jumlah klub olahraga, dan sarananya, serta masalah ketenagakerjaan.

Dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2011 terdapat peningkatan angka melek huruf naik sebesar 96,48 %, angka rata-rata lama sekolah naik menjadi sebesar 8,20 sehingga angka partisipasi sekolah pada tingkat SD/MI telah mencapai 101,26, angka partisipasi sekolah pada tingkat SMP/MTs telah mencapai 87,56 dan angka partisipasi sekolah pada tingkat SMA/SMK/MA telah mencapai 55,92

Indeks Kesehatan tahun 2011 sebesar 72,34 poin dan tahun 2012 sebesar 72,67. Hal ini ditentukan dari Umur Harapan Hidup tahun 2011 yaitu 68,40 tahun dan tahun 2012 sebesar 68,60 tahun. Angka Harapan hidup ini ditentukan dari Angka Kematian Bayi/1000 KH tahun 2011 yaitu, 30 per 1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2012 menjadi 30 per 1000 kelahiran hidup. Indikator lainnya antara lain Prevalensi Gizi buruk pada periode tahun 2008-2012, Tahun 2008 sebesar 1,68% turun menjadi 0,5% pada Tahun 2012. Demikian juga untuk balita gizi kurang tahun 2008 12,40% turun menjadi 9,0% tahun 2012.

Pada kasus penyakit menular seperti prevalensi penyakit untuk HIV/AIDS tahun 2008 sebesar 3,84 menjadi <0,5 pada tahun 2012. Kasus TBC/100.000 penduduk tahun 2008 sebesar 244 turun menjadi 226 tahun 2012. Prevalensi kasus malaria/1000 penduduk pada tahun 2008 0,58 turun menjadi 0,357 tahun 2012. Incident Rate kasus DBD/100.000 penduduk tahun 2008 sebesar 54,26 turun menjadi 50 tahun 2012. Kasus AFP rate/100.000 anak di bawah 15 tahun 2008 sebesar 0,80 turun menjadi >2 tahun 2012.

Dari sisi sarana dan prasana pelayanan kesehatan dasar puskesmas sampai tahun 2012 sebanyak 1049 puskesmas. Puskesmas yang mampu berfungsi PONEB sampai tahun 2012 sebanyak 334 Puskesmas yang telah dilengkapi dengan paket alat kesehatan PONEB, berikut tenaga baik dokter maupun bidan yang terlebih dahulu dilatih PONEB.

Rumah sakit yang menjadi rujukan di Jawa Barat sampai tahun 2012 terdiri dari 41 Rumah Sakit Daerah dan 227 Rumah Sakit milik swasta dan TNI/POLRI dengan jumlah total Tempat Tidur 25.569 TT.

Dari aspek ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat, dapat dijelaskan bahwa Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada tahun 2012 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan tahun 2011. Pada bulan tahun 2012 penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 18,32 Juta Orang, sementara pada tahun 2011 sebesar 17,45 Juta Orang.

Jumlah Pengangguran tahun 2011 sebesar 1,80 Juta Orang dan tahun 2012 sebesar 1,83 Juta Orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat tahun 2011 9,83% mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 9,08%.

Penyerapan tenaga kerja yang terbesar pada Sektor Perdagangan (26,47 %), Industri (20,58 %) dan Pertanian (19,96 %) pada bulan Februari 2012. Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2011, pada Februari 2012 jumlah penduduk yang bekerja di Sektor Industri mengalami kenaikan sebesar 244 583 orang (1,35 %), sebaliknya, Sektor Pertanian menurun sekitar 374 785 orang (2,06 %).

Pembangunan aspek budaya dapat dilihat dari banyaknya sarana dan prasarana untuk memajukan budaya lokal Jawa Barat serta untuk pengembangan budaya sesuai dengan kemajuan zaman. Saat ini jumlah gedung untuk pementasan budaya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat

berjumlah 2 gedung, yaitu Gedung Rumentang Siang dan Yayasan Pusat Kebudayaan .

Sebagai bentuk peningkatan apresiasi masyarakat terhadap Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah, telah diberikan Penghargaan Karya Sastra Daerah kepada 26 (dua puluh enam) orang tokoh sastra; terlaksananya 4 (empat) kali lomba Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah yang diikuti oleh generasi muda dan 6 (enam) *Event* Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah. Dalam upaya pelestarian budaya lokal maka telah diusulkan Kujang sebagai Warisan Budaya Tak Benda dan Situs Batu Jaya sebagai Heritage.

Pada tahun 2011 kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat mencapai angka 1.333.512 orang dari target sebesar 885.195 orang dengan persentase capaian kinerja 150,65% dan wisatawan nusantara/domestik sebesar 35.315.020 orang dari target 38.750.000 dengan persentase capaian kinerja 91,14%.

Adapun pembangunan pemuda dan olahraga di Jawa Barat , sebagai indikatornya adalah terdapat lembaga kepemudaan berjumlah 665 lembaga dan adanya gedung olahraga berjumlah 1004 serta jumlah klub olahraga pelajar sebanyak 194, klub olahraga masyarakat 439. Selain itu, dilakukan pembinaan peran serta kepemudaan untuk mengisi wawasan kepemudaan , kewirausahaan pemuda dalam rangka meningkatkan taraf hidup ,

Pembangunan dibidang sosial, diarahkan pada penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar, berupa pembinaan mental, sosial dan keterampilan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua Lembang dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri Cirebon , pada tahun 2011 sebanyak 300 Gepeng dan tahun 2012 sebanyak 350 Gepeng. Sedangkan kepada orang terlantar sebanyak 1460 orang diberikan tempat penampungan sementara di Rumah Persinggahan Caringin sebelum dipulangkan ke tempat asalnya atau sebelum dirujuk ke panti/balai terkait.

Pemberdayaan Sosial Remaja dan Anak Jalanan, berupa pembinaan mental, sosial dan keterampilan kepada remaja putus sekolah dan anak terlantar dari kabupaten/kota se Jawa Barat, agar mampu menjalankan fungsi sosialnya tahun 2011 sebanyak 360 dan Tahun 2012 sebanyak 360 Remaja putus Sekolah dan anak terlantar

Akses Pelayanan Sosial Penyandang Cacat, berupa layanan dan bantuan pemulihan keberfungsian sosial, pemenuhan alat bantu, peningkatan

keterampilan usaha perbengkelan, service HP, warungan, olahan pangan dan jaminan hidup bagi penyandang cacat di Kabupaten/Kota, Pada tahun 2011 sebanyak 500 Penyandang Cacat dan tahun 2012 sebanyak 115 Penyandang Cacat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum yang dilaksanakan pemerintah provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 ditujukan untuk tersedianya sumberdaya manusianya (SDM) yang berkualitas yang merupakan salah satu factor utama pembangunan. Oleh karena itu dalam peningkatan kualitas SDM terutama difokuskan kepada aksesibilitas masyarakat terutama terhadap bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Pendidikan merupakan salah satu aspek pelayanan yang cukup penting dalam pembangunan manusia Jawa Barat. Pembangunan pendidikan di Jawa Barat terus ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan dalam bidang pendidikan.

Tabel 2.2.
Kondisi pelayanan umum pada aspek pendidikan

No	URAIAN	2010	2011
	Jumlah penduduk	43.053.732	44.257.000
PENDIDIKAN			
1	Rasio jumlah murid dan Guru SD Negeri/swasta non MI	18	18
2	Rasio jumlah murid dan Guru SMP negeri/swasta non tsanawiah	24	24
3	Rasio jumlah murid dan Guru SMA negeri/swasta non aliyah	17	17
4	Rasio jumlah murid dan Guru SMK/negeri/swasta	21	21

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2010 dan 2011, diolah

Walaupun jumlah penduduk Jawa Barat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan 2,79%, namun rasio Rasio jumlah murid dan Guru SD Negeri/swasta non MI, Rasio jumlah murid dan Guru SMP Negeri/Swasta non Tsanawiah, Rasio jumlah murid dan Guru SMA Negeri/Swasta non Aliyah, Rasio jumlah murid dan Guru SMK Negeri/Swasta memperlihatkan angka yang sama dari Tahun 2010 maupun Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah

penduduk tersebut telah diikuti oleh peningkatan jumlah guru pada taraf sekolah-sekolah tersebut.

Tabel 2.3.
Kondisi pelayanan umum pada aspek Kesehatan

No.	URAIAN	2010	2011
	Jumlah penduduk	43.053.732	44.257.000
1.	Jumlah puskesmas tanpa perawatan	854	857
2.	Jumlah puskesmas dengan ruang rawat inap	185	188
3.	Jumlah puskesmas dengan perawatan dan tanpa ruang rawat inap	1.039	1.045.
4.	Jumlah puskesmas pembantu	1.579	1.579
5.	Jumlah puskesmas keliling	788	789
6.	jumlah balai pengobatan	3.394	3.394
7.	Jumlah puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan balai pengobatan	5.761	5.762
8.	Jumlah total puskesmas, dan balai pengobatan.	6.800	6.807
9.	Jumlah posyandu	49.803	50.266
10.	rasio jumlah penduduk/puskesmas tanpa perawatan dan dengan ruang rawat inap	41.437,66	42.351,20
11.	rasio jumlah penduduk/puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan balai pengobatan	7.473,31	7.680,84
12.	rasio jumlah penduduk/jumlah total puskesmas	6.331,43	6.501,69
13.	Rasio jumlah penduduk/jumlah tempat tidur di rumah sakit	1.674	1.652

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2010 dan 2011, diolah

Jumlah puskesmas baik dengan perawatan maupun tanpa ruang rawat inap mengalami peningkatan tetapi dalam jumlah yang relative sedikit, sedangkan jumlah balai pengobatan masih tetap. Sehingga peningkatan jumlah total puskesmas dari tahun 2010 hingga tahun 2011 relatif sedikit hanya bertambah 7 unit. Apabila dilihat dari nilai rasio jumlah penduduk per jumlah puskesmas rawat inap, tanpa ruang rawat inap, puskesmas pembantu, puskesmas keliling serta balai pengobatan nilai rasionya mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2010 hingga tahun 2011. Pada Tahun 2010 satu puskesmas dengan perawatan dan tanpa ruang rawat inap dapat melayani 41.437,66 orang penduduk, sedangkan pada tahun 2011 satu puskesmas harus mampu melayani 42.351,20 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan jumlah penduduk yang cukup pesat di Jawa Barat belum diimbangi

oleh penambahan jumlah infrastruktur kesehatan tersebut. Sedangkan nilai rasio jumlah penduduk terhadap jumlah tempat tidur di rumah sakit mengalami penurunan, dengan arti lain bahwa laju peningkatan jumlah tempat tidur di rumah sakit lebih tinggi dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk.

Capaian kinerja urusan kesehatan saat ini ditunjukkan dengan indikator kinerja urusan kesehatan, yaitu Meningkatkan Indeks Kesehatan pada tahun 2011 sebesar 72,34 dan tahun 2012 menjadi sebesar n/a pada tahun 2012. Meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang semula 68,40 pada Tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar n/a tahun.

Pembangunan Bidang Transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan wilayah Jawa Barat yang cukup luas dengan topografi yang cukup bergelombang. Untuk mendukung pergerakan orang, barang di Jawa Barat diperlukan meningkatkan pelayanan transportasi. Berdasarkan tabel 2.4. bahwa jumlah kendaraan baik kendaraan roda empat maupun sepeda motor mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat Jawa Barat terhadap alat transportasi cenderung meningkat. Berkaitan dengan bertambahnya jumlah kendaraan, pembangunan sarana jalan di Jawa Barat terus ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang transportasi dan perhubungan kepada masyarakat.

Rasio jumlah kendaraan umum roda empat mengalami peningkatan dari rasio satu kendaraan per 355 penduduk menjadi satu kendaraan per 360 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa beban kapasitas kendaraan umum semakin meningkat, dengan kata lain bahwa perlu adanya peningkatan jumlah kendaraan umum untuk mengimbangi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Lain halnya pada kendaraan bukan umum yang mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga rasionya cenderung menurun dari satu kendaraan untuk 37 penduduk menjadi satu kendaraan untuk setiap 35 penduduk. Begitu pula untuk kendaraan sepeda motor, kepemilikan penduduk Jawa Barat terhadap sepeda motor cenderung meningkat, pada tahun 2010 satu sepeda motor untuk 6 orang penduduk menjadi satu sepeda motor untuk setiap 5 orang penduduk.

Tabel 2.4.
Kondisi pelayanan pada Bidang Transportasi

No	URAIAN	2010	2011
	Jumlah penduduk (orang)	43.053.732	44.257.000
1	Jumlah kendaraan umum roda empat (unit)	121.145	122.940
2	Rasio Jumlah Penduduk per Jumlah kendaraan umum roda empat (orang/unit)	355	360
3	Jumlah kendaraan bukan umum roda empat (unit)	1.178.603	1.250.983
4	Rasio Jumlah Penduduk per Jumlah kendaraan bukan umum roda empat (orang/unit)	37	35
5	Jumlah sepeda motor (unit)	7.636.482	8.426.228
6	Rasio Jumlah Penduduk per Jumlah sepeda motor (orang/unit)	6	5
7	Total panjang Jalan Nasional (Km)	1.351,132	1.351,132
8	Total panjang Jalan Provinsi (Km)	2.191,29	2.191,29
9	Total panjang Jalan Kabupaten/Kota (Km)	32.438,659	32.438,659
10	Total panjang Jalan Non Status di Jalur Horizontal Jawa Barat Selatan (Km)	210,930	210,930
11	Rasio Jumlah kendaraan umum roda empat terhadap panjang jalan nasional (unit/Km)	89.66	90.99
12	Rasio Jumlah kendaraan umum roda empat terhadap panjang jalan provinsi (unit/Km)	55.28	56.10
13	Rasio Jumlah kendaraan umum roda empat terhadap panjang jalan kabupaten/kota (unit/Km)	3.73	3.79
14	Rasio Jumlah kendaraan umum roda empat terhadap panjang jalan non status (unit/Km)	0.57	0.58
15	Rasio Jumlah kendaraan bukan umum roda empat terhadap panjang jalan nasional (unit/Km)	872.31	925.88
16	Rasio Jumlah kendaraan bukan umum roda empat terhadap panjang jalan provinsi (unit/Km)	537.86	570.89
17	Rasio Jumlah kendaraan bukan umum roda empat terhadap panjang jalan kabupaten/kota (unit/Km)	36.33	38.56
18	Rasio Jumlah kendaraan bukan umum roda empat terhadap panjang jalan non status (unit/Km)	5.59	5.93
19	Rasio Jumlah kendaraan sepeda motor terhadap panjang jalan nasional (unit/Km)	5,651.91	6,236.42
20	Rasio Jumlah kendaraan sepeda motor terhadap panjang jalan provinsi (unit/Km)	3,484.93	3,845.33

No	URAIAN	2010	2011
21	Rasio Jumlah kendaraan sepeda motor terhadap panjang jalan kabupaten/kota (unit/Km)	235.41	259.76
22	Rasio Jumlah kendaraan sepeda motor terhadap panjang jalan non status (unit/Km)	36.20	39.95

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2010 dan 2011, diolah dan Dinas Binamarga Prov Jawa Barat, diolah

Dengan bertambahnya jumlah kendaraan, rasio jumlah kendaraan pada masing masing status jalan semakin meningkat. Dengan arti lain jumlah kendaraan per kilo meter jalan semakin meningkat. Dari hasil analisis pada table di atas juga dapat teridentifikasi bahwa Kepadatan jalan tertinggi baik pada kendaraan umum, bukan umum maupun sepeda motor terdapat pada status jalan nasional, kemudian jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Hal ini sudah menjadi fenomena di lapangan bahwa kemacetan lalulintas di wilayah Jawa Barat dirasakan semakin meningkat terutama di daerah-daerah perkotaan. Pada jalan non status jumlah kendaraan per kilo meter jalan relative sedikit hal ini mungkin terkait dengan lokasi jalan yang lebih banyak pada daerah terpencil serta lebarnya yang relative sempit.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Kemampuan Jawa Barat untuk bersaing dengan daerah lain secara nasional dalam mencapai pertumbuhan kesejahteraan daerah selama tahun 2012 menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kinerja ekonomi daerah dalam berbagai sektor, meningkatnya fasilitas wilayah atau infrastruktur, membaiknya iklim investasi dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Dalam struktur perekonomian yang mempunyai kontribusi terbesar pada pembangunan Jawa Barat adalah sektor industri, perdagangan, dan sektor pertanian (BPS Jawa Barat, 2012). Sehingga ke tidga sektor tersebut mencerminkan kemampuan perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan.

1. Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaksanaan program-program pada bidang Industri dan Perdagangan di Jawa Barat sejak tahun 2008 - 2012 merupakan rangkaian proses berkesinambungan pembangunan ekonomi Jawa Barat yang mengalami pertumbuhan rata-rata secara positif. Hal ini nampak dari rata-rata sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 sebesar 38,57% dan meningkatnya unit usaha formal di Jawa Barat dari 200.441 unit pada tahun 2008 menjadi 287.050 unit pada triwulan III tahun 2012. Demikian pula dengan bidang perdagangan khususnya ekspor non migas Jawa Barat pada tahun 2008 mencapai 18,1 Milyar angka rata-rata peningkatan per tahun sebesar 10% pada tahun 2012 bulan September telah mencapai 20,06 Milyar.

Kondisi di capai dengan letak geografis Jawa Barat yang dekat dengan pelabuhan Internasional, Ibu Kota Negara sebagai pusat perdagangan, dan dengan dukungan peningkatan SDM serta peraturan Daerah yang mendukung percepatan investasi di bidang industri dan perdagangan baik melalui PMA dan PMDN. Pesatnya proses industrialisasi dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat seperti di gambarkan di atas, telah dilakukan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan sepanjang periode 2008-2012, yaitu : (a) Pengembangan industri kreatif baik berbasiskan komunitas, teknologi informasi, tekstil dan produk tekstil. (b) Pengembangan industri alas kaki. Pada industri alas kaki, hingga tahun 2012 terdapat penguatan teknologi baik desain maupun produksi. (c) Pengembangan industri logam dan mesin. Pengembangan industri logam dan mesin hingga tahun 2012 telah dilakukan penguatan industri komponen otomotif dengan membuat prototype mobil pedesaan. (d) Peningkatan teknologi tepat guna dalam bidang industri dengan memfasilitasi rumah produksi, peralatan produksi yang disesuaikan dengan industri kecil menengah agro. (e) Terangkatnya produk olahan makanan etnik Jawa Barat melalui pengembangan ragam makanan olahan khas Jawa Barat khususnya yang berbahan baku lokal.

Bidang perdagangan mencakup aktivitas transaksi barang dan jasa baik secara domestik maupun ekspor impor. Bagi perekonomian Jawa Barat, peran sub sektor perdagangan ini semakin besar. Pada Tahun 2012, berdasarkan lapangan usaha, nilai sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan nilai tambah ke-2 (dua) terbesar bagi PDRB yaitu sebesar Rp. 84,52 triliun antara lain didukung dengan berbagai pelaksanaan program sejak tahun 2008 hingga 2012. Kemajuan sektor perdagangan dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat seperti di gambarkan di atas, telah dilakukan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan sepanjang periode 2008-2012, yaitu; (a) Meningkatnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis sebesar 94% yang nampak dari komoditi beras, gula pasir dan minyak goreng. Serta tertatanya distribusi barang yang efektif dan efisien dengan capaian sebesar 5,8% meliputi komoditi beras, gula pasir dan minyak goreng. (B) Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri sebesar 90% melalui fasilitasi kegiatan promosi/sosialisasi/apresiasi /pencitraan produk dalam negeri. (c) Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana perdagangan sebanyak 21 kabupaten/kota yang telah mempunyai perda perlindungan pasar tradisional hingga tahun 2012. (d) Peningkatan kualitas dan jumlah sarana dan prasarana perdagangan berupa 677 pasar tradisional, 2424 toko modern, 101.064 kios, 19.264 los dan 665 gudang, serta perlindungan pasar tradisional (GEMPITA) yang memperhatikan penataan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan sebanyak 27 pasar tradisional yang dibantu revitalisasinya. (e) Meningkatkan nilai transaksi pasar lelang forward sebesar Rp. 134.422.350.000, dan penyediaan dana subsidi operasi pasar murah (kepokmas) selama 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 166.364.980,- yang sudah terserap dari anggaran yang disiapkan sebesar 60 milyar. (f) Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa sebanyak 112 kali terhadap barang-barang ber-SNI berupa lampu pijar, helm, regulator dan tabung gas, ban kendaraan roda 4, garam, Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK), parcel makanan, produk

elektronika dan telematika, kosmetika dan produk makanan/minuman serta obatan dan jamu.(g) Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen sebesar 45% melalui kegiatan diseminasi perlindungan konsumen, advokasi kebijakan usaha perdagangan, koordinasi antar BPSK se-Jawa Barat. (h) Meningkatnya akses pasar untuk beberapa jenis/item produk industri Jabar dan meningkatnya pangsa pasar ekspor Jawa Barat pada negara tujuan ekspor senilai US\$ 17,760 milyar. (i) Meningkatnya volume dan keanekaragaman produk perdagangan ekspor dari Jawa Barat sebesar 4.617 juta ton.

2. Sektor Pertanian.

Pembangunan di bidang pertanian difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat, pengendalian distribusi dan harga pangan, peningkatan keanekaragaman konsumsi serta penanganan keamanan pangan. Produksi pertanian, khususnya produksi padi Jawa Barat mempunyai peranan penting dalam ketahanan pangan nasional, karena memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi beras Nasional. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2012) kontribusi produksi padi Jawa Barat terhadap nasional berkisar antara 16,76 sampai 17,66 persen, pada kurun waktu tersebut terus meningkat.

Prestasi Provinsi Jawa Barat sebagai kontributor terbesar dalam penyediaan padi nasional salah satunya ditunjang oleh peningkatan produktivitas padi secara konsisten selama lima tahun terakhir, sebagai akibat dari pemngembangan sumberdaya petani, teknologi, penyuluhan dan perbaikan infrastruktur pertanian, serta berbagai peraturan daerah yang mendukung peningkatan produksi pertanian khususnya padi. Untuk mempertahankan posisi Jawa Barat sebagai provinsi kontributor padi tertinggi, maka perlu meningkatkan produksinya, karena pada tahun 2010 dan tahun 2011, kontribusi Jawa Timur hampir mendekati Jawa Barat, pada kurun waktu tersebut antara Jawa

Timur dan Jawa Barat hanya terpaut selisih 0,10 persen dan 0,06 persen.

2.1.4.2 Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Untuk meningkatkan daya saing perekonomian Jawa Barat seperti di bahas di atas maka telah dilakukan peningkatan infrastruktur sebagai berikut :

1. Penataan Ruang

Peningkatan kinerja penataan ruang dilaksanakan melalui: (a) penyediaan pranata pendukung pengendalian pemanfaatan ruang, terutama di Kawasan Bandung Utara sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian, Pemanfaatan Ruang dan Kawasan Jabodetabekpunjur sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur; (b). harmonisasi penataan ruang antara pusat, provinsi dengan kabupaten dan kota; (c) Peningkatan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang di seluruh Wilayah Jawa Barat, termasuk di sepanjang pantai utara dan pantai selatan, koridor jalan tol serta kawasan-kawasan strategis lainnya. Dalam rangka mewujudkan tata ruang yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat 2009-2029 maka dilaksanakan operasionalisasi penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dalam rangka mengakselerasi pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas dan keberlanjutan penataan ruang di seluruh Jawa Barat, sejak 2011 telah dibentuk West Java Province-Metropolitan Development Management, sebagai upaya dalam rangka percepatan perwujudan tiga PKN (Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Cirebon) dan dua PKNp (Pangandaran dan Palabuhanratu). Saat ini, telah disusun konsep awal pengembangan tiga Metropolitan (PKN) dan dua *Growth Center* (PKNp) di Jawa Barat.

2. **Infrastruktur Transportasi**

Upaya peningkatan infrastruktur transportasi dilakukan melalui peningkatan kinerja pengelolaan jalan provinsi. Dari total panjang jalan provinsi sepanjang 2.130,97 Km, berada dalam kondisi mantap sampai dengan tahun 2012 mencapai 97%. Dengan capaian tersebut, maka peningkatan kemantapan jalan sudah melebihi target RPJMD 2008-2013 untuk tahun 2012 sebesar 93,00 - 94,00%. Untuk mempertahankan kondisi jalan, dilaksanakan program pemeliharaan jalan yang secara akumulatif mencapai panjang 10.633,52 km, dan rehabilitasi jalan sepanjang 545,88 km. serta rehabilitasi jembatan 2.379,50 m. Melalui program pembangunan jalan telah dibangun jalan baru sepanjang 17,60 km, dan jembatan sepanjang 269,13 m. Sedangkan jalan yang ditingkatkan mencapai 464,26 km dan Penggantian Jembatan sepanjang 506,90 M'. Sampai dengan tahun 2012 juga telah dilaksanakan peningkatan jalan vertikal melalui melalui pola pendanaan tahun jamak yaitu ruas Jalan Cikajang – Pameungpeuk Sepanjang 24,904 Km dan ruas Jalan Bandung – Cukul – Cisewu – Rancabuaya sepanjang 31,353 Km.

Berkaitan dengan sektor perhubungan, hingga tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai program untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat dalam sektor ini, seperti, antara lain: i). Penyediaan fasilitas pendaratan dan penempatan pesawat yaitu pembuatan marking 4.000 m², perluasan apron 1.500 m², peningkatan over run 3.600 m² dan tersedianya fasilitas pendingin ruangan tower pada gedung operasional Bandara Husein Sastranegara; ii). Penyediaan lahan untuk pembangunan Jembatan Timbang pada jalur Cianjur-Sukabumi di Desa Titisan Kabupaten Sukabumi seluas 7.800 m² dan pada jalur Jalur Sukabumi-Bandung di Desa Sindang Jaya Kabupaten Cianjur seluas 159.620 m²; iii). Pembebasan lahan Bandar Udara Internasional di Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat sampai dengan akhir tahun 2012 seluas 646,3 Ha sehingga total lahan yang tersedia + 717 Ha; iv). Peningkatan fasilitas pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau di Kabupaten Cianjur.

3. Sumberdaya Air dan Irigasi

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dilakukan upaya peningkatan intensitas tanam padi melalui peningkatan pengelolaan jaringan irigasi di Jawa Barat. Dari total luas Daerah Irigasi (DI) 974.012 Ha terdapat 86.561 Ha atau sebanyak 91 DI yang merupakan DI kewenangan Provinsi. Peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya irigasi ditunjukkan dengan terpeliharanya kondisi dan fungsi DI yang tersebar di WS Ciliwung-Cisadane, Cisadea-Cibareno, Citarum, Cimanuk-Cisanggarung, Citanduy dan Ciwulan-Cilaki. DI yang kondisinya baik meningkat dari 58,69% di tahun 2008 menjadi 65% pada akhir tahun 2012. Hal ini berdampak positif pada meningkatnya intensitas tanam padi dari 192% pada tahun 2008 menjadi 200% pada tahun 2012. Kinerja ini melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2008-2013 untuk tahun 2012 yang sebesar 194 – 198%. Selain jaringan irigasi, juga dipelihara kondisi dan fungsi 106 situ/waduk yang tersebar di WS Ciliwung-Cisadane, Cisadea-Cibareno, Citarum, Cimanuk-Cisanggarung, Citanduy dan Ciwulan-Cilaki. Peningkatan kinerja ditunjukkan dengan meningkatnya kapasitas tampung situ/waduk sehingga manfaatnya adalah mampu menyediakan air untuk areal persawahan sehingga meningkatkan intensitas tanam padi serta dapat memenuhi kebutuhan air baku lainnya untuk masyarakat di sekitarnya.

2.1.4.3. Iklim Berinvestasi

Penanaman modal merupakan sumber pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Oleh karena itu upaya akumulasi modal merupakan concern setiap pemerintahan. Penyelenggaraan bidang pemerintahan daerah bidang penanaman modal diarahkan untuk mencapai misi 2 yakni meningkatkan pembangunan perekonomian regional berbasis potensi lokal. Untuk mendorong peningkatan penanaman modal di Jawa Barat, dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi, dengan sasaran dan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan sepanjang 2008-2012, hailnya adalah : (a) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (b)

Terbentuknya PPTSP Provinsi Jawa Barat dan sarana prasarana pendukungnya (c) Tersedianya Sistem Informasi Investasi Terpadu Jawa Barat (SI2T-JB); (d) Terselenggaranya forum investor dan persiapan pembentukan *West Java Partner* (WJP). (d) Terfasilitasinya keikutsertaan Jawa Barat dalam promosi produk dan investasi di dalam (PRJ), Jakvest, Indovest, Gelar Potensi Investasi Daerah, Invesda dan Expo, Batam Investrade Expo dan Forum, Pameran Produksi Expo, Agro & Food Expo, Indonesia Regional Investment Forum, Indonesia International Infrastructure) dan luar negeri (Indonesia Investment Forum di Belanda, Temu Bisnis Potensi Industri di Eropa, promosi di Johannesburg Afrika Selatan, Dubai UEA, China, Korea, Inggris, dan Turki. Hasil dari pelaksanaan program tersebut seperti terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Penanaman Modal Tahun 2008-2012

No	NAMA PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN BERDASARKAN TAHUN					JUMLAH SELURUH KEGIATAN
		2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Peningkatan Iklim Investasi	3	7	4	4	4	22
2.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	4	3	2	1	1	11
JUMLAH		7	10	6	5	5	33

Sumber: LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2008-2011, DPA BKPPMD Tahun 2012

2.1.4.4. Sumber Daya Manusia

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar Di Indonesia dibandingkan dengan provinsi lain, berdasarkan struktur umur, proporsi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun ke atas dan penduduk usia di atas 64 tahun, yaitu masing-masing sebesar 64,86%, 29,59%, dan 5,55%. Dengan demikian, angka ketergantungan yang menggambarkan jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh jumlah penduduk usia produktif, sebesar 54,19 yang

berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Jawa Barat menanggung sekitar 55 orang penduduk usia belum/tidak produktif.

Pemerintah daerah berupaya menciptakan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing. Untuk itu, dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Produktivitas, pengembangan produktivitas kewirausahaan, pengukuran produktivitas dan Bimtek *Training Need Analysis*. Melalui kebijakan tersebut diharapkan tersedia tenaga kerja yang terampil, berkeahlian, kompeten dan produktif.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan

Berdasarkan Evaluasi program APBD Tahun 2012 dan tahun berjalan (2013) terhadap indikator RPJMD Tahun 2008-2013 dan data BPS Jawa Barat yang disusun menurut capaian misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat Yang Produktif Dan Berdaya Saing

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Jawa Barat, yang merupakan Misi Pertama pembangunan daerah, yaitu Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing. Urusan yang terkait dengan Misi Pertama tersebut adalah urusan pendidikan, perpustakaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, kebudayaan, serta agama. Indikator sebagai hasil pembangunan pada masing-masing urusan tersebut, digambarkan dengan beberapa indikator, yaitu rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, serta angka harapan hidup (AHH).

Sasaran misi pertama adalah penuntasan program pemberantasan buta aksara, peningkatan akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan penancangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja, peningkatan pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, peningkatan kualitas

kehidupan beragama, serta revitalisasi nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal.

Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator Misi Satu belum mencapai target, seperti pada Tabel 2.6

Tabel 2.6.
Evaluasi Capaian Misi Satu RPJMD S/D 2012

Indikator	Target	Capaian
1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) – (tahun)	2012: 8,49 - 8,74 2014: 8,77 - 9,04	RLS: 8,15
2. Angka Melek Huruf (AMH) – (%)	2012: 97,41 – 97,42 2014: 98,16 - 98,33	a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI: 119,31 % b. APK - SMP/MTs :94,55% c. APK - SMA/SMK/MA: 67,78%
3. Angka Kematian Bayi (AKB) – (tahun)	2012: 30 – 35 per 1000 kelahiran hidup (KH) 2014: 24 per 1000 KH	30 per 1000 kelahiran hidup
4. Angka Harapan Hidup (AHH) – (Tahun)	2012: 69,50 – 69,56 2014: 70,93	AHH: 68,60

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan ekonomi regional Berbasis Potensi Lokal

Capaian kinerja pembangunan perekonomian sebagai implementasi pencapaian Misi Kedua, yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal. Urusan yang terkait dengan Misi Kedua, yaitu koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; penanaman modal; pertanian; pariwisata; perdagangan; industri; energi dan sumber daya mineral; kelautan dan perikanan; serta kehutanan. Dengan indikator yang digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, laju pertumbuhan investasi, serta angka partisipasi angkatan kerja.

Capaian indikator pada Misi Dua telah melampaui target indikator kinerja pada RPJMD kecuali untuk daya beli masyarakat seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7.
Evaluasi Capaian Misi Dua RPJMD S/D 2012

Indikator	Target	Capaian
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) %	2012: 6,3 – 6,5 2014: 6,5 – 7,0	6,21
2. Daya Beli Masyarakat	2012 : Rp. 637.740 2014 : Rp. 642.960 – Rp. 643.370	637,67
3. Laju Pertumbuhan Investasi	2012 : 12,00 – 14,00 2014 : 12,00 – 16,00	13,84
4. Indeks Gini	2012: 0,18 – 0,19 2014:	0,41
5. Angka Partisipasi Angkatan Kerja.	2012: 64.92 2014:	TPAK : 64,26 Penyediaan Satu Juta Kesempatan Kerja: 1.399.114. orang. a. Antar Kerja Lokal (AKL): 1.035.657 orang b. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) : 17.778 orang c. Antar Kerja Antar Negara (AKAN): 345.679. orang. • Penyerapan tenaga kerja: 18.321.108. orang

Misi 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur dilakukan melalui berbagai upaya untuk pencapaian Misi Ketiga ini, yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah. Adapun urusan yang terkait dengan Misi Ketiga ini adalah pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, energi dan sumber daya mineral, serta lingkungan hidup. Indikator yang digunakan yaitu tingkat kemantapan jalan, intensitas tanam padi yang ditopang kondisi jaringan irigasi, rasio elektrifikasi, cakupan pelayanan air bersih, air limbah dan persampahan perkotaan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada umumnya misi Ketiga telah mencapai target indikator kinerja pada RPJMD kecuali untuk Cakupan Pelayanan Air Bersih (perkotaan) dan Cakupan Pelayanan Air Limbah (domestik perkotaan) seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.8.
Evaluasi Capaian Misi Tiga RPJMD S/D 2012

Indikator	Target	Capaian
1. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	2012: 93 - 94 % 2014: 99,05%	Kemantapan jalan 95,08 % (2011)
2. Intensitas Tanam Padi	2012: 194-198% 2014: >200%	Intensitas Tanam Padi 200%
3. Rasio Elektrifikasi Perdesaan	2012: 100% 2014: 100%	100% (Tercapai)
4. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	2012: 71,00 - 73,00% 2014: 76,80%	73,55 % (Tercapai)
5. Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan)	2012: 62 - 65 2014: 67%	65% (Tercapai)
6. Cakupan Pelayanan Air Bersih (perkotaan)	2012: 60 - 65% 2014: 62,5%	55% (Tidak Tercapai)
7. Cakupan Pelayanan Air Limbah (domestik perkotaan)	2012: 61 - 67% 2014: 65%	63 % (Tercapai)

Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan

Urusan yang terkait dengan Misi Keempat yaitu kependudukan dan catatan sipil, penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral serta kehutanan. Indikator yang digunakan adalah laju pertumbuhan penduduk, tingkat status mutu sungai utama dan waduk besar, jumlah hari dengan kualitas udara perkotaan kategori baik; capaian luas kawasan lindung, dan jumlah penerapan energi baru dan terbarukan.

Hasil evaluasi menunjukkan pada umumnya misi empat belum mencapai target indikator kinerja pada RPJMD seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.9.
Evaluasi Capaian Misi Empat RPJMD S/D 2012

Indikator Misi	Target	Capaian Misi
1. Laju Pertumbuhan Penduduk	2012: 1,7-1,8% 2014: 1,3%	1,66%
2. Tingkat Status Mutu Sungai Utama Dan Waduk Besar	2012: Cemar Sedang 2014:	<ul style="list-style-type: none"> • Cemar Ringan : Sungai Cileungsi Wanaherang, Sungai Cikarang Jonggol, Sungai Wanayasa, Sungai Bayongbong • Sungai lainnya termasuk kategori cemar berat
3. Jumlah Hari Dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik.	2012: 27 – 30 hari baik/th 2014: 55 hari baik/th	50 hari kategori baik
4. Capaian luas kawasan lindung terhadap luas Jawa Barat	2012: 31 – 34 % 2014: 40,1 %	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Lahan Kritis melalui Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 429.525,99 Ha, sehingga Kawasan Lindung menjadi 32,5% Tahun 2010.
5. Jumlah Penerapan Energi Alternatif.	2012: Meningkatnya diversifikasi energi dari mikro hidro, biofuel (bio kerosin) serta biogas 2014:	Pemanfaatan energi panas bumi: 1.075 Megawatt (MW)

Misi 5 : Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah Dan Kualitas Demokrasi

Misi lima yang berbunyi “Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah Dan Kualitas Demokrasi” pada RPJMD 2008-2013 yang dituangkan pada Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat No 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, mengindikasikan terdapat Sembilan komponen yang digunakan dalam meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi yaitu: (1) Meningkatnya kinerja aparatur, (2) Terwujudnya *good governance*, (3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik, (4)

Meningkatnya pembangunan perdesaan, (5) Meningkatnya pembangunan hukum di daerah, (6) Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat, (7) Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan, (8) Meningkatnya peran dan fungsi partai politik, dan (9) Menguatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik.

Berdasarkan komponen tersebut, maka dalam upaya menentukan kinerja pemerintah di bidang pemerintahan dan demokrasi, digunakan beberapa indikator sebagai alat ukur keberhasilan, sebagai berikut:

Indikator	Target
1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan	Baik
2) Skala Komunikasi Organisasi	Baik
3) Jumlah Angka Kriminalitas	Menurunnya Angka Kriminalitas
4) Jumlah Kasus Korupsi	Menurunnya Jumlah Kasus Korupsi
5) Tingkat Partisipasi Pemilih	75,00 – 78,00%

Penyelenggaraan manajemen pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang ditopang oleh aparatur yang profesional, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi etika, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dengan wadah struktur kelembagaan daerah yang memiliki ukuran yang tepat guna mewujudkan birokrasi yang efisien.

Capaian Efektifitas Pemerintahan Daerah Dan Kualitas Demokrasi Jawa Barat Tahun 2008-2011, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu di bidang perizinan. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dalam kurun waktu 2009 sampai dengan tahun 2011 capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan berada pada koridor baik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) RI sebagai salah satu provinsi terbaik dalam hal integritas pelayanan publik. Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi lelang sebanyak 1.562 paket untuk Tahun 2010, dengan efisiensi anggaran sebesar 13,60% dari pagu yang disediakan sehingga LPSE Jawa Barat berhasil menjadi LPSE terbaik se-Indonesia.

Hal ini merupakan hasil dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan investasi melalui:

- a) Penyelenggaraan pelayanan publik yang kondusif dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui implementasi instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi dengan meluncurkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- b) Pelayanan perizinan terpadu yang merupakan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam misi ke 5 dalam hal ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government and good governance*;
- c) Pergub Jawa barat no.6 Th.2007 ttg Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat
- d) Pergub Jawa Barat no.7 Th.2007 ttg Pedoman Penyusunan Standar Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat
- e) Kepgub No.061/Kep.53-Org/2007 ttg Pedoman Tenis PPTSP di Jabar
- f) Pergub Jawa Barat No.34 tahun 2008 ttg Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2009
- g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

- h) Implementasi regulasi di atas menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi program Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian dengan komponen kegiatan
- i) Pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan publik (mencakup pelayanan perijinan, administrasi pertanahan dan lain-lain), sedangkan OPD utama dalam hal ini adalah Biro Organisasi, DISPENDA yang dibantu oleh mitranya yaitu BPPT, BADIKLATDA.
- j) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Jawa Barat telah mengoperasikan serentak gerai perizinan di empat zona wilayah guna mengoptimalkan pelayanan di Bogor, Cirebon, Garut dan Purwakarta.
- k) Skala Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan pada tahun 2010 sebesar 76,27, meningkat sebesar 2,16 poin dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebesar 74,11.

Komunikasi birokrasi merupakan instrumen untuk bekerjanya suatu administrasi. Dimana birokrasi bekerja berdasarkan pembagian kerja, hirarki kewenangan, impersonalitas hubungan, pengaturan perilaku, dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan memerlukan komunikasi yang baik.

Sejumlah terobosan sudah dilakukan diantaranya Reformasi Birokrasi menuju *clean government* dan *good governance*. Untuk meningkatkan kinerja maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur, pengembangan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja, pengadaan barang/jasa secara elektronik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan *clean government* dan *good governance*. Diharapkan semua itu mampu mempercepat capaian masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 25 Tahun 2010, Komunikasi organisasi tersebut terlihat dalam setiap misi. Pada misi 5 misalnya terlihat dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian dalam melaksanakan Penerapan insentif berbasis kinerja untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, terlihat adanya keterlibata OPD Utama yaitu BKD, Biro Organaisasi dan BAPPEDA, Biro Keuangan, Biro HUKHAM sebagai OPD Mitra Utama.

Indikator Jumlah kriminalitas ini merupakan Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dan didalamnya terdapat beberapa indikator lainnya, yaitu Jumlah kasus peredaran narkoba; Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba; Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan; Jumlah unjuk rasa; Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk; Rasio jumlah linmas per penduduk; Rasio Pos Siskamling per desa/kelurahan.

Dalam Indikasi Rencana Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 25 Tahun 2010, disebutkan bahwa target yang sudah dicanangkan adalah terhadap Tingkat kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan kondisi awalnya pada tahun 2008 terdapat 62%, dan target untuk tahun 2009 sebesar 65%, tahun 2010 sebesar 68%, tahun 2011 sebesar 75%, tahun 2012 sebesar 75% dan tahun 2013 sebesar 80 %.

Target Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondisi awalnya pada tahun 2008 terdapat 75%, dan target untuk tahun 2009 sebesar 80%, tahun 2010 sebesar 80%, tahun 2011 sebesar 80%, tahun 2012 sebesar 80% dan tahun 2013 sebesar 90 %. Kemudian Target lainnya seperti pada jumlah unjuk rasa tidak menggambarkan adanya masalah kriminalitas disana. Oleh karena itu belum dapat dijadikan sebagai indikator dalam tingkat kriminalitas di Jawa Barat.

Program pemberantasan korupsi merupakan kewenangan yang berada di bawah Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian. Adapun komponen dari kegiatan yang dilakukan dalam mencapai indikator pemberantasan korupsi adalah Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi secara Konsisten dan melembaga, serta penanganan masalah aktual guna pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta mendukung terwujudnya Good Governance. Kegiatan ini akan dilakukan oleh Inspektorat, Biro Org, Biro Hukum Sebagai OPD Utama Dan Dibantu Oleh BAPPEDA, BIRO OTDA & Kerjasama Sebagai Mitra OPD Utama

Dalam Indikasi Rencana Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa untuk indikator penurunan tingkat korupsi di targetkan Pemerintah akan mengeluarkan regulasi sebanyak 3 regulasi masing-masing pada tahun 2009, 2010 dan 2011, sedangkan untuk tahun 2012 sebanyak 4 dan 2013 sebanyak 5 regulasi. Semua produk hukum tersebut beada dibawah tanggung jawab SKPF Biro Hukum dan HAM. Disamping itu telah ditetapkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013.

Upaya pencapaian peningkatan partisipasi politik masyarakat akan dilakukan oleh Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Partsipasi politik dalam hal ini dibatasi pada keikut sertaan mereka dalam Pemilu yang akan dilakukan oleh KESBANGPOL sebagai OPD Utama dan Biro PEMUM sebagai Mitra OPD Utama.

Dalam Indikasi Rencana Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa untuk indikator Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu yang kondisi awalnya pada tahun 2008 terdapat 67.31%, dan target untuk tahun 2009 sebesar 75%, tahun 2010 sebesar 80%, tahun 2011 sebesar 83%, tahun 2012 sebesar 85% dan tahun 2013 sebesar 87 %.

Perencanaan harus menunjukkan garansi progress, adanya kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat. Kemajuan yang dimaksud untuk bidang efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi tercermin dalam indikator-indikator nya. Terkait dengan hal itu, pada bagian ini disajikan hasil evaluasi mengenai indikator pencapaian Misi 5 tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan isu yang berhubungan berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Organisasi Perangkat Daerah. **Permasalahan pada Misi Pertama**, masalah pada bidang pendidikan adalah (1) masih tingginya angka rawan drop out (DO) siswa SD dan SMP, (2) masih rendahnya kesadaran para orang tua yang memiliki anak luar biasa untuk menyekolahkan di lembaga PLB dan masih kurang sarana dan prasarana penunjang berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah yang menyediakan pendidikan inklusi.

Pada Bidang Kesehatan adalah: (1) Masih rendahnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat serta masih kurangnya pendekatan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, (2) kurang meratanya penyebaran tenaga kesehatan di Jawa Barat yang penempatannya masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, (3) Belum maksimalnya perencanaan sumber daya manusia bidang tenaga kesehatan, sarana dan prasarana baik secara kuantitatif maupun kualitatif, (4) terbatasnya data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan kesehatan, menyebabkan analisis masalah kesehatan maupun analisis potensi sumber daya dan perencanaan pembangunan kesehatan kurang optimal.

Pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah (1) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda serta peningkatan prestasi olah raga. Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah : (1) masih rendahnya akses kesempatan usaha dan pendidikan untuk perempuan, (2) Belum optimalnya lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Pada Bidang Sosial, (1) Adanya kecenderungan peningkatan jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), (2) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Pada bidang kebudayaan masih rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global dan belum banyaknya pengakuan HAKI terhadap budaya Jawa Barat. Potensi budaya dan keindahan alam di Jawa Barat belum digali dan dikembangkan secara optimal sebagai potensi wisata Jawa Barat.

Permasalahan pada misi kedua, pertumbuhan investasi di Jawa Barat dikategorikan tinggi, tetapi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan

investasi di Jawa Barat, antara lain: belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, dan masih rendahnya infrastruktur pendukung. Belum optimalnya komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN ditandai dengan munculnya aspirasi buruh dengan menggelar aksi/demo buruh, Regulasi yang berkaitan dengan proyek-proyek investasi yang memerlukan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) belum optimal mengakselerasi pembangunan infrastruktur Jawa Barat, Infrastruktur dasar yang belum memadai berdasarkan survey World Economic Forum (WEF) 2011 - 2012 salah satu faktor penghambat investasi di Indonesia adalah infrastruktur darat (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan energi untuk mengatasi hal tersebut perlunya komitmen pemerintah untuk memprioritaskan penyediaan infrastruktur dasar tersebut.

Pada bidang ketenagakerjaan, permasalahan yang mendasar adalah masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja. Akibatnya, angkatan kerja yang begitu besar di Jawa Barat belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal. Di pihak lain, perkembangan industri kreatif dan wirausahawan muda belum optimal.

Permasalahan Pada Misi Ketiga, Pembangunan infrastruktur strategis belum berjalan sesuai yang direncanakan, seperti: koridor Bandung-Cirebon, Cianjur- Sukabumi- Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya serta Jabar Selatan. Demikian pula, pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU), Soreang-Pasirkoja (SOROJA), dan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), serta perkembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Di pihak lain, infrastruktur jalan yang baru selesai dibangun di Jabar Selatan sudah mulai mengalami kerusakan di berbagai titik.

Permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain: (1) Pembangunan sumber daya strategis belum terlaksana secara optimal; (2) Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi; dan (3) Kondisi jaringan irigasi juga belum memadai mengingat jaringan irigasi dalam kondisi rusak

berat dan ringan masih sebesar 38,28%. Permasalahan pada aspek infrastruktur listrik dan energi adalah penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, surya, dan angin masih sangat terbatas, demikian pula pada pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Permasalahan lain yaitu masih rendahnya akses masyarakat terhadap prasarana air minum yang memenuhi syarat baik di perkotaan maupun di perdesaan, antara lain disebabkan oleh makin terbatasnya sumber air baku untuk air minum, masih rendahnya komitmen Kabupaten/kota dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan air minum, masih rendahnya kinerja kelembagaan pengelola Sistem penyediaan Air Minum, serta kenaikan jumlah penduduk yang relatif tinggi. Sedangkan permasalahan dalam pengelolaan air limbah adalah masih kurangnya kinerja pengelolaan air limbah domestik karena tidak seluruh sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik menunjukkan kinerja baik sehubungan anggaran untuk operasional dan maintenance di masing-masing Kabupaten/kota sangat kurang.

Permasalahan Pada Misi Keempat, Tingginya alih fungsi lahan produktif. Capaian kawasan lindung sampai dengan akhir Tahun 2011 belum mencapai 45%, seperti yang ditargetkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat. Implementasi pengembangan PKN secara fungsi dan peran yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat belum optimal terutama yang terkait dengan skala kegiatan ekonomi, pelayanan infrastruktur, serta daya dukung dan daya tampung ruangnya. Secara umum sistem kota hampir seluruhnya mengalami masalah dalam penyediaan sistem sarana dan prasarana. Perbedaan ketersediaan sarana dan prasarana antar menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah Jawa Barat bagian utara dengan bagian selatan serta antara bagian barat, tengah dan timur.

Sementara itu kondisi PKW secara umum menunjukkan masih diperlukan perbaikan dan dukungan bagi peningkatan kinerjanya di Jawa Barat. Secara umum integrasi antar provinsi baik PKN dan PKW masih rendah. Selain itu masih tingginya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana yang dihadapi Jawa Barat memerlukan upaya yang lebih kuat untuk pemulihan lingkungan dan pengurangan resiko bencana.

Permasalahan Pada Misi Kelima, Kualitas pelayanan publik yang masih relatif rendah disebabkan, antara lain: (1) Kinerja, budaya dan system kepegawaian yang belum mampu mendorong profesionalitas dan kompetensi aparatur, (2) Belum

terbentuknya kelembagaan yang ramping struktur, kaya fungsi; dan (3) Sistem dan prosedur kerja belum efisien, efektif dan berperilaku hemat.

Budaya taat hukum sebagian besar masyarakat menurun yang ditunjukkan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban dan keamanan. Selain itu, penegakan hukum masih lemah dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) belum diwujudkan di tingkat masyarakat. Pendataan aset belum terselesaikan .karena masih adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat

Gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat juga masih cukup tinggi yang ditunjukkan, antara lain: tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum masih tinggi., kewibawaan pemerintah daerah berkurang, dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan belum optimal karena: (1) Kebutuhan dan aspirasi masyarakat belum terakomodasikan dengan baik dalam perencanaan pembangunan; (2) Kapasitas perencanaan belum memadai di semua tingkatan; dan (3) Rendahnya konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan perdesaan menjadi prioritas di Jawa Barat permasalahannya adalah belum optimalnya kinerja dan kesejahteraan pemerintahan desa, sehingga perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa. Menjelang Pemilukada tahun 2013 diperlukan penguatan peran masyarakat dalam kehidupan politik dengan membangun tanggungjawab bersama terhadap penanganan ketertiban dan keamanan masyarakat.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

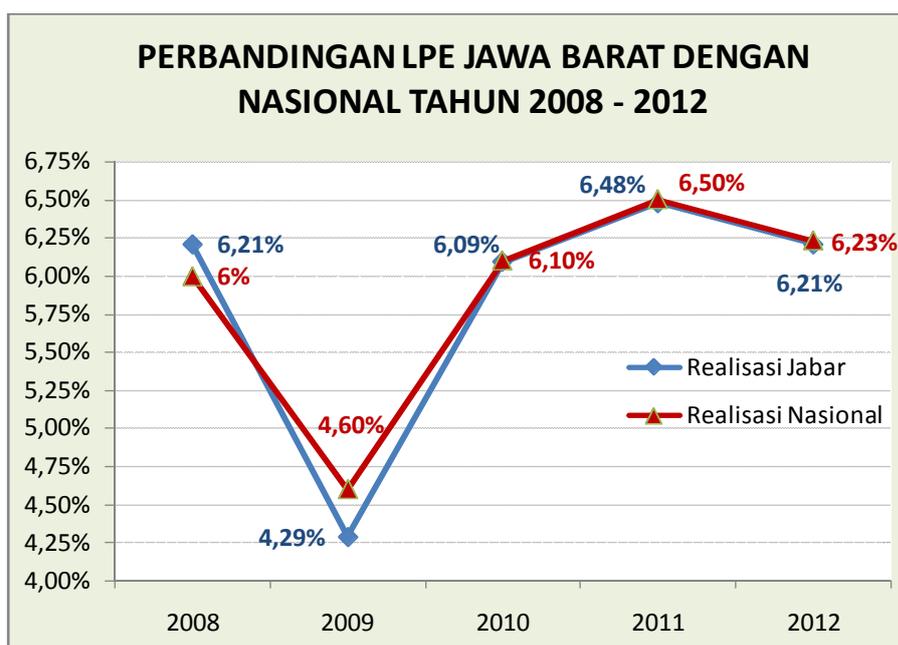
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik Perekonomian Daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Jawa Barat tahun 2012 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2013-2014. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Jawa Barat serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat

Perkembangan ekonomi Jawa Barat tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi, meski sedikit mengalami perlambatan. Beberapa fenomena ekonomi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat antara lain kondisi perekonomian Indonesia yang cukup baik dan mampu dijaga relatif stabil di level yang cukup tinggi di tengah gejolak ekonomi global. Perkembangan kinerja LPE bervariasi dari tahun ke tahun seiring dengan dinamika perekonomian nasional dan global. Ekonomi Jawa Barat sama halnya dengan ekonomi nasional bercirikan *domestic-demand led growth*, dimana dominasi utama berasal dari konsumsi rumah tangga. Permintaan domestik menjadi kekuatan ekonomi Jawa Barat untuk tumbuh dan membentuk resistensi terhadap gejolak eksternal.

Proses penyesuaian LPE Jawa Barat ke arah pertumbuhan di atas 6% berlangsung dalam jangka waktu pendek dimana pada Tahun 2010 pertumbuhan melonjak sesuai kapasitasnya mencapai 6,09%, bahkan pada Tahun 2011 kembali normal seperti pencapaian Tahun 2007 yakni 6,48%. Namun pada Tahun 2012 melambat menjadi 6,21%. Perlambatan ini tidak lepas karena kinerja sektor pertanian yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 0,7%. Perkembangan LPE Jawa Barat Tahun 2008-2012 ditampilkan pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Jawa Barat, BPS RI, RPJMD 2008 - 2012

Gambar 3.1
Perkembangan LPE Jawa Barat Tahun 2008 - 2012

Gambaran struktur ekonomi Jawa Barat dan distribusi serta laju pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Struktur Ekonomi Jawa Barat
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2011-2012 (Persentase)

Lapangan Usaha	2011	2012
PRIMER	26,55	26,22
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	14,70	14,44
2. Peretambangan dan Pengalihan	11,85	11,78
SEKUNDER	35,26	35,18
3. Industri Pengolahan	24,33	23,94
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,77	0,79
5. Bangunan/Konstruksi	10,16	10,45
TERSIER	38,19	38,60
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,80	13,90
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,62	6,66
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,21	7,26
9. Jasa-jasa	10,56	10,78
PDRB	100	100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.2
Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan
Tahun 2011-2012

No	Komponen Penggunaan	PDRB		
		Distribusi		Laju Pertumbuhan
		2011	2012	
1.	Konsumsi Rumah Tangga	54,61	54,56	-0,05
2.	Konsumsi Pemerintah	9,01	8,89	-0,12
3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,97	33,16	1,19
4.	a. Perubahan Inventori	0,95	2,16	1,21
	b. Diskrepansi Statistik	2,06	2,79	0,73
5.	Ekspor Barang dan Jasa	26,35	24,26	-2,09
6.	Dikurangi: Impor Barang dan Jasa	24,94	25,81	0,87

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan sisi produksi, kapasitas sektor tersier semakin besar terkait dengan keunggulan Jawa Barat sebagai pusat kuliner dan fashion yang menarik bagi turis domestik maupun asing untuk mengunjungi Jawa Barat terutama Kota Bandung dan sekitarnya. Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (PHR) tumbuh tinggi menembus dua digit pada Tahun 2012 mencapai 11,55%, Hanya sektor PHR yang termasuk sektor dominan yang tumbuh di atas dua digit, disumbang paling besar dari sub sektor perdagangannya. Intensitas yang tinggi di sektor tersebut diperkuat dengan banyaknya wisatawan dari luar Jabar yang berkunjung dan berbelanja di Jawa Barat. Pertumbuhan yang tinggi di sektor bangunan terkait erat dengan maraknya pembangunan perumahan dan apartemen sebagai respon terhadap kebutuhan perumahan bagi penduduk Jabar.

Demikian halnya sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh mencapai 12% Tahun 2012. Selain itu, sektor industri pengolahan yang merupakan sektor dominan PDRB Jawa Barat mencapai 3,94% seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekspor Jawa Barat menjadi 5,52% dibandingkan Tahun 2011 yang mencapai 6,51%. Krisis ekonomi yang masih terjadi di sejumlah negara tujuan ekspor Indonesia mengakibatkan turunnya permintaan terhadap ekspor Jawa Barat.

Pertumbuhan sektor pertanian pada Tahun 2012 sebesar - 0,7%. Iklim yang tidak menentu merupakan faktor determinan utama melemahnya kinerja sektor pertanian. Sekalipun pertumbuhan sektor pertanian menurun di 2012, tetapi berpotensi tumbuh kembali karena besarnya peluang pengembangan agribisnis di Jawa Barat.

Sementara dari sisi konsumsi rumah tangga masih tetap mendominasi PDRB Jawa Barat, yakni sebesar 58,64% Tahun 2012. Hal ini seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk Jawa Barat dan meningkatnya daya beli masyarakat.

Pada Tahun 2012 inflasi di Jawa Barat termasuk kategori baik hanya mencapai 3,86%, hal ini tidak lepas dari peran kolaborasi otoritas moneter dengan pemerintah daerah melalui forum pengendalian inflasi daerah. Kinerja inflasi yang baik secara langsung berdampak pada besaran daya beli masyarakat. LPE tinggi berdampak positif pada tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun. Pada Agustus 2012 tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat sebesar 9,08%, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih relatif tinggi dibandingkan nasional yang mencapai 6,14%. Fakta tingkat pengangguran yang masih lebih tinggi dari nasional dan daya beli yang masih rendah menyangkut kondisi kinerja perekonomian yang begitu kompleks. Fakta demikian tidak mungkin diselesaikan hanya mengandalkan instrumen kebijakan fiskal daerah, namun juga tergantung pada instrumen kebijakan moneter yang lebih memadai, kondisi kinerja dunia usaha dan perekonomian nasional serta global. Laju pertumbuhan investasi Tahun 2012 atas dasar harga berlaku sebesar 13,84%. Fakta ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat sebagai tujuan investasi tetap tinggi.

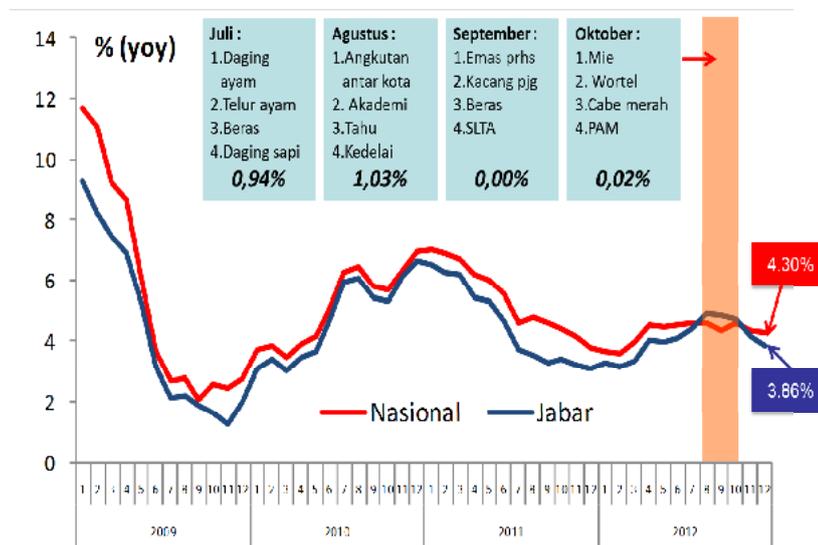
Dari sisi penggunaan, sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Tingginya konsumsi didukung oleh daya beli yang relatif terjaga (karena inflasi yang rendah), keyakinan konsumen yang tinggi, peningkatan kelas berpendapatan menengah. Investasi yang tinggi dikarenakan konsumsi yang tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, iklim investasi yang membaik, perbaikan *sovereign rating*, belanja modal pemerintah yang meningkat. Pertumbuhan Konsumsi rumah tangga dan investasi tergambarkan pada Gambar 3.2.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 3.2.
Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB Jabar

Tingkat inflasi Jawa Barat selama tahun 2012 mengalami perbaikan pencapaian sebesar 3,86 persen lebih rendah dari nasional yang mencapai 4,30 persen, walaupun terdapat tekanan inflasi selama bulan Agustus-Oktober 2012.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 3.3.
Inflasi di Jawa Barat

Pada tahun 2012, PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp.90,87 trilyun, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar 58,47%. Komponen penggunaan lainnya, meliputi pengeluaran untuk konsumsi pemerintah sebesar 8,51%, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar 18,60%, perubahan inventori sebesar 5,25%, transaksi ekspor sebesar mencapai 34,25%, dan impor sebesar 28,27%.

Tingkat kemakmuran masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kapita atau *percapita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik.

Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini, digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Angka PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 3.3
PDRB per Kapita Jawa Barat Tahun 2011-2012

PDRB per Kapita	Tahun 2011	Tahun 2012
(1)	(2)	(3)
Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)	19.645.000	21.250.000
Atas Dasar Harga Konstan (rupiah)	7.828.000	8.180.0000

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Jawa Barat terus mengalami peningkatan yang tinggi selama periode 2011-2012. Tahun 2011, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp.19.645.000,-, dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 21.250.000. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan meningkat dari Rp.7.828.000,- pada tahun 2011 menjadi Rp. 8.180.000.

Namun disayangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan dan PDRB per kapita yang terus meningkat, belum disertai dengan kondisi sosial ekonomi yang baik pula. Ketimpangan pendapatan

semakin besar yang tercermin dalam Indeks Gini (IG) selama periode tahun 2008-2010 terus meningkat. Pada tahun 2010 Indeks Gini mencapai 0,37, padahal pada tahun 2007 hanya 0,21. Diperkirakan tahun 2012 di atas 0,4. Kondisi ini sama dengan nasional, bahwa di Indonesia secara umum distribusi pendapatan semakin tidak merata dalam lima tahun terakhir. Fakta ketimpangan pendapatan yang memburuk terkait erat dengan akses masyarakat marjinal terhadap sumberdaya ekonomi produktif yang masih terbatas.

Tidak hanya ketimpangan pendapatan yang terjadi, juga ketimpangan wilayah. Hal ini tercermin dalam perbedaan nilai PDRB antar kabupaten kota yang cukup tinggi. Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor merupakan wilayah industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat. Kemudian Kota Bandung sebagai kota jasa yang juga turut menyumbang relatif besar dibanding kota lainnya. Dalam tiga tahun terakhir nilai PDRB masing-masing wilayah tersebut di atas 30 trilyun rupiah (harga konstan tahun 2000). Terdapat keselarasan antara dominasi kabupaten kota dengan dominasi sektor ekonomi terhadap PDRB. Sedangkan daerah-daerah pertanian rata-rata memiliki PDRB di bawah 10 trilyun rupiah. Namun karena jumlah kabupaten/kota yang bercirikan pertanian masih lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota maka secara agregat membentuk nilai PDRB sektor pertanian sebagai sektor dominan ketiga dalam struktur PDRB Jawa Barat.

Gambaran kondisi sosial ekonomi lainnya dapat dilihat diantaranya dari indikator ketenagakerjaan dan kemiskinan. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2011, Jawa Barat mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja. Pada Agustus 2011 jumlah angkatan kerja mencapai 19,35 juta orang, sedangkan pada Agustus 2012 mencapai 20,15 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada Agustus 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Agustus tahun 2011. Pada bulan Agustus 2012 penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 18,32 juta orang, sementara pada bulan Agustus tahun 2011 sebanyak 17,45 juta orang bertambah 870 ribu orang.

Selama kurun waktu satu tahun terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 80 ribu orang. Pada Agustus 2011 penganggur di Jawa Barat tercatat sebanyak 1,90 juta orang, sedangkan pada Agustus 2012 penganggur tercatat berjumlah 1,82 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada bulan Agustus 2011 sebesar 62,27 persen dan pada Agustus 2012 sebesar 63,78 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat mengalami penurunan dibanding Agustus 2011 sebesar 0,75 persen, yang mana bulan Agustus 2011 TPT mencapai 9,83 persen dan pada bulan Agustus 2012 mencapai 9,08 persen.

Penyerapan tenaga kerja yang terbesar pada Sektor Perdagangan (26,47%), Industri (20,58%) dan Pertanian (19,96%) pada bulan Februari 2012. Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2011, pada Februari 2012 jumlah penduduk yang bekerja di Sektor Industri mengalami kenaikan sebesar 244.583 orang (1,35%), sebaliknya, Sektor Pertanian menurun sekitar 374.785 orang (2,06 %).

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, artinya kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat pada Maret 2012 sebesar 4.648.630 orang (10,65 persen). Dibandingkan dengan bulan Maret 2011 yang berjumlah 4,65 juta orang (10,57 persen), jumlah penduduk miskin bulan Maret 2011 mengalami penurunan sebesar 125.090 orang (0,61 persen). Sebaran penduduk miskin pada bulan Maret 2011, untuk daerah perkotaan sebanyak 2.654.690 orang (9,26 persen terhadap jumlah penduduk perkotaan) sedangkan di daerah perdesaan sebanyak 1.992.930 orang (13,32 persen).

Tabel 3.4
Indikator Ketenagakerjaan dan Kemiskinan
di Jawa Barat Tahun 2011-2012

Indikator	Tahun 2011	Tahun 2012
Ketenagakerjaan :		
1. Angkatan Kerja (juta org) :	19,35	20,15
▪ Bekerja (juta org)	17,45	18,32
▪ Penganggur (juta org)	1,90	1,82
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	62,27	63,78
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,83	9,08
Kemiskinan :		
▪ Jumlah Penduduk (juta org)	4,65	44,55
▪ Persentase Penduduk Miskin (%)	10,57	9,89

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Memperhatikan kondisi perekonomian Jawa Barat tahun 2012, maka perkiraan kondisi indikator ekonomi regional Jawa Barat pada tahun 2013 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5
Perkiraan Indikator Ekonomi Regional Makro Tahun 2013

No	Indikator	Perkiraan Capaian Tahun 2013
1	a. Jumlah Penduduk (jiwa) ¹⁾	45.626.109
	b. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,6 - 1,8
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,5 - 7,0
3	Inflasi (%)	4,5 - 5,0
4	Nilai PDRB adhk 2000 (Rp. trilyun)	389,16
5	Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk	5,39 - 9,07
6	Laju Pertumbuhan Investasi (%)	12 - 16
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8 - 9
8	Nilai Investasi/PMTB adhb (Rp. trilyun)	188,381

Sumber : Hasil Analisis Bappeda dan BPS Provinsi Jawa Barat ; Bank Indonesia

Keterangan : ¹⁾ Proyeksi

Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 45.626.109 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,6% sampai dengan 1,8%. Indikator perkembangan ekonomi yang digambarkan dengan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB dan investasi pada tahun 2013 sebagai berikut : laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh sebesar 6,5% sampai dengan 7,0% dengan nilai PRDB atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp.389,16 trilyun, sedangkan inflasi diperkirakan sebesar 4,5% hingga 5,0%. Laju pertumbuhan investasi diperkirakan mencapai angka 12-16% dengan nilai investasi/pembentukan modal tetap bruto atas

dasar harga berlaku sebesar Rp.188,381 triliun. Kondisi kemiskinan dan ketenagakerjaan pada tahun 2013 digambarkan dengan indikator persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin diperkirakan sebesar 5,39-9,07% sedangkan tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berada pada kisaran 8% hingga 9%.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

Tantangan dan prospek perekonomian Jawa Barat, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional Jawa Barat sendiri.

3.1.2.1. Global

Setelah resesi global sejak pertengahan tahun 2008 yang dimulai dengan krisis ekonomi di Amerika Serikat, upaya pemulihan ekonomi dunia yang dimulai sejak akhir 2009, masih disusul oleh krisis ekonomi lainnya yang berasal dari belahan dunia lain yaitu negara-negara eropa seperti Portugal, Italia, Yunani (Greece) dan Spanyol (PIGS) sampai dengan tahun 2011. Belum lagi kesulitan ekonomi Jepang akibat bencana tsunami tahun 2011 yang lalu, masih belum dapat diatasi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia hanya akan tumbuh sebesar 2,6% pada tahun 2012 dan 3,2% pada tahun 2013. International Monetary Fund (IMF) juga telah merevisi angka proyeksi pertumbuhan ekonominya dari 3,8% (2012) dan 4,5% (2013) menjadi hanya 3,3% (2012) dan 3,9% (2013). Krisis di kawasan Eropa dan AS akan berdampak pada pengurangan konsumsi masyarakat wilayah tersebut sehingga diduga akan mengurangi nilai ekspor Jawa Barat, mengingat Eropa dan AS merupakan pasar potensial untuk ekspor Jawa Barat.

Secara umum pemulihan ekonomi global saat ini disebabkan oleh relatif berhasilnya intervensi pemerintah di berbagai negara yang telah mendorong sisi permintaan dan

mengurangi ketidakpastian dan terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan. Namun berbagai peringatan telah dikemukakan oleh para ekonom dunia, IMF dan Bank Dunia, bahwa pemulihan tersebut memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi dalam lima tahun ke depan, yaitu: (1) utang negara maju yang meningkat sejalan dengan upaya peningkatan stimulus fiskal; (2) tingkat pengangguran yang tinggi di negara-negara maju; (3) ketidakpastian harga minyak di pasar dunia yang sangat sensitif terhadap konflik politik antar negara.

Secara gradual selama dua tahun terakhir, telah terjadi pergeseran kekuatan ekonomi global dari Barat ke Timur. Perekonomian Amerika Serikat dan negara industri maju di Eropa memang masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar komoditi bagi ekspor negara-negara berkembang, namun perekonomian negara-negara Asia terbukti lebih tangguh secara fundamental baik secara makro dan mikro ekonomi pasca krisis global 2008, dan telah menjadi motor penggerak perekonomian dunia. China, India dan negara-negara industri di Asia lainnya mulai terlihat dominasinya dalam perekonomian dunia dan menjadi kawasan yang menarik bagi penanaman modal terutama *hot money* yang berasal dari negara-negara Eropa yang sedang dilanda masalah keuangan. Menurut Komite Ekonomi Nasional Indonesia, pada tahun 2050 India dan China akan memiliki 100 juta rumah tangga berpendapatan tinggi serta akan berkontribusi 50% dari PDB dunia.

Pemulihan ekonomi di Asia yang makin membaik pada akhir tahun 2011 serta fakta masih melambatnya pemulihan ekonomi dunia harus dapat diantisipasi oleh ketahanan ekonomi nasional yang stabil dan lentur terhadap dampak ekonomi global, terlebih ekspor perekonomian Indonesia yang sangat nyata khususnya pada peta perdagangan komoditas. Dalam menghadapi trend pelambatan pemulihan ekonomi dunia pasca krisis keuangan, ekspektasi yang baik terhadap kelanjutan pemerintahan serta perkiraan lingkungan eksternal pada tahun 2013 - 2014 mutlak diperlukan.

3.1.2.2. Nasional

Beberapa hasil positif telah dicapai pada pembangunan nasional antara lain pulihnya stabilitas sistem keuangan, menguatnya nilai tukar rupiah, rendahnya tingkat inflasi, dan cukup tingginya pertumbuhan ekonomi. Potensi tekanan inflasi tahun 2013 dan 2014 diperkirakan tidak akan terlalu. Seiring dengan perkiraan membaiknya perekonomian dunia dan adaptasi masyarakat terhadap keseimbangan ekonomi baru maka nilai inflasi tahun 2013-2014 diperkirakan akan kembali menuju tingkat keseimbangan baru yaitu pada rentang 3,5% - 6%.

Mengimbang kondisi perekonomian global, maka berdasarkan publikasi Bank Indonesia pada "Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2014", pada tahun 2013 proyeksi pertumbuhan nasional diproyeksikan sebesar 6,4% - 6,8%, sedangkan di tahun 2014 proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional adalah 6,5% - 6,9%. Asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti oleh asumsi pertumbuhan konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor dan impor barang dan jasa. Angka perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut tentunya telah memperhitungkan dampak diberlakukannya beberapa pakta perdagangan regional seperti *Asean China Free Trade Area (ACFTA)*, *Asean India Free Trade Area (AIFTA)*, dan juga *Asean Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*. Sedangkan menurut Asumsi APBN, pertumbuhan ekonomi tahun 2013 akan menurun 6,7% - 7,0%.

Tabel 3.6
Kondisi Indikator Ekonomi Nasional pada tahun 2010-2013

Indikator	2010	2011				2011*	2012*	2013*
		I	II	III	IV			
Konsumsi Rumah Tangga	4,6	4,5	4,6	4,8	4,9	4,7	4,7 - 5,1	4,7 - 5,1
Konsumsi Pemerintah	0,3	2,8	4,5	2,5	6,9	4,5	7,4 - 7,8	4,7 - 5,1
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8,5	7,3	9,4	7,1	7,2	7,7	9,7 - 10,1	11,8 - 12,2
Ekspor Barang dan Jasa	14,9	12,5	17,5	18,5	17,3	16,5	11,7 - 12,1	12,8 - 13,2
Impor Barang dan Jasa	17,3	14,4	15,3	14,2	14,1	14,5	13,5 - 13,9	15,3 - 15,7
PDB	6,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,3 - 6,7	6,4 - 6,8
*Proyeksi Bank Indonesia								

Optimisme terhadap perbaikan prospek perekonomian semakin diperkuat dengan prospek ekonomi global yang diperkirakan semakin kondusif. Berdasarkan data *World outlook* (IMF, 2011) bahwa sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Ada beberapa hal yang menjadi prospek bagi pembangunan perekonomian Indonesia (Komite Ekonomi Nasional):

1. Rasio hutang terhadap PDB cenderung terus menurun,
2. Cadangan devisa Indonesia cenderung terus meningkat,
3. Investasi asing di Indonesia terus meningkat, dan kinerja perbankan terus membaik. Hal ini memberikan kepercayaan bagi Negara lain untuk berinvestasi di Indonesia, termasuk Jawa Barat,
4. Dalam masterplan Ekonomi, Indonesia diproyeksikan menjadi Negara "*High Income*" pada tahun 2025 dengan nilai GDP nominal perkapita sebesar US\$ 14.900,
5. IMF memproyeksikan Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi kedua tercepat di antara 18 ekonomi terbesar dunia pada tahun 2009-2015,
6. Indonesia akan menjadi semakin dominan di ASEAN dan mulai menjadi lebih besar dari beberapa Negara Eropa,
7. Pada tahun 2020 Indonesia diproyeksikan akan mempunyai populasi pertumbuhan penduduk produktif serta akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil.

Selain prospek secara makro, terdapat pula prospek pada beberapa sektor kunci antara lain:

1. Pemulihan ekonomi global akan mendorong terhadap tumbuhnya permintaan atas bahan baku dan energy yang akan menyebabkan kenaikan harga minyak dan sumber energy alternative seperti batu bara, CPO. Kondisi ini akan memacu pertumbuhan sector pertambangan dan produksi komoditas.

2. Tumbuhnya daya beli masyarakat, yang diindikasikan oleh PDB perkapita Indonesia tahun 2010 mencapai US\$ 3.005, dengan nilai tersebut akan terjadi pertumbuhan konsumsi *discretionary* dan barang mewah yang pesat. Kondisi ini akan meningkatkan konsumsi makanan dan minuman, ritel, telekomunikasi, otomotif, pariwisata serta sektor pendukung lainnya seperti konstruksi dan pengolahan. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, permintaan terhadap makanan akan semakin meningkat dengan pertumbuhan 9%. Sedangkan permintaan terhadap minuman 11%-15% per tahun sampai 2015. Permintaan terhadap obat-obatan akan terus meningkat dengan pertumbuhan 11% sampai tahun 2014. Industri telekomunikasi tumbuh 11% sampai tahun 2015, pengguna internet akan terus meningkat dengan pertumbuhan 33% sampai tahun 2015. Industri mobil dan motor juga diperkirakan akan terus meningkat, tahun 2011-2015 diproyeksikan pertumbuhannya masing-masing mencapai 14%, dan 11,9%. Kunjungan wisata ke Indonesia akan terus meningkat. Sektor pertambangan dari tahun 2011-2015 akan terus meningkat dengan pertumbuhan 13%. Begitu pula dengan produksi CPO diperkirakan akan terus meningkat.

Selain prospek tersebut ada beberapa ancaman yang perlu dihadapi pada pembangunan ke depan antara lain:

1. Wacana pembatasan BBM bersubsidi dan kenaikan Tarif Dasar Listrik akan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi.
2. Perubahan iklim (*climate change*) diperkirakan akan masih berlanjut di tahun 2013 maupun tahun 2014 yang akan berpengaruh terhadap perekonomian.
3. Peningkatan harga minyak dunia, tingkatvolatilitas rupiah terhadap dollar masih cukup tinggi, masih didominasinya arus modal masuk yang bersifat jangka pendek, masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang ditandai

dengangejolak perburuhan akan banyak berpengaruh terhadap dinamika perekonomian.

4. Masalah politik dan hukum yang dapat mengganggu tingkat kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional.

Indonesia mempunyai beberapa kelebihan pada sumberdaya alam dan manusia yang berpeluang besar untuk pembangunan terhadap ekonomi Indonesia, seperti pada table dibawah ini.

Tabel 3.7.
Peluang Ekonomi Indonesia

No.	Bidang	Peluang	Tindakan yang perlu dilakukan
1	Pertanian	Indonesia salah satu penyedia hasil pertanian dan hayati terbesar di dunia	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas pertanian, baik dalam proses pembenihan, penanaman, dan panen • Industrialisasi proses pasca panen untuk menghasilkan produk bernilai tambah • Penerapan bioteknologi untuk menghasilkan bibit unggul maupun obat-obatan
2	Energi	Indonesia penyedia energi alternatif dan sumberdaya alam bernilai tambah	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan teknologi mutakhir dalam proses eksplorasi dan ekstraksi sumberdaya alam, serta pada industri pengolahan hilir untuk menghasilkan produk bernilai tambah • Mengembangkan sumber energi alternatif: Geothermal, Bio-fuel, matahari, angin, hydrogen
3	Industri	Indonesia merupakan salah satu pusat industri manufaktur terbesar dunia	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja berdaya saing global. • Memfasilitasi penerapan teknologi manufaktur terkini di berbagai sector untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dan efisiensi

Sumber : Komite Ekonomi Nasional

Beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan yaitu konsumsi masyarakat terus didorong dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui upaya mengendalikan inflasi dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Upaya untuk mendorong investasi dilakukan dengan peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan prosedur perijinan investasi; dan peningkatan fasilitas investasi. Ekspor terus dipacu pertumbuhannya dengan berbagai kebijakan, antara lain peningkatan akses pasar internasional terutama pasar non tradisional; peningkatan dan diversifikasi produk ekspor dan peningkatan fasilitas ekspor. Hal ini terutama untuk mengatasi kemungkinan permasalahan yang timbul akibat pemberlakuan ACFTA, AIFTA, dan AANZFTA.

Sementara disisi produksi, upaya mendorong pertumbuhan industri pengolahan non migas akan didorong kembali sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, melalui kebijakan peningkatan populasi usaha industri, penguatan struktur industri dan peningkatan produktivitas usaha industri. Sementara sektor lain seperti pertanian, perikanan dan kehutanan diupayakan dengan kebijakan mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian serta peningkatan pendapatan petani.

Untuk efisiensi keuangan negara, Menteri Keuangan telah menetapkan dalam RAPBN 2012 untuk menurunkan besaran subsidi, terutama membatasi subsidi BBM dan mengubahnya menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran seperti subsidi pupuk. Dilakukan pula upaya-upaya untuk menstabilkan harga-harga yang tetap menjadi prioritas utama pemerintah, mengingat tekanan harga komoditas di pasar internasional dan tekanan terhadap masyarakat yang cukup tinggi. Prioritas lain adalah pembenahan infrastruktur publik melalui paket kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di seluruh koridor pulau di Indonesia. Dari total 98 proyek infrastruktur MP3EI di Koridor Jawa, berdasarkan skema pembiayaan: pemerintah, BUMN, dan campuran (termasuk swasta), terdapat 32 proyek yang berlokasi di Jawa Barat. Selain

itu, telah dicanangkan pula revitalisasi pabrik gula yang merupakan program prioritas Kementerian Perindustrian. Kebijakan-kebijakan tersebut diprioritaskan untuk menjawab tantangan dinamika dalam perekonomian Indonesia.

3.1.2.3. Jawa Barat

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan internasional, secara makro pada tahun 2013-2014 prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat diprediksikan masih dalam kondisi yang cukup stabil meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi pemulihan perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Provinsi Jawa Barat diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Proyeksi Beberapa Indikator Makro Ekonomi
Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2015

Indikator	Proyeksi	
	2014 (%)	2015 (%)
Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,3 – 6,8	6,5 – 7
Kemiskinan	5 – 8	4 – 8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7 – 8	8 – 9
Laju Pertumbuhan Investasi (Adhb)	14– 16	16- 20
Inflasi	4,5– 5	5 – 6

Sumber: hasil estimasi Bappeda

Secara sektoral proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral
Jawa Barat Tahun 2014 dan 2015

No	Pertumbuhan Sektor Ekonomi	2014 (%)	2015 (%)
1	pertanian	2,67 - 3,67	2,79 - 3,79
2	Pertambangan dan Penggalian	1,90 - 2,90	2,53 - 3,53
3	Industri Pengolahan	4,16 - 5,16	4,15 - 5,15
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	4,42 - 5,42	4,43 - 5,43
5	Bangunan/konstruksi	14,59- 15,59	15,41- 16,41
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,86- 11,86	11,55- 12,55
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11,56- 12,56	12,10- 13,10
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8,19 - 9,19	8,38 - 9,38
9	Jasa - jasa	4,10 - 5,10	3,92 - 4,92
10	PDRB	6,8 - 7,20	6,6 - 7,60

Sumber: Hasil Estimasi Tim Ekonomi Bappeda Jabar

Krisis ekonomi di Amerika dan Eropa diperkirakan akan berpengaruh terhadap perekonomian Jawa Barat sehingga Jawa Barat harus mengantisipasi dan menyiapkan diri terhadap berbagai dampak dari krisis tersebut. Perlambatan laju pertumbuhan ekspor diprediksikan akan terjadi pada perekonomian nasional dan cukup berimbas pada perekonomian Jawa Barat, mengingat Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang paling dominan dalam melakukan kegiatan ekspor. Kawasan Eropa dan Amerika merupakan pasar utama ekspor produk-produk Jawa Barat, menurunnya daya beli masyarakat Eropa dan Amerika secara otomatis menurunkan permintaan ekspor mereka, sehingga dapat menyebabkan perlambatan laju pertumbuhan ekspor produk-produk Jawa Barat.

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian global diatas, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diprediksikan akan tumbuh pada kisaran sebesar 6,5 - 7,0% untuk tahun 2013 dan 6,8 - 7,2% pada tahun 2014 dan dengan inflasi berada pada kisaran 4.5-5%. Hal ini diasumsikan apabila kondisi pemulihan ekonomi global

menunjukkan tanda-tanda positif dan akselerasi pemulihan dapat dipercepat.

Untuk mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, maka:

- Kinerja sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat harus dapat dipertahankan didorong untuk lebih produktif.
- Pertumbuhan investasi dan perdagangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan naik, disamping tren penurunan laju inflasi dan suku bunga yang dapat memicu laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat harus bisa dipertahankan.
- Jawa Barat harus mampu memanfaatkan momentum beralihnya fokus investor ke negara-negara Asia dan dapat menyerap aliran modal menyusul krisis yang melanda kawasan Eropa dan Amerika. Beberapa kawasan dengan daya dukung infrastruktur yang memadai masih akan menjadi tujuan utama arus modal. Serapan investasi ke Provinsi Jawa Barat berpeluang lebih besar jika daya dukung infrastruktur diperkuat.
- Intensitas implementasi tematik sektoral dan kewilayahan harus ditingkatkan.
- Pengawasan pengelolaan perkembangan tiga metropolitan dan dua pusat pertumbuhan.
- Meningkatkan kualitas komunikasi dengan kabupaten/kota untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi.

Prediksi pertumbuhan ekonomi makro Provinsi Jawa Barat yang mencapai lebih dari 6% bukan merupakan suatu hal yang mustahil apabila potensi-potensi yang dimiliki Jawa Barat dapat dioptimalkan dan disertai dengan tata kelola ekonomi yang baik, untuk mempercepat pembangunan dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pencapaian ke arah prediksi ekonomi makro yang optimis, tentunya menjadi tantangan ke

depan yang harus disikapi oleh pemerintah daerah dengan cara melakukan terobosan-terobosan/inovasi-inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah, misalnya dengan cara pendekatan pembangunan industri wilayah untuk mencapai daya saing daerah melalui pencapaian skala ekonomis.

Bila dilihat dari kontribusinya, perekonomian Jawa Barat masih ditopang oleh sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR). Pada periode tahun 2012 sampai tahun 2014, Sektor Industri Pengolahan diprediksikan akan memiliki kontribusi sekitar 40,62% pada tahun 2013, dan 39,71% tahun 2014. Sedangkan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran diprediksikan akan menyumbang sekitar 23,74% untuk tahun 2013, dan 24,69% pada tahun 2014 dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Sektor pertanian diperkirakan akan masih tetap dapat memberikan kontribusi di atas 10% sebagai dampak dari beroperasinya Waduk Jatigede pada awal tahun 2014.

Tabel 3.10.

Proyeksi Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2015
Menurut Lapangan Usaha (ADH Konstan 2000)*

Sektor	2014(%)	2015(%)
1. Pertanian	10,96	10,54
2. Pertambangan & penggalian	1,66	1,58
3. Industri pengolahan	39,71	38,68
4. Listrik, gas, dan air minum	2,06	2,01
5. Konstruksi	4,83	5,21
6. Perdagangan, hotel & restoran	24,69	25,74
7. Pengangkutan & komunikasi	5,88	6,16
8. Keuangan, real estate & jasa perusahaan	3,68	3,73
9. Jasa-jasa	6,53	6,35
PDRB	100.00	100.00

Sumber: Hasil Estimasi Bappeda

Dari sisi tingkat kemiskinan, diprediksikan angka kemiskinan secara gradual akan menurun. Pada tahun 2013, tingkat kemiskinan di Jawa Barat diperkirakan akan berada pada

kisaran 5,39% – 9,07%, dan tahun 2014 sekitar 5% – 9%. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada tahun 2013 tingkat Pengangguran Terbuka akan berada kisaran 8% - 9%, dan tahun 2014 sekitar 9% - 10%.

Untuk menjamin agar proyeksi tersebut dapat terealisasi, tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah Jawa Barat adalah menjamin terciptanya kesempatan kerja yang signifikan, terutama untuk sektor-sektor yang bersifat padat karya, mendorong program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat (terutama di perdesaan) yang efektif, memperbaiki program-program pengentasan kemiskinan diantaranya memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar (seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi dan sebagainya) serta upaya penciptaan program pembangunan yang inklusif, yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat.

Tantangan lain dari perekonomian Jawa Barat ke depan selain kondisi pemulihan ekonomi global yang penuh ketidakpastian adalah permasalahan yang terkait dengan isu perubahan iklim (*climate change*). Isu ini akan sangat terkait erat dengan permasalahan ketahanan pangan. Kecenderungan meningkatnya harga komoditas pangan dunia sejak tahun 2000-an, mengindikasikan bahwa dampak perubahan iklim sudah mulai terasa, dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi skenario pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Namun target beroperasinya Waduk Jatigede awal tahun 2014 memberikan harapan adanya peningkatan produksi sektor pertanian secara signifikan sehingga diproyeksikan sektor tersebut dapat tetap tumbuh sesuai kapasitasnya.

Selain tantangan tersebut di atas ada beberapa tantangan lain yang terkait dengan perekonomian Jawa Barat ke depan antara lain:

1. Adanya ketimpangan yang cukup besar pada PDRB antar kabupaten/kota di Jawa Barat.
2. Proporsi angka kemiskinan dan pengangguran walaupun ada kecenderungan menurun tetapi pada beberapa tahun kedepan diperkirakan masih relatif besar, sehingga program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja harus masih menjadi prioritas
3. Target Indeks daya beli masyarakat Jawa Barat tahun 2013 sebesar 64,83 dengan PPP sebesar Rp 640.550, perlu adanya upaya-upaya yang kongkrit untuk mencapai target tersebut.
4. Dengan tantangan perubahan iklim dan out break hama penyakit, dikawatirkan produksi pangan Jawa Barat akan mengalami penurunan pada beberapa tahun ke depan. Perlu adanya upaya peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi.
5. Kelangkaan energi pada beberapa tahun mendatang diperkirakan akan semakin terasa, sehingga untuk antisipasinya perlu ada upaya peningkatan eksplorasi dan pengembangan sumber energi alternatif.
6. Terjadi penurunan daya saing beberapa produk andalan Jawa Barat di pasar Global seperti tekstil dan lain-lain, perlu ada upaya-upaya peningkatan daya saing produk Jawa Barat.
7. Dibidang teknologi, peran Perguruan Tinggi dan lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan masih relatif rendah, sehingga perlu adanya upaya peningkatan peran Perguruan Tinggi dan lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan Jawa Barat.
8. Tuntutan upah minimum kerja semakin mencuat di beberapa daerah industry.
9. Penciptaan keterkaitan industri pengolahandengan sumberdaya lokal.

10. Penciptaan keterkaitan pembangunan perkotaan dan perdesaan.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Jawa Barat mempunyai potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang dapat dianggap sebagai prospek dalam menghadapi tantangan tersebut.

Tabel 3.11.
Prospek Perekonomian Jawa Barat

No	Bidang/fenomena	Uraian
INTERNAL		
1	Pertanian/pangan	Jawa Barat memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dengan jumlah petani yang cukup banyak, serta komoditas yang cukup beragam ditunjang keberadaan Waduk Jatigede
2	Industri	Jawa Barat memiliki industri yang banyak baik skala besar, menengah, kecil dan mikro.
3	Energi	Jawa Barat memiliki sumberdaya alam sumber energi alternatif yang cukup banyak, baik dari bahan tambang maupun komoditas pertanian
4	Teknologi	Jawa Barat memiliki Perguruan tinggi ternama dan lembaga litbang departemen maupun non departemen yang cukup banyak.
EKSTERNAL		
1	Kelangkaan pangan di tingkat global dan nasional	Merupakan peluang bagi pertanian Jawa Barat dalam pemasaran produk pertanian dan olahannya
2	Pergeseran kekuatan ekonomi ke asia	<ul style="list-style-type: none"> Jawa Barat sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia mempunyai peluang dalam peningkatan sector industri Pada tanggal 14 Januari 2010 Atase Perekonomian China (mewakili Pusat Perdagangan Luar Negeri China) melakukan pertemuan bisnis dengan Kamar Dagang dan Industri Jabar. China merencanakan akan membuka pabrik tekstil di Jawa Barat sebagai bentuk investasi China di bidang manufaktur di Indonesia.
3	Kesiapan Jawa Barat menghadapi Asean Community pada tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> Jawa Barat memiliki penduduk dan tenaga kerja yang banyak, harus dipersiapkan peningkatan daya saingnya (skill,dll), supaya berkontribusi dominan terhadap

No	Bidang/fenomena	Uraian
INTERNAL		
		<p>lapangan kerja pada lingkup Asean Community.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Jabar mengembara pada tahun 2013 harus mampu mempersiapkan tenaga Jawa Barat dalam kancah Asean Community tahun 2015. • Jika tenaga kerja Jawa Barat berdaya saing tinggi, maka Asean Community merupakan prospek/pejuang dalam mengurangi pengangguran, tetapi jika tenaga kerja Jawa Barat berdaya saing rendah, maka lapangan kerja Jawa Barat akan diisi oleh Negara lain sehingga mendorong pengangguran.
4	MP3EI	<ul style="list-style-type: none"> • Jika MP3EI dapat terealisasi dengan baik, perlu ditindak lanjuti dengan kebijakan Jawa Barat dalam penciptaan iklim usaha yang lebih baik, diharapkan akan meningkatkan kinerja industri Jawa Barat

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta tantangan dan prospek perekonomian Jawa Barat kedepan, maka pada tahun 2014 diperlukan kerangka perekonomian Jawa Barat sebagai berikut :

1. Perlu mendorong laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang relatif rendah dengan memacu sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut.
2. Pengendalian jumlah penduduk, penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan daya beli masih tetap menjadi prioritas pada pembangunan Jawa Barat tahun 2014.
3. Regulasi perizinan yang probisnis (perizinan kondusif) dan membenahi permasalahan yang menghambat laju investasi dan daya saing produk.
4. Peningkatan penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah dan ekonomi kreatif
5. Peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil,

fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan).

6. Peningkatan Eksplorasi dan pengembangan sumber energi alternatif.
7. Peningkatan peran swasta, yang salah satunya peningkatan peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (peningkatan pendanaan kontribusi dana TJSJ dan peningkatan sinergitas pembangunan).
8. Melalui Program Jabar Mengembara, tahun 2014 harus diarahkan kepada peningkatan daya saing tenaga kerja Jawa Barat untuk menyambut diberlakukannya *Asean Community* tahun 2015 (untuk memanfaatkan potensi jumlah tenaga kerja Jawa Barat dan peluang pasar tenaga kerja dan usaha).

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara

profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Dana Penyesuaian dan Otsus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Berdasarkan data kurun waktu 2011-2013 dan target 2014, penerimaan pendapatan daerah berfluktuasi. Secara persentase maupun nominal hanya kelompok komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami kenaikan, sedangkan kelompok Dana Perimbangan menunjukkan kecenderungan penurunan baik secara persentase maupun nominal.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat "*limitative*". Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen Dana Bagi Hasil Pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota dan menurunnya besaran Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) karena berkurangnya produksi sumur minyak di Jawa Barat, sementara untuk sumur minyak baru masih dalam tahap eksplorasi, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam panas bumi di Jawa Barat. Sedangkan komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih memperlihatkan kecenderungan peningkatan.

Realisasi dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2010-2014, tercantum pada tabel 3.12. berikut :

Tabel 3.12.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi		Target RKPD	Target APBD	Target RKPD
		Tahun 2011 ¹⁾	Tahun 2012 ²⁾	Tahun 2013 ³⁾	Tahun 2013 ⁴⁾	Tahun 2014 ⁵⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN	11.053.783.272.262,30	16.894.184.518.260,00	11.948.593.777.069,00	16.651.601.834.434,20	13.274.592.666.480,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	8.502.566.839.986,35	9.998.972.938.028,00	9.747.325.240.600,00	9.882.025.240.600,20	11.041.073.153.474,00
1.1.1.	Pajak Daerah	7.696.499.875.463,00	9.149.214.329.501,00	9.142.139.000.000,00	9.142.139.000.000,00	10.259.432.345.166,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	50.737.863.167,00	57.326.323.969,00	57.068.946.985,00	57.327.135.485,00	66.713.477.616,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	229.147.336.153,00	232.647.377.086,00	263.297.782.000,00	240.148.000.000,00	260.198.225.926,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	526.181.765.203,35	559.784.907.472,00	284.819.511.615,00	442.411.105.115,20	454.729.104.766,00
1.2.	Dana Perimbangan	2.526.078.026.559,00	2.832.746.608.832,00	2.185.977.087.706,00	2.583.041.104.821,00	2.233.519.513.006,00
1.2.1.	Dana Bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	1.298.760.318.559,00	1.514.429.568.832,00	916.016.327.706,00	1.030.516.043.821,00	761.066.502.006,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.181.553.108.000,00	1.269.960.760.000,00	1.269.960.760.000,00	1.472.453.011.000,00	1.472.453.011.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	45.764.600.000,00	48.356.280.000,00		80.072.050.000,00	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	25.138.405.717,00	4.062.464.971.400,00	15.291.448.763,00	4.186.535.489.013,00	-
1.3.1.	Hibah	-	16.412.023.900,00		19.462.079.013,00	
1.3.2.	Dana Darurat	-				
1.3.3.	Dana Bagi hasil Pajak dari Prov. dan Pemda Lainnya					
1.3.4.	Dana Peny. dan Otonomi khusus	-	4.030.512.199.500,00		4.167.073.410.000,00	
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Prov/kab/kota/lainnya	14.400.134.000,00		15.291.448.763,00		
1.3.6.	Lain-lain Penerimaan	2.584.199.717,00				
1.3.7.	Dana Transfer Pusat	8.154.072.000,00				
1.3.8.	Dana Insentif Daerah (DID) TA. 2012	-	15.540.748.000,00			

Keterangan :

¹⁾Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011

²⁾Realisasi APBD TA. 2012 (unaudited BPK), bila dibandingkan dengan tahun 2011 terdapat kenaikan yang tinggi dikarenakan adanya transfer Dana Penyesuaian Otonomi Khusus (dana BOS dari Pemerintah) yang terrealisasi sebesar 4.030.512.199.500 dari target sebesar Rp 4.184.947.230.000

³⁾Target pada RKPD 2013 belum mencantumkan transfer dana BOS dari pemerintah (Dana Penyesuaian Otonomi Khusus)

⁴⁾Perda APBD TA. 2013 dengan mencantumkan transfer Dana Penyesuaian Otonomi Khusus (dana BOS dari Pemerintah) sebesar 4.167.073.410.000

⁵⁾Hasil Pengolahan Data untuk Proyeksi Tahun 2014 (angka masih sangat sementara) belum mencantumkan transfer dana BOS dari pemerintah (Dana Penyesuaian Otonomi Khusus)

Bila memperhatikan kecenderungan realisasi dan target pendapatan daerah kurun waktu 2011-2013 terlihat bahwa terdapat peningkatan yang bervariasi. Capaian dan target pendapatan selama kurun waktu 2011 sampai 2013 didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah yang cukup baik. Namun demikian, mengingat peningkatan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, perlu ada upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih intensif dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih aktif, diharapkan pada Tahun 2014 pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Untuk Tahun 2014, target pendapatan daerah diproyeksikan meningkat bila dibandingkan target tahun 2013. Besarnya target pendapatan daerah Tahun 2014 ini disebabkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak yang mengalami kenaikan tarif. Berkaitan dengan komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperkirakan meningkat dikarenakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Tahun 2014 daerah akan mendapat penerimaan dari Pajak Rokok. Penerimaan Pajak Rokok yang dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pada komponen Dana Perimbangan jenis pendapatan Dana Bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak diproyeksikan sama dengan Tahun 2013 tetapi angkanya ada penurunan dikarenakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Tahun 2014 provinsi tidak lagi mendapat Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan harus dialihkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, dan POLRI;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah tersebut di atas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui :
1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
 2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 4. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui drive thru, Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, dan pengembangan Samsat Outlet;
 5. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama/Samsat lainnya dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008;
 6. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 7. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
 8. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 9. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
 10. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta

mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.

b. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui :

1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
3. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
4. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja, yaitu : Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, dan Belanja Modal.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2014 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Belanja daerah secara nominal, untuk semua jenis belanja mengalami kenaikan kecuali Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial. Pada Belanja Tidak Langsung, terlihat bahwa Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, sedangkan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi mengalami penurunan. Sementara itu, Belanja Langsung untuk semua komponen mengalami kenaikan yang bervariasi. Dalam kurun waktu Tahun 2011-2012 (realisasi) dan target Tahun 2013, komposisi rata-rata Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah 70% dan 30%. Sedangkan untuk target Tahun 2014 komposisinya diproyeksikan sekitar 60% dan 40%.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan Belanja Pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh Daerah), ruang fiskal daerah Jawa Barat menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat bahwa pada Tahun 2012, total realisasi penerimaan (*unaudited* BPK) sebesar Rp 19,897 Trilyun lebih, setelah dikurangi dengan belanja prioritas utama (Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan, Belanja Bagi Hasil, belanja rutin

kantor/*fixed cost*, Belanja untuk BOS dari Pemerintah, serta Dana Cadangan Daerah dan pembayaran utang pada pembiayaan) tersisa Rp 10,628 Trilyun lebih yang merupakan kapasitas riil kemampuan keuangan (dana yang dapat digunakan untuk mendanai program pembangunan yang direncanakan). Pada target APBD Tahun 2013 kapasitas riil keuangan daerah sebesar Rp 7,999 Trilyun lebih atau mengalami penurunan sebesar 24,74% apabila dibandingkan dengan kapasitas riil tahun 2012. Sedangkan untuk proyeksi pendanaan pembangunan Tahun 2014 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 13,274 Trilyun lebih, dengan kapasitas riil keuangan daerah mencapai sebesar Rp 7,178. Trilyun lebih.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2014 tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM 80 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, diproyeksikan pencapaian IPM 80 tercapai pada Tahun 2021-2022. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM 80 diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan belanja daerah Tahun 2014 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Pendanaan kegiatan *Common Goals* Tematik Sektor dan Tematik Kewilayahan.
2. Pendanaan untuk pencapaian IPM merujuk kepada RPJP 2005-2025 dan ketentuan PP No. 6 Tahun 2008.
3. Pendukung percepatan Pembangunan Nasional (INPRES No 1/2010) dan Program Pembangunan yang Berkeadilan (INPRES No.3/2010).
4. Pendanaan kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program).
5. Pendanaan kegiatan yang bersifat terobosan (program baru).
6. Pendanaan kegiatan yang mampu mengungkit *performance* Jawa Barat secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Jawa Barat.
7. Pengalokasian anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, yaitu: belanja bagi hasil, belanja pegawai, belanja untuk operasional kantor (belanja administrasi perkantoran dan pelayanan dasar), dan dukungan program Prioritas Nasional (antara lain: dana pendamping DAK dan PNPM).

8. Pengalokasian anggaran untuk belanja yang persentasenya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan:
 - a. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja, dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan.
 - b. Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan, secara bertahap 10% dari total belanja di luar gaji, dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan.
 - c. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur (pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum) minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan Pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
9. Pengalokasian anggaran untuk belanja pemenuhan urusan (26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan), dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai tugas dan fungsi OPD/Biro.
10. Pengalokasian anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian diupayakan sebesar 10%, dalam rangka peningkatan Indeks Daya Beli.
11. Pengalokasian anggaran yang diarahkan (*earmarked*), yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan dana BOS Pemerintah.
12. Pengalokasian anggaran bagi pemenuhan janji kampanye Gubernur terpilih.

Kebijakan belanja difokuskan pada peningkatan elektrifikasi Rumah Tangga, peningkatan kondisi jaringan irigasi perdesaan (saluran tersier), peningkatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Metropolitan Bandung, Penanganan Jalan Provinsi, Penanganan Gerakan rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK), Pendukung Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Dukungan penyediaan transportasi untuk pekerja di Kawasan Industri, penanganan non struktural (Konservasi) Wilayah Sungai Citarum, pendukung penyelenggaraan pendidikan, pendukung penyelenggaraan kesehatan, pendukung kebudayaan, dukungan penyelenggaraan Perprov 2014, dukungan penyelenggaraan PON 2016, pemenuhan kebutuhan produksi daging sapi

local, promosi investasi, penanganan perkebunan, pendukungan Kredit Cinta Rakyat, Pendukungan Desa Membangun, Pendukungan Revitalisasi Posyandu, pendukungan perikanan dan kelautan, pendukungan kepariwisataan dan kerjasama penelitian kreatif untuk solusi pembangunan Jabar.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, maka arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2014 dituangkan dalam Tabel 3.13.

Tabel 3.13.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2011-2014

URAIAN	Jumlah				
	Realisasi		Target RKPD Tahun 2013 ³⁾	Target APBD Tahun 2013 ⁴⁾	Target RKPD Tahun 2014 ⁵⁾
	Tahun 2011 ¹⁾	Tahun 2012 ²⁾			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.606.803.150.551	12.410.127.669.229	9.665.592.982.391	13.841.422.992.558	7.814.755.599.888
Belanja Pegawai	1.442.207.852.499	1.511.158.103.267	1.667.230.654.391	1.673.209.654.391	1.715.039.895.751
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	8.962.779.750	15.054.980	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Belanja Hibah	814.847.122.706	6.153.069.367.619	1.148.265.845.000	5.350.065.225.090	812.084.171.402
Belanja Bantuan Sosial	491.978.475.146	16.685.225.000	20.000.000.000	25.500.000.000	20.000.000.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.720.212.920.651	3.161.224.936.674	3.205.445.313.000	3.205.445.313.000	3.680.978.194.118
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	2.127.593.999.799	2.815.456.802.229	3.232.051.170.000	3.144.915.502.324	1.526.653.338.617
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	6.856.332.700	382.600.000.000	432.287.297.753	50.000.000.000
BELANJA LANGSUNG	2.690.187.634.956	3.273.136.118.547	3.900.768.960.000	3.675.229.428.406	5.309.837.066.592
Belanja Pegawai	319.187.717.304	404.850.566.619		429.186.183.282	
Belanja Barang Dan Jasa	1.652.349.082.844	1.733.317.814.581		2.052.788.507.147	
Belanja Modal	718.650.834.808	1.134.967.737.347		1.193.254.737.977	
JUMLAH BELANJA	10.296.990.785.507	16.937.601.941.016	13.566.361.942.391	17.516.652.420.964	13.124.592.666.480

Keterangan : :

¹⁾Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011

²⁾Realisasi APBD TA. 2012 (unaudited BPK), bila dibandingkan dengan tahun 2011 terdapat kenaikan yang tinggi dikarenakan dalam Belanja Hibah terdapat dana BOS dari Pemerintah yang terrealisasi sebesar 4.030.512.199.500 dari target sebesar Rp 4.184.947.230.000

³⁾Target pada RKPD 2013, belum mencantumkan besaran transfer dana BOS dari pemerintah pada Belanja Hibah

⁴⁾Perda APBD TA. 2013, dengan mencantumkan besaran transfer dana BOS dari Pemerintah sebesar Rp 4.184.947.230.000

⁵⁾Hasil Pengolahan Data untuk Proyeksi Tahun 2014 dan belum mencantumkan transfer dana BOS dari pemerintah yang diposting pada Belanja Hibah (angka masih sangat sementara)

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan SILPA tahun berjalan.

Untuk Tahun 2014, penerimaan pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari SILPA tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal dan penguatan Lembaga Penjaminan Kredit.

Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, terus dilakukan langkah-langkah penguatan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebijakan obligasi daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll;
4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian;
5. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan Obligasi Daerah.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel 3.14. sebagai berikut :

Tabel 3.14.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2011 - 2014

URAIAN	Jumlah				
	Realisasi		Target RKPD Tahun 2013 ³⁾	Target APBD Tahun 2013 ⁴⁾	Target RKPD Tahun 2014 ⁵⁾
	Tahun 2011 ¹⁾	Tahun 2012 ²⁾			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.449.742.871.994	3.003.186.558.749	-	989.950.586.530	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	2.449.742.871.994	3.003.186.558.749	-	989.950.586.530	
Pencairan Dana Cadangan	-		-	-	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-		-	-	
Penerimaan Pinjaman Daerah	-		-	-	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-		-	-	
Penerimaan Piutang Daerah	-		-	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	203.348.800.000	42.531.200.000	200.000.000.000	124.900.000.000	150.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	
Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah	38.348.800.000	42.531.200.000	100.000.000.000	74.900.000.000	
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	-	-	-	-	
Dana Bergulir	165.000.000.000	-	100.000.000.000	50.000.000.000	150.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	2.246.394.071.994	2.960.655.358.749	(200.000.000.000)	865.050.586.530	(150.000.000.000)

Keterangan : :

¹⁾Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011

²⁾Realisasi APBD TA. 2012 (unaudited BPK)

³⁾Target pada RKPD 2013, belum mencantumkan besaran SiLPA karena belum dapat dihitung

⁴⁾Perda APBD TA. 2013, dengan mencantumkan SiLPA

⁵⁾Hasil Pengolahan Data untuk Proyeksi Tahun 2014 dan belum mencantumkan besaran SiLPA (angka masih sangat sementara)

3.3. Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sumber pendanaan daerah selain APBD, juga dari Pemerintah Pusat (APBN) berupa : Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang pengalokasiannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat serta dana yang bersumber dari swasta, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

3.3.1. APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berupa dana APBN Dekonsentrasi yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada OPD Provinsi dan dana APBN Tugas Pembantuan, yang dikelola oleh OPD di Kabupaten/Kota maupun oleh OPD Provinsi.

Besarnya alokasi APBN yang masuk ke Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Perkembangan alokasi APBN di Jawa Barat selama kurun waktu 5 (Lima) tahun (2009 s.d 2013) dapat dilihat pada tabel 3.15.

Tabel 3.15.
Jumlah Dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2013

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Jenis APBN	Pagu Dana				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Dekonsentrasi	5.110.493.386,00	4.680.570.911,00	1.449.149.555,00	2.144.591.151,00	1.057.619.548.000
2	Tugas Pembantuan	529.413.332,00	1.151.888.199,00	703.128.287,00	1.056.663.102,00	864.220.603
Jumlah		5.832.459.110,00	5.639.906.718,00	2.152.277.842,00	3.201.254.253,00	1.921.840.151.000

Sumber : DIPA APBN Ditjen Perbendaharaan Kanwil XII Bandung 2009-2013

Distribusi alokasi dana APBN berupa Dana Dekonsentrasi yang masuk ke Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16.
Alokasi Dana Dekonsentrasi berdasarkan OPD di Provinsi Jawa Barat

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	OPD	Pagu Dana				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Biro PUM Setda	636.060,00	45.357.439,00	2.327.498,00	8.669.000,00	5.768.545.000
2	Bappeda	653.125,00	500.000,00	367.755,00	1.025.000,00	3.103.290.000
3	BPMPD	42.969.226,00	54.698.842,00	26.611.360,00	69.848.391,00	73.791.998.000
4	Diskominfo	43.850,00	-	-		
5	Bandiklatda	228.400,00	240.000,00	139.000,00	241.500,00	241.500.000
6	Bakesbangpol	300.000,00	167.830,00			1.419.645.000
7	Dinas Pendidikan	4.501.927.930,00	4.838.819.535,00	1.218.647.284,00	1.750.435.666,00	688.797.836.000
8	Dinas Kesehatan	8.120.550,00	24.450.247,00	19.869.708,00	29.926.417,00	39.784.318.000
9	Disnakertran	7.082.508,00	14.244.861,00	13.119.613,00	30.369.724,00	14.061.907.000
10	Dinas Sosial	25.210.141,00	22.609.004,00	28.119.570,00		24.766.107.000
11	Dinas Olahraga dan Pemuda	6.250.000,00	8.017.510,00	7.392.332,00	7.700.000,00	9.976.354.000
12	Bapusipda	5.502.070,00	21.204.739,00	11.974.321,00	5.716.635,00	5.434.799.000
13	Dinas Kimrum	1.150.000,00	4.692.785,00	7.191.598,00	9.200.173,00	5.960.000.000
14	Diperindag	5.993.970,00	5.280.176,00	4.363.400,00	8.349.047,00	8.533.706.000
15	Dinas Koperasi dan UKM	7.183.500,00	6.616.317,00	6.616.317,00	11.436.367,00	5.571.507.000
16	Dinas ESDM	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	779.435,000	1.106.676.000
17	Dinas Perikanan	7.729.148,00	8.502.375,00	13.418.675,00	17.651.476,00	16.127.972.000
18	Dinas Pertanian	30.414.437,00	25.812.071,00	51.522.332,00	104.202.908,00	89.211.025.000
19	Dinas Perternakan	5.352.645,00	4.377.550,00	8.543.770,00	14.152.752,00	16.067.766.000
20	Dinas Perkebunan	4.955.298,00	3.948.650,00	2.807.570,00	4.373.980,00	4.707.013.000
21	Badan Ketahanan Pangan	11.322.500,00	14.397.750,00	16.439.982,00	26.114.700,00	24.978.450.000
22	Dinas Kehutanan	6.045.553,00	3.708.705,00	5.099.330,00	5.322.065,00	5.984.545.000
23	BPLHD	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.850.000,00	7.000.000.000
24	Dinas Parbud	-	1.197.000,00	2.778.140,00	2.000.000,00	2.737.500.000
25	BKPPMD	-	150.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000.000
Jumlah		4.680.570.911,00	5.110.493.386,00	1.449.149.555,00	2.144.591.151,00	412.858.214.000

Sumber : DIPA APBN Ditjen Perbendaharaan Kanwil XII Bandung 2009-2013

Distribusi alokasi dana APBN Tugas Pembantuan yang masuk ke Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17.
Alokasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2013

NO	PROVINSI	PAGU DANA				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kota Bandung	933.815,00	2.060.050,00	7.876.397,00	8.287.050,00	97.420.574.000
2	Kota Banjar	6.364.200,00	1.852.990,00	2.997.500,00	1.681.700,00	1.436.478.000
3	Kota Bekasi	505.000,00	2.092.208,00	8.343.650,00	6.464.124,00	2.674.650.000
4	Kota Bogor	1.393.717,00	1.269.050,00	9.530.227,00	4.838.500,00	4.101.030.000
5	Kota Cimahi	156.824,00		675.000,00	1.160.850,00	1.149.150.000
6	Kota Cirebon	1.800.900,00	3.465.891,00	3.720.974,00	2.628.050,00	1.917.300.000
7	Kota Depok	2.298.447,00	300.000,00	4.738.750,00	2.787.600,00	2.758.800.000
8	Kota Sukabumi	-		2.894.358,00	3.907.562,00	2.120.678.000
9	Kota Tasikmalaya	7.361.054,00	1.000.000,00	5.886.425,00	2.877.725,00	2.541.428.000
10	Kab. Bandung	33.690.531,00	36.961.334,00	19.938.513,00	20.893.630,00	19.344.678.000
11	Kab. Bandung Barat	25.722.780,00	4.907.425,00	13.476.475,00	15.897.025,00	12.992.552.000
12	Kab. Bekasi	14.548.735,00	3.826.132,00	12.330.050,00	12.925.226,00	9.805.102.000
13	Kab. Bogor	49.673.423,00	15.086.941,00	23.233.260,00	21.551.450,00	
14	Kab. Ciamis	58.819.059,00	14.256.950,00	18.564.530,00	24.980.325,00	30.908.870.000
15	Kab. Cianjur	75.289.395,00	9.212.105,00	16.637.418,00	35.291.388,00	25.426.276.000
16	Kab. Cirebon	50.072.064,00	15.468.048,00	29.741.065,00	37.777.904,00	29.411.250.000
17	Kab. Garut	117.344.029,00	26.763.685,00	31.014.443,00	38.489.821,00	22.724.007.000
18	Kab. Indramayu	43.221.119,00	9.317.415,00	24.304.005,00	47.978.569,00	30.563.840.000
19	Kab. Karawang	33.528.835,00	17.076.141,00	33.822.753,00	27.135.868,00	16.155.662.000
20	Kab. Kuningan	66.722.804,00	13.283.655,00	19.552.695,00	38.413.887,00	13.527.715.000
21	Kab. Majalengka	52.926.767,00	17.513.635,00	16.574.801,00	18.321.999,00	12.183.650.000
22	Kab. Purwakarta	26.616.635,00	3.090.985,00	9.510.593,00	11.529.175,00	5.136.770.000
23	Kab. Subang	46.487.061,00	15.106.700,00	24.894.139,00	20.802.628,00	11.200.330.000
24	Kab. Sukabumi	100.431.402,00	19.829.505,00	31.370.590,00	51.850.277,00	30.454.044.000
25	Kab. Sumedang	43.264.726,00	61.760.730,00	26.310.985,00	30.777.226,00	18.248.600.000
26	Kab. Tasikmalaya	87.816.715,00	18.847.945,00	19.351.273,00	20.571.670,00	16.721.220.000
27	Provinsi Jawa Barat	204.898.162,00	215.063.812,00	285.837.418,00	546.841.873,00	421.858.214.000
	Jumlah	1.151.888.199,00	529.413.332,00	703.128.287,00	1.056.663.102,00	864.220.603.000

Sumber : DIPA APBN Ditjen Perbendaharaan Kanwil XII Bandung 2009-2013

3.3.2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

A. Kebijakan Fasilitas TJSLP dan PKBL Provinsi Jawa Barat

Kebijakan fasilitas TJSLP/PKBL Jawa Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Program TJSPL/PKBL yang dimiliki oleh dunia usaha dan dunia industri di Provinsi Jawa Barat harus difasilitasi dengan sistematis sehingga memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan daerah, oleh karena itu diperlukan sebuah upaya terstruktur untuk mengembangkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan para pelaku dunia usaha dan dunia industri.

Pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan infrastruktur desa dan kota sebagai aspek pembangunan daerah menjadi salah satu Program TJSPL/PKBL yang dimiliki oleh dunia usaha dan dunia industri di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan inisiasi untuk menjalin kerjasama yang sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri yang ada di Jawa Barat. Upaya sistematis dimaksud telah diwujudkan melalui deklarasi “**Komitmen Bandung**” pada tanggal 14 Januari 2011, untuk pengembangan Program TJSPL dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat, dengan dua misi utama yakni misi kemanusiaan dan lingkungan, melalui kemitraan antara Dunia Usaha (BUMN/Non BUMN) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

B. Realisasi Program TJSPL/PKBL Jawa Barat Tahun 2012

Rincian alokasi anggaran TJSPL/PKBL perusahaan-perusahaan di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 3.18., 3.19., dan 3.20.

Tabel 3.18.
Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJSPL/PKBL Jabar
Sumber Dana Perusahaan BUMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

No.	Nama Perusahaan	Nilai Investasi TJSPL-PKBL
		Tahun 2012 (Rp.)
1	PT. Bank BJB	8.120.908.000
2	Perusahaan Daerah Jasa Dan Kepariwisataaan (PD JAWI)	354.000.000
	Jumlah	8.474.908.000

Sumber : Tim Fasilitasi TJSPL Jawa Barat Tahun 2012

Tabel 3.19.
Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJS LP/PKBL Jabar
Sumber Dana Perusahaan BUMN Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NILAI INVESTASI TJS LP/PKBL TAHUN 2012 (Rp.)
1	PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)	1.885.678.500
2	PT. Pertamina Region JBB	27.646.277.861
3	PT. Perkebunan Nusantara VIII	8.131.113.000
4	PT. Aneka Tambang (ANTAM), Tbk.	5.288.439.285
5	PT. Bank Mandiri	9.800.000.000
6	PT. Bank Negara Indonesia	3.929.000.000
7	PT. Biofarma Persero	11.432.141.020
8	PT. Pembangunan Perumahan	600.000.000
9	PT. Pelabuhan Indonesia II	665.610.000
10	PT. Pupuk Kujang	17.509.329.497
11	PT. Jasa Raharja	636.212.800
12	PT. Asuransi ABRI (ASABRI)	214.640.000
13	PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)	8.551.928.934
14	PT. Sucofindo	831.000.000
Jumlah		97.121.370.897

Sumber : Tim Fasilitasi TJS LP/PKBL Jawa Barat Tahun 2012

Tabel 3.20.
Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJS LP/PKBL Jabar
Sumber Dana PMDN/PMA Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NILAI INVESTASI TJS LP/PKBL TAHUN 2011 (Rp.)
1	PT. Jababeka, Tbk.	5.856.252.000
2	PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk.	10.433.439.997
3	PT. Star Energy Geothermal (Wayang Windu), Ltd.	5.135.000.000
4	PT. Chevron Geothermal Indonesia, Ltd.	7.880.460.000
5	PT. MM 2100	3.325.100.000
6	PT. Karawang International Industrial City (KIIC)	413.059.100
7	PT. Telkomsel	267.900.000
8	PT. Alfamart	2.000.000.000
9	PT. HU. Pikiran Rakyat Bandung	697.400.000
10	PT. Prasada Pamunah Limbah Industri (PPLI/WMI)	300.000.000
11	PT. Sinkona Indonesia Lestari	39.175.000
12	PT. Putra Sampoerna Foundation	-
13	PT. Carrefour Indonesia	750.000.000
14	PT. Tirta Investama / Danone Aqua	5.800.000.000
Jumlah		42.897.786.097

Sumber : Tim Fasilitasi TJS LP/PKBL Jawa Barat Tahun 2012

Rencana Program dan Kegiatan Fasilitasi TJS LP/PKBL Jabar Tahun 2014, tetap akan melanjutkan pengembangan misi TJS LP/PKBL Jabar : untuk kemanusiaan dan lingkungan, dengan prioritas program yang akan ditawarkan kepada dunia usaha : pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastuktur dan lingkungan serta budaya.

3.3.3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

Pinjaman/Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Sumber PHLN adalah Negara Asing, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan dan Lembaga non Keuangan Asing. Jenis PHLN meliputi pinjaman lunak, Fasilitas Kredit Ekspor, Pinjaman Komersial dan pinjaman campuran.

PHLN pengelolaannya diserahkan dan dikelola sepenuhnya oleh Badan/Lembaga Keuangan Non Pemerintah terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Adapun sumber pendanaan pembangunan PHLN di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 3.21.

Tabel 3.21.
Rekap DIPA Tahun 2012 Provinsi Jawa Barat

No.	Kategori DIPA (Rp.)	Pagu
1	Kantor Pusat	1.081.736.246.000
2	Kantor Daerah	473.897.891.000
3	Dekonsentrasi	89.060.369.000
4	Tugas Pembantuan	92.200.909.000
5	Urusan Bersama	18.742.795.000
Jumlah		1.758.527.210.000

Sumber : Kanwil XII Itjen Perbendaharaan Bandung

Jumlah alokasi PHLN yang masuk ke Jawa Barat pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.22.

Tabel 3.22.
Alokasi Dana PHLN berdasarkan Kementerian
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA (Rp.)	BESARAN ANGGARAN (Rp.)
1	DALAM NEGERI	101,296,523,000.00
2	PERTANIAN	54,245,832,000.00
3	ENERGI DAN SDM	715,896,000.00
4	PERHUBUNGAN	141,483,000,000.00
5	PENDIDIKAN NASIONAL	109,996,174,000.00
6	KESEHATAN	21,124,207,000.00
7	AGAMA	201,526,385,000.00
8	KEHUTANAN	16,491,040,000.00

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA (Rp.)	BESARAN ANGGARAN (Rp.)
9	KELAUTAN DAN PERIKANAN	16,241,870,000.00
10	PEKERJAAN UMUM	721,003,815,000.00
11	LIPI	149,347,468,000.00
12	BAKOSURTANAL	225,055,000,000.00
Jumlah		1,758,527,210,000.00

Sumber : Kanwil XII Itjen Perbendaharaan Bandung

Dari Tabel 3.22 diatas dapat terlihat bahwa Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh alokasi pendanaan PHLN terbesar yaitu sebesar Rp. 721 Milyar apabila dibandingkan dengan alokasi kementerian lembaga lainnya. Sedangkan kementerian yang memperoleh alokasi pendanaan PHLN terkecil yaitu Kementerian Energi dan ESDM sebesar Rp. 715 Juta.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan kerangka kebijakan pembangunan jangka menengah transisi yang telah ditetapkan, maka kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat, harus tetap memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap kerangka kebijakan pembangunan jangka menengah transisi. Pembangunan Tahun 2014, diarahkan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan strategis yang telah dimulai perencanaan dan pelaksanaannya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 namun belum berhasil untuk diwujudkan karena adanya kendala teknis maupun kendala non teknis, sehingga memerlukan reorientasi pelaksanaan pembangunan untuk menjamin keberhasilan pembangunan (*beyond the expectation*) serta reposisi pembangunan dengan harapan mendudukan kembali peran Pemerintah Provinsi melalui upaya penyelesaian permasalahan strategis Provinsi yang sifatnya lintas kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal (SPM) Provinsi, serta mengkombinasikan pendekatan pembangunan yang berbasis daerah otonom, pendekatan sektoral dan kewilayahan dengan kegiatan nasional yang berfungsi sebagai penghelai pembangunan.

Selain hal tersebut, dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi diharuskan untuk Bermitra Strategis Global sebagai upaya memperkuat jaringan/networking global guna meningkatkan daya tarik investasi dan daya saing daerah. Implikasi dari skenario rencana pembangunan diatas, serta perkembangan pembangunan saat ini, tema pembangunan tahunan daerah Jawa Barat tahun 2014, yaitu:

***Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien
Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat Tinggi
Berbasis Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk
Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera***

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2014 memiliki 5 sasaran utama, yaitu : (a) peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat, pelayanan kesehatan bagi semua, kemandirian masyarakat dan pengokohan ketahanan keluarga; (b) memperkuat pembangunan ekonomi perdesaan dan regional, peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi, penguatan UMKM dan daya saing usaha; (c) modernisasi pemerintahan dan peningkatan partisipasi publik; (d) peningkatan kualitas infrastruktur strategis Jawa Barat dan mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan melalui pembangunan yang berkelanjutan; (e) mengembangkan seni, budaya, dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal serta memperkuat peran pemuda dan olahraga. Prioritas pembangunan Jawa Barat dirumuskan kedalam 10 (sepuluh) *Common Goals* sebagai *platform* sinergi pusat (Kementerian/Lembaga), daerah dan pemangku kepentingan pembangunan. Untuk penyempurnaan proses perencanaan pembangunan Jawa Barat Tahun 2014 terpilih 5 inovasi baru yaitu : (a) pelibatan komunitas berbasis masyarakat dengan prinsip

penguatan aktor lokal (*strengthening local actor*); (b) integrasi hasil-hasil pembangunan tahunan kabupaten/kota bantuan provinsi dengan prinsip penguatan peran penanggungjawab sektor pembangunan; (c) penerapan manajemen pemerintahan model hibrida sebagai penghela percepatan pembangunan yaitu mengkombinasikan antara manajemen berbasis daerah otonom kabupaten/kota dan manajemen lintas kabupaten/kota berbasis metropolitan dan pusat pertumbuhan; (d) Integrasi komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sektor dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Multi Pihak-Implementasi Pekerjaan (RAM-IP); dan (e) peningkatan akses multi pihak dalam proses perencanaan pembangunan melalui RKPDJabar_Online 2101, KM-0_Pro Poor, SMS_Jabarmembangun, SMS_Satudatajabar.

Perumusan perencanaan program dan kegiatan prioritas dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan mengikuti kaidah-kaidah prinsip *SMART PLANNING* (Perda No. 6/2009 tentang SISRENBANGDA), yaitu: spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*).

4.1. Prioritas Pembangunan Daerah

4.1.1 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, yaitu:

- 1) Aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kepemudaan serta kualitas kesehatan,
- 2) Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Tahun 2014 dan Pekan Olahraga Nasional Tahun 2016 serta sarana prasarana olahraga kabupaten/kota,
- 3) Pertumbuhan penduduk dan persebarannya,
- 4) Pengangguran, ketenagakerjaan dan kemiskinan,
- 5) Perekonomian, daya beli masyarakat dan Ketahanan Pangan,
- 6) Kualitas demokrasi dan Pemilu nasional tahun 2014,
- 7) Efektivitas tata kelola pemerintahan daerah,
- 8) Penanganan ketertiban, Ketentraman Masyarakat,
- 9) Perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM),
- 10) Pengelolaan aset daerah,
- 11) Penegakan dan harmonisasi produk hukum,
- 12) Cakupan pelayanan infrastruktur dan permukiman ,
- 13) Ketahanan energi dan kualitas air baku,
- 14) Lahan kritis dan kualitas lingkungan hidup,
- 15) Bencana alam dan perubahan iklim,
- 16) Pemerintahan Desa dan infrastruktur perdesaan,
- 17) Pelestarian budaya, sarana seni dan budaya, serta destinasi wisata.

Berdasarkan isu strategis tersebut, konstruksi misi pembangunan Jawa Barat Tahun 2014 ke depan membangun sumber daya manusia berlandaskan kearifan lokal; membangun perekonomian yang kokoh dengan jejaring kerjasama internasional; membangun tatanan sosial masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing serta ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, handal, dan modern melalui aliansi strategis multi pihak. Selanjutnya dirumuskan beberapa kebijakan strategis: a) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing, b) Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan, c) Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme, tata kelola, dan perluasan partisipasi publik, d) mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan, dan e) mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya, dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

4.1.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan Tahun 2014 diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan, dimana prioritas pembangunan sektoral (*Common Goals*) membutuhkan sinergitas lintas bidang dan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan. Ciri utama dari sinergitas tersebut sebagai berikut :

1. Tingginya komitmen kebersamaan lintas OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
2. Perencanaan program/kegiatan terpilih dibuat secara bersama-sama seluruh OPD yang terlibat berdasarkan prinsip *SMART PLANNING* dan bersifat akselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
3. Program dan kegiatan terpilih dilaksanakan berdasarkan prinsip *SHEWHART CYCLE (Plan, Do, Check, Action)*
4. Pelibatan secara aktif lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah pusat serta segenap pelaku pembangunan lain termasuk masyarakat sebagai mitra strategis sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Prioritas pembangunan yang dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) *Common Goals* adalah:

1. **Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan serta kependudukan**, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :
 - (1) Jabar bebas putus jenjang sekolah,
 - (2) Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas,
 - (3) Pendidikan berkebutuhan khusus,
 - (4) Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi,
 - (5) Pengembangan fasilitas pendidikan, olahraga, kepemudaan serta pengelolaan kependudukan.

2. **Peningkatan Kualitas Kesehatan**, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :
 - (1) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan,
 - (2) Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Program KB,
 - (3) Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak,
 - (4) Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa,
 - (5) Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat,
 - (6) Pembiayaan kesehatan masyarakat

3. **Peningkatan Kualitas Perekonomian dan Daya Beli Masyarakat**, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
 - b. Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi
 - c. Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat
 - d. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing
 - e. Mengembangkan Industri Kreatif dan penumbuhan Wirausahawan Muda

4. **Kemandirian Pangan**, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya ketersediaan dan kesinambungan input produksi bahan pangan
 - b. Terkendalinya stock pangan dan keanekaragaman bahan pangan pada sentra produksi
 - c. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat

- d. Meningkatnya dukungan infrastruktur di sentra produksi pangan pada tahun 2014

5. Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Melibatkan Komunitas, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan *good governance*
- b. Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, hukum, ketertiban, dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan
- d. Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan.
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas dalam pembangunan

6. Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di pusat kegiatan ekonomi
- b. Tersedianya Infrastruktur Strategis Pendukung Pengembangan Wilayah dan Kegiatan Ekonomi
- c. Meningkatnya kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan
- a. Meningkatkan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi sebagai Penyedia Air Baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan
- d. Tersedianya infrastruktur permukiman dan perumahan

7. Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :

- a. Tersedianya energi untuk mendukung pembangunan Jawa Barat
- b. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi sebagai penyedia air baku serta pengendali banjir dan kekeringan

8. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Efektivitas Mitigasi dan Percepatan Penanganan Bencana
- b. Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung dan penangan lahan kritis
- c. Meningkatnya kualitas lingkungan udara dan air

9. Pembangunan Perdesaan, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kemandirian Masyarakat dalam Pembangunan

- b. Meningkatnya peran Aparat Desa dalam pembangunan dan peran kelembagaan tingkat desa

10. Pengembangan Budaya Lokal Dan Destinasi Wisata

- a. Terkelolanya eksplorasi dan pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
- b. Terfasilitasinya Gelar Karya serta Kreativitas Seni dan Budaya Lokal
- c. Terintegrasinya Sistem Pengembangan Kepariwisata Daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataan di Jawa Barat

4.1.3 Prioritas Kewilayahan

Prioritas Kewilayahan merupakan sasaran pembangunan berdimensi kewilayahan di Jawa Barat, dalam rangka mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Pembangunan kewilayahan yang dilaksanakan untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, baik antar kabupaten dan kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan, melalui kebijakan pembangunan kewilayahan.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) wilayah pengembangan (WP) yaitu:

1. WP Bodebekpunjur

WP Bodebekpunjur meliputi Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur. Sektor unggulan yang dikembangkan adalah pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis, dan agrowisata.

2. WP Purwasuka

WP Purwasuka meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Sektor unggulan yang dikembangkan adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan.

3. WP Ciayumajakuning

WP Ciayumajakuning meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang.

Sektor unggulan yang dikembangkan adalah agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

4. WP Priangan Timur-Pangandaran

WP Priangan Timur-Pangandaran meliputi Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis. Sektor unggulan yang dikembangkan adalah pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, industri kerajinan, dan pertambangan mineral.

5. WP Sukabumi dsk

WP Sukabumi dsk meliputi Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Sektor unggulan yang dikembangkan adalah peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, bisnis kelautan, dan pertambangan mineral.

6. WP Cekungan Bandung

WP Cekungan Bandung meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Sektor unggulan yang dikembangkan adalah pertanian, hortikultura, industri non polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perkebunan.

4.2. Program Pembangunan Daerah Tahun 2014

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 berjumlah 90 (sembilan puluh) program yang terbagi ke dalam 34 (tiga puluh empat) bidang, adalah sebagai berikut :

URUSAN WAJIB

1. Bidang Pendidikan

- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
- b. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
- c. Program Pendidikan Non Formal
- d. Program Pendidikan Luar Biasa
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Bidang Kesehatan

- a. Program Upaya Kesehatan
- b. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
- c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
- e. Program Sumber Daya Kesehatan

3. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

- b. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

4. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- d. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
- e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
- f. Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya;
- g. Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai;
- h. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
- i. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

5. Bidang Penataan Ruang

- a. Program Penataan Ruang;

6. Bidang Perencanaan Pembangunan

- a. Program Kerjasama Pembangunan;
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah;

7. Bidang Perumahan

- a. Program Pengembangan Perumahan

8. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda;
- b. Program Pembinaan, Pemasarakatan dan Pengembangan Olah Raga;

9. Bidang Penanaman Modal

- a. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi;

10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan

11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

12. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
- c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

13. Bidang Ketahanan Pangan

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

14. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan;
- b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;

15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Program Keluarga Terencana;

16. Bidang Perhubungan

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
- e. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor;

17. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi;

18. Bidang Pertanahan

- a. Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan;

19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
- b. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;
- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- f. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- g. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM;
- h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

- i. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- j. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
- b. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

22. Bidang Sosial

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
- b. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- c. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;

23. Bidang Kebudayaan

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
- b. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya;

24. Bidang Statistik

- a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;

25. Bidang Kearsipan

- a. Program Pengembangan Kearsipan;

26. Bidang Perpustakaan

- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;

URUSAN PILIHAN

1. Bidang Perikanan dan Kelautan

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;

2. Bidang Pertanian

- a. Program Peningkatan Produksi Pertanian
- b. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian
- c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan;
- d. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan;

3. Bidang Kehutanan

- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
- b. Program Pengelolaan Kawasan Lindung

4. Bidang Perindustrian

- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

- b. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;

5. Bidang Perdagangan

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;

6. Bidang Pariwisata

- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah;
- b. Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi;
- c. Program Pembinaan, Pengembangan Panas Bumi dan Migas.

8. Bidang Ketransmigrasian

- a. Program Pengembangan Transmigrasi;

Salah satu urusan wajib mengenai keagamaan yang merupakan kewenangan pusat, dimana pemerintah daerah berperan dalam penciptaan iklim kondusif, keamanan dan kenyamanan beribadah, melalui program pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan dan Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan agama.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014 yang dituangkan dalam Bab V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam (i) Rencana Program dan Kegiatan OPD/Biro Provinsi Jawa Barat dan (ii) Usulan Rencana Program dan kegiatan/kabupaten/kota.

Rencana Program dan Kegiatan yang Prioritas bersifat menyeluruh yaitu selain memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan sumber pembiayaan dari APBN Tahun 2014, serta sumber pembiayaan dari partisipasi dunia usaha melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*).

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Tematik

Rencana Program dan Kegiatan Tematik ini dikelompokkan dalam (i) Rencana Program dan Kegiatan Tematik Sektoral; serta (ii) Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan.

5.1.1. Rencana Program dan Kegiatan Tematik Sektoral

Rencana Kerja Kegiatan Tematik Sektoral merupakan rencana kerja prioritas pembangunan yang dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) *Common Goals* sebagai berikut:

1. Common Goals 1 : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan serta kependudukan

a. Sasaran 1 : Penyelenggaraan Pendidikan Formal Dasar dan Menengah

1) Kegiatan Tematik 1 : Jabar bebas putus jenjang sekolah,

Output:

- a) Menyelenggarakan dan mengembangkan Sekolah Luar Biasa,
- b) Beasiswa siswa miskin untuk SMA/SMK,
- c) Wajar Dikdas 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal 12 tahun secara massal di Jawa Barat dengan dukungan skema pendanaan gratis bagi jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA,
- d) Pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI, Menyelenggarakan sertifikasi Guru,
- e) Membangun 6000 - 9000 RKB negeri dan swasta serta asrama pesantren;
- f) Beasiswa mahasiswa miskin dan berprestasi serta bantuan tugas akhir,

- g) Beasiswa pendidikan untuk guru, pemuda, atlet berprestasi, tenaga medis dan teknisi,
 - h) Bantuan kesejahteraan guru, sukwan dan honorer,
 - i) Bantuan dana bagi guru madrasah diniyah/penyuluh agama,
 - j) Merehabilitasi gedung sekolah;
- b. Sasaran 2 :** Penyelenggaraan Pendidikan Non formal Paket A,B,dan C plus Kewirausahaan dan keaksaraan fungsional (KF)
- 2) Kegiatan Tematik 2 :** Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas,
- Output :**
- a) Menyelenggarakan transformasi pendidikan non formal Paket B dan Paket C menjadi SMP_IPM dan SMK_IPM untuk penduduk usia 15 tahun keatas,
 - b) Pendidikan kewirausahaan,
 - c) Pendidikan pola hidup berperilaku baik dan berkarakter,
 - d) Penyediaan sarana transportasi sekolah di daerah terpencil;
 - e) Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
 - f) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Plus Kewirausahaan.
 - g) Insentif bagi Tutor dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan di Daerah Terpencil
- c. Sasaran 3 :** Penyelenggaraan pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif
- 3) Kegiatan Tematik 3 :** Pendidikan Berkebutuhan Khusus
- Output:**
- a) Mengembangkan sekolah-sekolah inklusi;
 - b) Menyelenggarakan dan mengembangkan Sekolah Luar Biasa,
 - c) Penyediaan sarana Pendidikan Luar Biasa yang memadai
 - d) Pengembangan Kurikulum Pendidikan Luar Biasa
 - e) Advokasi dan Pembentukan Sekolah Dasar Inklusif Percontohan di Jawa Barat
 - f) Pengembangan Sekolah Dasar Inklusif di Jawa Barat
- d. Sasaran 4 :** Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- 4) Kegiatan Tematik 4 :** Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Tinggi
- Output :**
- a) Penegerian Perguruan Tinggi,
 - b) Pembangunan kampus, sarana dan prasarana laboratorium,

- c) Penyelenggaraan kerjasama Kuliah Kerja Nyata tematik, Kerjasama penelitian dan studi;
 - d) Pengembangan IPTEK dan seni untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat
 - e) Kewirausahaan bagi mahasiswa semester akhir
 - f) Beasiswa Perguruan Tinggi untuk mahasiswa sesuai kriteria
 - g) Pengembangan kerjasama Perguruan Tinggi dengan Perusahaan
- e. **Sasaran 5** : Pengembangan Infrastruktur sarana dan prasarana Olahraga bertaraf internasional dan kepemudaan
- 5) Kegiatan Tematik 5** : Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga, kepemudaan dan pengelolaan kependudukan
- Output:**
- a) Penyelenggaraan PORPEM PROV Tahun 2014 dan PON XVI Tahun 2016,
 - b) Pembangunan Plasa Terbuka untuk Kreatifitas dan Gelar Budaya di kabupaten/kota,
 - c) Pembangunan stadion olahraga di kabupaten/kota,
 - d) Pelayanan Pencegahan dan Pertolongan Korban *Trafficking*, Pemberdayaan perempuan.

2. **Common Goals 2 : Peningkatan Kualitas Kesehatan**

- a. **Sasaran 1** : Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD
- 1) Kegiatan Tematik 1** : Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan Sumber Daya Kesehatan
- Output :**
- a) Penyediaan dokter, bidan dan tenaga medis di Puskesmas dan RSUD,
 - b) Penyediaan alat kesehatan, Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi PMKS dan masyarakat lanjut usia,
 - c) Penanggulangan gizi buruk, Layanan kesehatan khusus di kawasan industri;
 - d) Insentif bagi Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan PTT Provinsi Jawa Barat
 - e) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit.

- b. Sasaran 2 :** Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kesertaan dalam Program KB
- 2) Kegiatan Tematik 2 :** Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga Berencana
- Output:**
- a) Tersusunnya rencana besar ketahanan keluarga dan keluarga berencana;
 - b) Penguatan Kelembagaan KB, meningkatnya peserta KB aktif.
 - c) Regulasi Terkait Kemitraan Dengan Fasilitas Kesehatan Swasta Dalam Pelayanan KB
 - d) Pelayanan Masyarakat Miskin Dengan Pelayanan KB Permanen
 - e) Peningkatan ekonomi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I serta Pengembangan Bina Keluarga
- c. Sasaran 3 :** Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi
- 3) Kegiatan Tematik 3 :** Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar Ibu dan Anak (Gerakan Penyelamatan Masa Depan/GEMAMAPAN : gizi buruk, Posyandu dan Penyediaan Fasilitas Rawat Keluarga Miskin pada Rumah Sakit di 4 Wilayah.
- Output :**
- a) Terlaksananya *Surveilans* Gizi Buruk, Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk di Jawa Barat
 - b) Terintegrasinya Kegiatan Posyandu dengan fungsi Pendidikan
 - c) Terlaksananya perlindungan pada ibu hamil, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi.
 - d) Terfasilitasinya Rawat Keluarga Miskin pada Rumah Sakit di 4 Wilayah.
- d. Sasaran 4 :** Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjang
- 4) Kegiatan Tematik 4 :** Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS, TBC, Flu Burung , Narkoba dan Kesehatan Jiwa
- Output:**
- a) Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba
 - b) Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Serta Penguatan Sistem Rujukan
 - c) Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Flu Burung
 - d) Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan TBC

- e) Terlaksananya Peningkatan dan Perluasan Fungsi RSP Provinsi
- f) Terlaksananya Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa.

e. **Sasaran 5** : Meningkatnya Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

5) Kegiatan Tematik 5 : Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Output :

- a) Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- b) Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi PHBS
- c) Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan KLB Penyakit
- d) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
- e) Teroptimalisasinya Fungsi Rujukan pelayanan kesehatan
- f) Terlaksananya upaya Promotif dan Preventif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

f. **Sasaran 6** : Menuju *Universal Coverage* JPKM

6) Kegiatan Tematik 6 : Pengembangan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Barat

Output:

- a) Terselenggaranya Pengelolaan JPKM
- b) Terpenuhinya Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Ber-KTP Jawa Barat
- c) Terpenuhinya subsidi premi masyarakat miskin 40 % oleh provinsi

3. Common Goals 3 : Peningkatan Daya Beli Masyarakat

a. **Sasaran 1:** Meningkatnya perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan kemampuan tenaga kerja.

1) Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan Budaya Masyarakat Bekerja dan Perluasan Lapangan Kerja serta Kesempatan Berusaha UMKM serta pengurangan kemiskinan

Output:

- a) Terwujudnya penurunan tingkat pengangguran
- b) Tersedianya tenaga kerja berbasis kompetensi.
- c) Tersedianya peluang usaha bagi UMKM

- b. **Sasaran 2** : Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi
- 2) **Kegiatan Tematik 2** : Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi.
- Output :**
- a) Tersedianya kebijakan investasi yang pro bisnis
 - b) Terwujudnya peningkatan utilisasi kawasan industri di Jawa Barat
 - c) Terwujudnya Realisasi kawasan ekonomi khusus
 - d) Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, kondusif, bekeadilan dan menarik masuknya investasi
- c. **Sasaran 3** : Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat
- 3) **Kegiatan Tematik 3** : Pengembangan skema pembiayaan alternatif
- Output:**
- a) Tersusunnya data base lembaga pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil
 - b) Terwujudnya Pendukung terhadap operasionalisasi lembaga penjamin kredit Jawa Barat
 - c) Terwujudnya Peningkatan Meningkatnya kapasitas pengelola lembaga keuangan non perbankan
- d. **Sasaran 4** : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing
- 4) **Kegiatan Tematik 4** : Pengembangan agribisnis, *forest* bisnis, *marine* bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur
- Output :**
- a) Terwujudnya jumlah dan volume usaha dan daya saing komoditas unggulan Jawa Barat
 - b) Terjalinnnya aliansi strategis/kemitraan/networking hulu hilir (*supply chain*) antar pelaku usaha
- e. **Sasaran 5** : Peningkatan industri kreatif dan penumbuhan wirausahawan muda kreatif
- 5) **Kegiatan Tematik 5** : Pengembangan Industri Kreatif dan Wirausahawan Muda Kreatif
- Output:**
- a) Terwujudnya peningkatan jumlah populasi pelaku usaha industri kreatif

- b) Tumbuhnya wirausahawan muda di bidang industri kreatif
- c) Tumbuhnya industri fashion, animasi, games, *software* dan film

4. Common Goals 4 : Kemandirian Pangan

a. Sasaran 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kestinambungan Input Produksi Bahan Pangan

1) Kegiatan Tematik 1: Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional Tahun 2014

Output :

- a) Terwujudnya Jawa Barat menjadi penyuplai benih/bibit seluruh Indonesia
- b) Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas agro input, melalui teknologi tepat guna
- c) Terkendalinya pelestarian sumberdaya dan pemanfaatan potensi plasma nutfah
- d) Terkendalinya ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi pertanian di wilayah Jawa Barat

b. Sasaran 2 : Terkendalinya Stok Pangan dan Keanekaragaman Bahan Pangan pada Sentra Produksi

2) Kegiatan Tematik 2 : Tercapainya 13 Juta Ton GKG dan Swasembada Protein Hewani Tahun 2014

Output:

- a) Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas padi
- b) Tercapainya populasi satu juta sapi dan sepuluh juta domba.
- c) Terwujudnya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan dan peternakan
- d) Terwujudnya penguatan kelembagaan dan kompetensi SDM/pertanian dan peternakan
- e) Terkendalinya pasca panen dan pengolahan hasil produksi pertanian/peternakan

c. Sasaran 3 : Terkendalinya Tingkat Kerawanan Pangan dan Kecukupan Gizi Masyarakat

3) Kegiatan Tematik 3 : Jawa Barat Bebas Rawan Pangan

Output:

- a) Terjaminnya ketersediaan pangan pokok, bahan olahan pangan
- b) Terwujudnya peningkatan penganekaragaman, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal

- c) Terfasilitasinya pemanfaatan sistem resi gudang pada sentra produksi padi.
- d) Terfasilitasinya pengawasan keamanan pangan segar dan perdagangan bahan pangan berbahaya.
- e) Terfasilitasinya distribusi pangan masyarakat
- f) Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

d. Sasaran 4 : Meningkatnya Dukungan Infrastruktur di Sentra Produksi Pangan pada Tahun 2014

4) Kegiatan Tematik 4 : Meningkatnya Dukungan Infrastruktur (Jalan, Jembatan & Irigasi) di Sentra Produksi Pangan

Output :

- a) Tersedianya informasi kondisi infrastruktur fisik (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan
- b) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di kawasan produksi pangan

5. Common Goals 5 : Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Melibatkan Komunitas

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Mewujudkan *Good Governance*

1) Kegiatan Tematik 1 : Profesionalisme Aparatur untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel

Output :

- a) Terwujudnya peningkatan Kualitas Pengelolaan Manajemen Pemerintahan Di Daerah Provinsi Jawa Barat
- b) Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Penggalian Potensi Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan diluar PAD (Dana Transfer/Dana Perimbangan), Pemanfaatan Penerbitan Obligasi Daerah serta Optimalisasi Program CSR/PKBL bagi Sektor Dunia Usaha di Jawa Barat
- c) Terwujudnya peningkatan Kualitas Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Jawa Barat
- d) Tersusunnya Analisis Jabatan Dan Beban Kerja
- e) Terkelolanya penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan pedoman yang ada
- f) Terfasilitasinya peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pengadaan barang dan jasa

- g) Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Provinsi Jawa Barat
- h) Tersusunnya Data Standar Kompetensi Jabatan yang akurat
- i) Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Diklat Aparatur Provinsi Jawa Barat
- j) Penataan Aset Daerah melalui tertib administrasi aset daerah dan Optimalisasi pemanfaatan aset daerah

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan data Informasi Kepada Masyarakat

2) Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar *Cyber Province*

Output :

- a) Terinformasikannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat ke Masyarakat
- b) Terselenggaranya koordinasi, komunikasi Informasi dan Kemitraan Media, dialog Interaktif masyarakat serta pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Forum Komunikasi Media Tradisional dan Pekan Informasi Nasional

c. Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan

3) Kegiatan Tematik 3 : Penataan Sistem Hukum di Daerah Dan Penegakan Hukum Serta Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan

Output :

- a) Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Parpol Dan Masyarakat Sipil Serta Terfasilitasinya Peningkatan FKUB Dan FKDM
- b) Tersusunnya Produk Hukum Yang Mengakomodasi Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal Dan Nilai-Nilai Hidup Lainnya Yang Berkeadilan
- c) Tersusunnya Legal Opinion Perkara Tata Usaha Negara.
- d) Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum Dan HAM
- e) Tersusunnya Produk Hukum Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Baik Dalam Bentuk Peraturan Kepala Daerah Maupun Keputusan Kepala Daerah Yang Bersifat Penetapan (*Beschikking*) Atau Pengaturan (*Regeling*).

- f) Terdokumentasikannya Peraturan Perundang-Undangan Pusat Dan Daerah Baik Secara Manual Maupun Secara Komputerisasi

d. **Sasaran 4** : Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan

4) **Kegiatan Tematik 4** : Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah dan Wilayah Perbatasan

Output :

- a) Tersusunnya Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan
- b) Terselenggaranya Koordinasi Dan Sinergitas Pembangunan Lintas Kabupaten/ Kota Di Wilayah
- c) Terwujudnya Batas Daerah Yang Jelas Dan Pasti Baik Dari Aspek Yuridis Maupun Fisik Di Lapangan Antar Kabupaten/Kota Dan Antar Provinsi
- d) Terselenggara Fasilitas Kerjasama antar Daerah Kab/Kota dalam rangka mewujudkan SDM Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Kewilayahan.
- e) Terwujudnya Pengembangan Kerjasama Pembangunan Ekonomi Regional antar Kab/Kota di Jabar.
- f) Terfasilitasinya Peningkatan Kerjasama antar Daerah Kab/Kota dalam bidang Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Regional di Jabar.
- g) Terfasilitasinya Kerjasama antar Kab/Kota dalam Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.
- h) Tersusunnya Kerjasama Provinsi dengan Kab/ Kota, Provinsi dengan Provinsi lain dan Provinsi dengan Pusat
- i) Terlaksananya penegasan batas wilayah Provinsi Jabar dengan Banten

e. **Sasaran 5** : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan

5) **Kegiatan Tematik 5** : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Akuntabilitas Pembangunan

Output :

- a) Terwujudnya Perencanaan Yang Partisipatif Dan Akuntabel serta berbasis penelitian
- b) Terwujudnya sinergitas perencanaan, pengendalian program dan pengelolaan administrasi keuangan
- c) Terwujudnya Upaya Peningkatan Kinerja OPD

- d) Terwujudnya Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan Daerah
- e) Terselenggaranya koordinasi, pembinaan, monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan pada seluruh sektor di Jawa Barat
- f) Terselenggaranya sinergitas pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota

6. Common Goals 6 : Pengembangan Infrastruktur Wilayah

a. **Sasaran 1** : Meningkatnya Efektivitas Pergerakan Orang, Barang dan Jasa di Pusat Kegiatan Ekonomi

1) Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan kemantapan jalan dan Penanganan Kemacetan Lalu Lintas di Metropolitan Bodebek dan Metropolitan Bandung Raya.

Output :

- a) Terlaksanannya Fasilitasi Pembangunan Jalan Tol Strategis BIUTR dan Soreang – Pasirkoja (SOROJA), Fly Over Buah Batu, Kopo dan Cimareme serta Jalan Lingkar Banjaran dan Majalaya
- b) Tersedianya Jaringan Jalan yang Dapat Menyediakan Kapasitas yang Sesuai dengan Kebutuhan Serta Mempunyai Nilai Struktur yang Baik
- c) Terwujudnya Kemantapan Jalan Agar Tetap Dapat Memberikan Pelayanan yang Optimal Terhadap Arus Lalu Lintas yang Melewatinya Dalam Batas Repetisi Beban Standar Maupun Struktur yang direncanakan.
- d) Terfasilitasinya Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Massal
- e) Tertibnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Orang dan Barang di Jawa Barat

b. **Sasaran 2** : Tersedianya Infrastruktur Strategis Pendukung Pengembangan Wilayah dan Kegiatan Ekonomi

2) Kegiatan Tematik 2 : Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur – Sukabumi – Bogor, Jakarta - Cirebon, Bandung - Tasikmalaya serta Jabar Selatan

Output :

- a) Terlaksanannya Fasilitasi Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari, Kanci - Pejagan, Tanjung Priuk - Cikarang, Bogor Ring Road, Cikopo - Palimanan (CIKAPALI), Bogor -Ciawi - Sukabumi (BOCIMI),Cileunyi – Sumedang – Dawuan (CISUMDAWU), Fly

OverTarum Barat dan Gebang Pada Ruas- Ruas Strategis di Jawa Barat

- b) Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkar Cianjur, Lingkar Tasikmalaya, Lingkar Cirebon dan Lingkar Ciamis
- c) Terlaksananya Pembangunan BIJB Kertajatidan Terfasilitasinya Pembangunan Jalur Kereta Api Stasiun Kejaksaan Cirebon – Pelabuhan Cirebon, Kadipaten – Kertajati – Arjawinangun – Cirebon, Short Cut Cibungur – Tanjung Rasa, Rancaekek – Tanjung Sari
- d) Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan LautCilamaya

c. **Sasaran 3** : Meningkatnya Kondisi Infrastruktur di Wilayah Perbatasan

3) Kegiatan Tematik 3 : Peningkatan Kondisi Infrastruktur Jalan dan Perhubungan di Wilayah Perbatasan Antar Provinsi dan Antar Kota/Kab serta Penciptaan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru

Output :

- a) TerfasilitasinyaPeningkatan Kondisi dan Kemantapan Jalan di Perbatasan Antar Provinsi dan Antar Kota/Kabupaten
- b) Terfasilitasinya Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Perbatasan Antar Provinsi dan Antar Kota/Kabupaten
- c) Terlaksananya Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan di Wilayah Perbatasan Jawa Barat

d. **Sasaran 4** : MeningkatnyaInfrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi sebagai Penyedia Air Baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan

4) Kegiatan Tematik 4 : Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat

Output :

- a) Tersedianya Jaringan Irigasi yang Handal
- b) Terfasilitasinya Kondisi dan Fungsi Sungai, Waduk, Situ, Embung, dan Sumber Daya Air Lainnya yang dapat Memenuhi Kebutuhan Air Baku Pertanian Domestik, dan Industri
- c) Tersedianya Infrastruktur Sumber Daya Air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai

e. **Sasaran 5** : Tersedianya infrastruktur permukiman dan perumahan

5) Kegiatan Tematik 5 : Pembangunan infrastruktur Permukiman dan Pengembangan Perumahan di Jawa Barat

Output :

- a) Terfasilitasinya Pengelolaan Drainase Perkotaan;
- b) Terfasilitasinya pengembangan kawasan perdesaan potensial melalui penyediaan infrastuktur permukiman;
- c) Terfasilitasinya peningkatan kualitas bangunan dan lingkungan permukiman;
- d) Terfasilitasinya ketersediaan dan peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan;
- e) Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat dalam permukiman sehat;
- f) Terfasilitasinya peningkatan ketersediaan rumah;
- g) Terfasilitasinya peningkatan ketersediaan kualitas rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

7. Common Goals 7 : Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku

a. Sasaran 1 : Tersedianya energi untuk Mendukung Pembangunan Jawa Barat

1) Kegiatan Tematik 1: Jabar Mandiri Energi Perdesaan Untuk Listrik dan Bahan Bakar Kebutuhan Domestik

Output :

- a) Terfasilitasinya Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan
- b) Terfasilitasinya Pengembangan Pemanfaatan Energi Alternatif Perdesaan dan Desa Mandiri Energi
- c) Terfasilitasinya Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan untuk Konservasi Energi Tidak Terbarukan
- d) Terfasilitasinya Pengembangan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

b. Sasaran 2 : Pemenuhan Kecukupan Air Baku untuk Mendukung Pembangunan Jawa Barat

2) Kegiatan Tematik 2 : Pemenuhan kecukupan air baku dan pembangunan Infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat.

Output :

- a) Terfasilitasinya Rehabilitasi dan Revitalisasi Waduk, Situ dan Embung
- b) Terfasilitasinya Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Hulu Mata Air/Sumber Air

- c) Tersediannya Sarana dan Prasarana Air Bersih di Jawa Barat

8. Common Goals 8 : Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup

- a. **Sasaran 1** : Meningkatnya Efektivitas Mitigasi dan Percepatan Penanganan Bencana

- 1). **Kegiatan Tematik 1** : Penanganan Banjir Lintas Wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek

Output :

- a) Terfasilitasinya Relokasi Korban di Kawasan Bencana
- b) Terfasilitasinya Revitalisasi Permukiman dan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Banjir dan Bantaran Sungai
- c) Terfasilitasinya Pembangunan Shelter/Rumah Singgah Bencana
- d) Tersedianya alat evakuasi korban bencana
- e) Terfasilitasinya peningkatan kemampuan masyarakat dalam kewaspadaan dini terhadap bencana dan mitigasi.

- b. **Sasaran 2** : Meningkatnya Luas dan Fungsi Kawasan Lindung dan Pengendalian Luasan Lahan kritis

- 2). **Kegiatan Tematik 2** : Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Hulu DAS Prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung Dan Citanduy) Dan Kawasan Pesisir Serta Pulau Kecil Melalui Jabar *Green Province*

Output :

- a) Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Hulu DAS Kritis dan Sangat Kritis
- b) Terfasilitasinya Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Disekitar Hutan Negara dan Kawasan Rawan Bencana
- c) Terfasilitasinya Pengembangan RTH di Kawasan Perkotaan
- d) Terlaksananya Penanganan Kebakaran Hutan dan Pengamanan Hutan
- e) Terfasilitasinya konservasi Sumber Daya Alam
- f) Terlaksananya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Yang Memuat Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
- g) Terfasilitasinya pengelolaan lingkungan ekosistem pesisir dan laut
- h) Terfasilitasinya dan koordinasi rehabilitasi lahan kritis
- i) Terfasilitasinya mitigasi perubahan iklim dan bencana geologi

- c. **Sasaran 3** : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Udara dan Air
- 3). Kegiatan Tematik 3** : Pengendalian Pencemaran Limbah Industri, Limbah Domestik Dan Pengelolaan Sampah Regional
- Output** :
- a) Terlaksananya penataan kawasan permukiman kumuh;
 - b) Terlaksananya penanganan Air Limbah Domestik
 - c) Terfasilitasinya Pembangunan Pengelolaan Sampah Regional di Legok Nangka dan Nambo
 - d) Terlaksananya optimalisasi dan persiapan pasca operasionalisasi Tempat Pemrosesan Kompos (TPK) Sarimukti di Kab. Bandung Barat
 - e) Terlaksananya revitalisasi TPPAS Regional Leuwigajah
 - f) Terlaksananya penataan lingkungan sempadan Sungai Cikapundung, Kalimalang dan Cimanuk (Segmen Perkotaan)
 - g) Terkendalinya pencemaran di Jawa Barat
 - h) Terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan pengelolaan B3 dan limbah B3
 - i) Terfasilitasinya penilaian dokumen lingkungan
 - j) Terfasilitasinya pengembangan produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan
 - k) Tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
 - l) Terfasilitasinya pengembangan sarana informasi lingkungan
 - m) Terfasilitasinya pengembangan kapasitas masyarakat dan aparat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - n) Terfasilitasinya penataan dan penegakan hukum lingkungan
 - o) Terfasilitasinya kemitraan dalam PPLH
 - p) Terfasilitasinya pembinaan laboratorium lingkungan.

9. Common Goals 9 : Pembangunan Perdesaan

- a. **Sasaran 1** : Meningkatnya peran Aparat Desa dalam pembangunan dan peran kelembagaan tingkat desa
- 1) Kegiatan Tematik 1** : Pembangunan Perdesaan Dengan Menerapkan Prinsip Desa Mandiri
- Output** :
- a) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Di Daerah
 - b) Tersedianya Sarana Dan Prasarana Di Desa untuk mewujudkan pemerataan pembangunan
 - c) Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

- d) Terwujudnya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemasyarakatan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- e) Terfasilitasinya Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Usaha Di Desa Hutan Dan Desa Pesisir
- f) Terfasilitasinya peran masyarakat desa dalam menumbuhkan perekonomian desa

a. **Sasaran 2** : Meningkatkan peran dan aparat desa dalam pembangunan

2) Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa

Output :

- a) Terwujudnya Peningkatan Kinerja/Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Perdesaan
- b) Terwujudnya Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat
- c) Terfasilitasinya Sarana Dan Prasarana Desa, Desa Perbatasan Dan Desa Tertinggal

10. Common Goals 10 : Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata

a. **Sasaran 1** : Terkelolanya eksplorasi dan pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

1) Kegiatan Tematik 1 : Pelestarian Seni Budaya Tradisional Dan Benda Cagar Budaya Serta Kearifan Lokal Sebagai Jati Diri Masyarakat Jawa Barat

Output :

- a) Terlaksananya Pelestarian Dan Pengembangan Situs/Cagar Budaya Nilai Budaya dan Kearifan Lokal.
- b) Terlaksananya Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa, Sastra Dan Aksara Daerah
- c) Terlaksananya Peningkatan Apresiasi Pemuseuman Jawa Barat
- d) Terlaksananya Pembinaan, Pelestarian, Dan Pengembangan Kepurbakalaan, Permuseuman, Sejarah dan Nilai Tradisional
- e) Terlaksananya Pengembangan Dan Pemanfaatan Sejarah Serta Nilai Tradisional Jawa Barat
- f) Tersedianya Informasi Cagar Budaya Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dari Seluruh Wilayah Jawa Barat.
- g) Terfasilitasinya Eksplorasi, Penerapan Dan Pengembangan Cagar Budaya Dan Nilai-Nilai Budaya Serta Kearifan Lokal
- h) Termanfaatkannya Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Dalam Mendukung Proses Pembangunan Jawa Barat.

- b. Sasaran 2 :** Terfasilitasinya Gelar Karya serta Kreativitas Seni dan Budaya Lokal
- 2) Kegiatan Tematik 2 :** Gelar karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat
- Output :**
- a) Meningkatnya apresiasi seni, pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah.
 - b) Meningkatnya Pemanfaatan dan Pengembangan Seni Kontemporer dan Perfilman Jawa Barat.
 - c) Terfasilitasinya Minat Bakat Seni Kepada Masyarakat
 - d) Terlaksananya Peningkatan Informasi dan Promosi Seni Budaya Jawa Barat.
 - e) Terciptanya Kemandirian Seniman Tradisional.
- c. Sasaran 3 :** Terintegrasinya Sistem Pengembangan Kepariwisata Daerah dalam rangka peningkatan kesiapan kepariwisataan di Jawa Barat
- 3) Kegiatan Tematik 3 :** Pengembangan Destinasi Wisata dengan Fokus Ekowisata, Wisata Budaya Dan *Heritage* serta Wisata Iptek yang Terintegrasi dalam rangka Destinasi Wisata Jawa Bali
- Output :**
- a) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Dan Promosi Kepariwisata Jawa Barat.
 - b) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana-Prasarana Pokok Serta Penunjang Di 9 KWU (Kawasan Wista Unggulan) Jawa Barat
 - c) Terfasilitasinya Pengembangan Kegiatan Wisata Di 9 Kawasan Wisata Unggulan Jawa Barat.
 - d) Terwujudnya Peningkatan Volume Dan Waktu Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) Dan Wisatawan Mancanegara (Wisman).
 - e) Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Dari Kegiatan Kepariwisata.

Kegiatan tematik sektoral yang terdiri dari 40 (empat puluh) kegiatan yang dikemas berdasarkan prioritas pembangunan (*Common Goals*), sebagai berikut :

Common Goal 1 : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan serta Kepemudaan, yaitu kegiatan tematik: (1) Jabar bebas putus jenjang sekolah, fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota (2) Peningkatan pelayanan

pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat, (3) Pendidikan berkebutuhan khusus, (4) Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi, (5) Pengembangan Fasilitas Pendidikan, Olahraga dan Kepemudaan.

Beberapa kegiatan prioritas : (a) Menyelenggarakan dan mengembangkan Sekolah Luar Biasa, Beasiswa siswa miskin untuk SMA/SMK, Wajar Dikdas 9 tahun dan pendidikan menengah universal 12 tahun secara massal di Jawa Barat dengan dukungan skema pendanaan gratis bagi jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA, Menyelenggarakan sertifikasi Guru, Membangun 6000 hingga 9000 Ruang Kelas Baru (RKB) negeri dan swasta; Beasiswa mahasiswa miskin dan berprestasi serta bantuan tugas akhir, Beasiswa pendidikan untuk guru, pemuda, atlet berprestasi, tenaga medis dan teknisi, Bantuan kesejahteraan guru, sukwan dan honorer, Bantuan dana bagi guru madrasah diniyah/penyuluh agama, Merehabilitasi gedung sekolah; (b) Pendidikan paket B dan C serta rencana pendidikan SMP-IPM dan SMK-IPM secara masal untuk usia 15 tahun keatas, Menyelenggarakan pendidikan pola hidup berperilaku baik; (c) Mengembangkan sekolah-sekolah inklusif; (d) Mendukung penergian Perguruan Tinggi, Mendukung pembangunan kampus, sarana dan prasarana laboratorium, Menyelenggarakan kerjasama Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, Menyelenggarakan kerjasama penelitian dan studi; (e) Mendukung penyelenggaraan PORPEMPROV tahun 2014 dan PON XVI tahun 2016, Membangun Plasa Terbuka untuk Kreatifitas dan Gelar Budaya di Kabupaten/Kota, Membangun stadion olahraga di kabupaten/kota;

Common Goal 2 : Peningkatan Kualitas Kesehatan, yaitu kegiatan tematik: (1) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan, (2) Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga Berencana, (3) Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak, (4) Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa (5) Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, (6) Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Beberapa kegiatan prioritas : (a) Mendukung penyediaan dokter, bidan dan tenaga medis di Puskesmas dan RSUD, Mendukung penyediaan alat kesehatan, Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi PMKS, Menanggulangi gizi buruk; (b) Menyusun rencana besar; (c) Gerakan Penyelamatan Masa Depan/Gemamapan : gizi buruk, posyandu, dan penyediaan fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 4 wilayah ; (d) Meningkatkan pelayanan bagi penderita HIV/AIDS, TBC, Flu Burung, Narkoba, dan kesehatan jiwa; (e) Meningkatkan pelayanan bagi penderita penyakit Kusta, Filariasis dan penyakit pandemik lainnya; (f) Menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ;

Common Goal 3 : Peningkatan Kualitas Perekonomian dan Daya Beli Masyarakat, yaitu kegiatan tematik: (1) Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta Pengurangan Kemiskinan, (2) Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi, (3) Pengembangan skema pembiayaan alternatif, (4) Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, agroindustri, dan industri manufaktur, (5) Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan muda kreatif.

Beberapa kegiatan prioritas: (a) Menyelenggarakan kegiatan Jabar Mengembara, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Koperasi, Merevitalisasi pasar tradisional, Menyelenggaraan operasi pasar sembako, Menyediakan lapangan kerja bagi penyandang cacat, Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga, Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga dan komunitas ; (b) Meningkatkan dukungan infrastruktur transportasi di sentra industri manufaktur, sentra pertanian dan kawasan wisata, Mempermudah proses penanaman modal PMA/PMDN ; (c) Menyediakan Kredit Cinta Rakyat (KCR) ; (d) Industrialisasi perikanan Pansela dan Pantura, Meningkatkan perekonomian rakyat dari sektor primer ; (e) Memfasilitasi terciptanya minimal 20.000 wirausahawan baru per tahun, dan membuka minimal 400.000 serapan tenaga kerja baru per tahun.

Common Goal 4 : Kemandirian Pangan, yaitu kegiatan tematik: (1) Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun 2014, (2) Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani tahun 2014, (3) Jawa Barat bebas rawan pangan, (4) Meningkatkan dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan.

Beberapa kegiatan prioritas: (a) Menyediakan benih ikan air tawar dan benih padi; (b) Mendukung Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) surplus 10 juta ton beras Tahun 2014, Mencetak sawah baru, Mengembangkan fasilitas pusat perberasan Pantura, Mendukung program swasembada daging (sapi, kambing, dan unggas), Meningkatkan kemampuan penggerak dan penyuluh pertanian; (c) Mengurangi jumlah desa rawan pangan bersama kabupaten/kota; (d) Meningkatkan fungsi jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa.

Common Goal 5 : Peningkatan Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Melibatkan Komunitas, yaitu kegiatan tematik: (1) Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, (2) Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik, (3) Penataan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum, (4) Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan, (5) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan, serta pengelolaan aset dan keuangan, dan (6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Beberapa kegiatan prioritas: (a) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu seluruh OPD/Biro Provinsi Jawa Barat, Meningkatkan kualitas SDM dan revitalisasi pada

UPTD/UPTB/Instalasi, Menyelenggarakan Program 300 Doktor Research Assistant, Meningkatkan Sinergitas dan koordinasi antar OPD dalam pelayanan perijinan terpadu; (b) Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, Menerapkan pola kerja paperless office pada seluruh OPD/Biro Provinsi Jawa Barat, Mengembangkan Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat, Menerapkan *Decision Support System* (DSS) Km 0 *pro poor*, Memfasilitasi sertifikasi organisasi kemasyarakatan; (c) Meningkatkan peran masyarakat/institusi dalam penyusunan peraturan, Fasilitasi proses administrasi penyelesaian daerah otonomi baru kabupaten di Jawa Barat, Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat; (d) Meningkatkan sinergi program pemerintah-provinsi-kabupaten/kota, Meningkatkan kualitas kerjasama komunikasi antar *stakeholders*, Reaktualisasi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP), Manajemen Pengembangan Metropolitan di Jawa Barat, Menata dan mengendalikan Kawasan Cepat Tumbuh; (e) Menerapkan sistem RKPD *Online*, Mengendalikan akurasi pelaksanaan pembangunan dengan prinsip SIDLACOM (*Survey Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance*), Memfasilitasi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian selatan dan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian utara; Menata dan mengelola barang milik daerah, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (f) Pembangunan gedung Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota; Dukungan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaraan.

Common Goal 6 : Peningkatan Infrastruktur Wilayah, yaitu kegiatan tematik: (1) Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek dan Metro Bandung Raya, (2) Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur – Sukabumi - Bogor, Jakarta – Cirebon, Bandung – Tasikmalaya serta Jabar Selatan, (3) Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kabupaten/kota serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru, (4) Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat, dan (5) Pembangunan infrastruktur permukiman dan pengembangan perumahan di Jawa Barat.

Beberapa kegiatan prioritas: (a) Memfasilitasi pembangunan Bandung *Intra Urban Toll Road* (BIUTR) dan Tol Soroja, Membangun jalan lintas cepat Banjaran, Majalaya, Parakanmuncang, *fly over* Kopo, Buah Batu, Cimareme, *underpass* Padalarang; Meningkatkan infrastruktur transportasi ke sentra industri, sentra pertanian dan wisata, Mengembangkan transportasi massal perkotaan di kawasan perbatasan Jabar-DKI Jakarta dan Kawasan Metropolitan Bandung Raya; (b) Memfasilitasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dan Tol Ciawi-Sukabumi-Padalarang; Tol Cileunyi-Tasikmalaya (CITAS), Membangun jalan lintas cepat Kadungora-Leles, Memfasilitasi pembangunan jalan poros timur Puncak Sentul-Kota Bunga dan Simpang Sukamakmur-Cariu, Meningkatkan dan melebarkan jalan vertikal poros timur Pangandaran-Ciamis-

Cikijing-Cirebon, jalur vertikal poros barat Pelabuhanratu-Cikidang-Cibadak-Bogor-Depok-Jakarta, Membangun Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan *Aerocity*, Meningkatkan dan melebarkan jalan poros horisontal Jabar Selatan, Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya, Menangani dampak sosial dan lingkungan pembangunan Waduk Jatigede, Mengembangkan dan memfungsikan Bandara Nusawiru; (c) Meningkatkan kemantapan jalan di perbatasan Jabar-Jateng, Jabar-DKI dan Jabar-Banten serta perbatasan antar kabupaten/kota; (d) Memfasilitasi pembangunan Bendung Rengrang/Sumedang, Dukungan Pembangunan Waduk Sadawarna, Dukungan Pembangunan Waduk Kuningan, Dukungan Pembangunan Waduk Matenggeng, Dukungan Pembangunan Daerah irigasi Leuwigoong; (e) Rehabilitasi minimal 20.000 Rumah Tidak Layak Huni per tahun bagi masyarakat miskin, Meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limbah di metropolitan; Menjaga konsistensi dalam pelaksanaan RTRW dan RDTR dengan pelaksanaan pembangunan dan penegakan hukum; Menyusun perencanaan wilayah *metropolitan, growth center*, RTRW Kabupaten Pangandaran serta Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

Common Goal 7 : Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku, yaitu kegiatan tematik: (1) Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik, dan (2) Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat.

Beberapa kegiatan prioritas: (a) Meningkatkan rasio elektrifikasi rumah tangga, Mengembangkan energi baru dan terbarukan, Mengembangkan desa mandiri energi berbasis potensi lokal, Meningkatkan kerjasama pengembangan teknologi di bidang energi terbarukan; (b) Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Metropolitan Bandung Raya, Metropolitan Cirebon, Metropolitan Bodebek-Karpur dan wilayah rawan air, Merehabilitasi situ sebagai sumber air baku, pengendali banjir dan objek wisata ; Meningkatkan penyediaan air bersih di ibukota kecamatan dan perdesaan.

Common Goal 8 : Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup, yaitu kegiatan tematik : (1) Penanganan bencana longsor, banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek, (2) Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province, dan (3) Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional.

Beberapa kegiatan prioritas: (a) Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan Bodebekpunjur dan Kawasan Bandung Utara, Meningkatkan manajemen air untuk penanganan banjir dan kekeringan, Mempercepat penanganan korban bencana alam, Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana; (b) Melaksanakan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) dan Gerakan Rehabilitasi Lahan (GERHAN), Menerapkan pola hidup green province, Mengadakan lahan untuk konservasi, Kolaborasi penanganan konservasi non-struktur DAS Citarum, Cimanuk,

Ciliwung dan Citanduy; (c) Mengurangi area pencemaran limbah industri di Rancaekek, Trusmi, Dukupuntang dan Sukaregang. Membangun TPPAS Regional Legoknangka, Nambo, Cianjur-Sukabumi, Bekasi, mempertahankan fungsi TPA Sarimukti dan revitalisasi TPA Leuwigajah, Memperkuat kelembagaan pengelolaan sampah regional.

Common Goal 9 : Pembangunan Perdesaan, yaitu kegiatan tematik: (1) Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa membangun, dan (2) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Beberapa kegiatan prioritas: (a) Membangun/meningkatkan infrastruktur dasar perdesaan, Dukungan program PNPM Membangun Desa Mandiri, Merevitalisasi Posyandu multifungsi (50.000 – 60.000 unit) dan insentif kader posyandu; (b) Membangun/meningkatkan infrastruktur dasar pemerintahan desa, Meningkatkan kesejahteraan aparatur desa.

Common Goal 10 : Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata, yaitu kegiatan tematik: (1) Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat, (2) Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat, dan (3) Pengembangan destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali.

Beberapa kegiatan prioritas: (a) Perolehan Hak Paten atas Seni dan Budaya Jawa Barat, Dukungan untuk Keraton Sultan Kasepuhan, Sultan Kanoman, Sultan Kacirebonan, Keraton Sumedang Larang, Revitalisasi Budaya Jawa Barat yang Hampir Punah; (b) Revitalisasi Gedung Kesenian bertaraf Internasional; (c) Membangun pusat seni dan budaya di kabupaten/kota, Pengembangan Situs Gunung Padang, Goa Pawon, Situs Candi Bojong Menje, Candi Cangkuang, Penataan sistem dan objek wisata pada koridor Jabar Selatan (Barat-Timur), Koridor Bandung-Pangalengan-Rancabuaya, Koridor Bogor-Puncak-Cianjur-Bandung, Koridor Bandung-Sumedang-Majalengka-Cirebon-Kuningan; Pengembangan agrowisata Rancabuaya, Pembangunan kawasan *Meetings Events Conventions Exhibitions* (MECE) koridor Bandung-Kertajati dan kawasan Metropolitan serta ikonisasi Jawa Barat sebagai Destinasi Wisata Dunia.

5.1.2. Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan

Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan merupakan rencana pembangunan yang didasarkan pada keberadaan potensi unggulan di setiap Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) Jawa Barat, dengan perincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP- I Bogor:

- a. Integrasi sentra pengembalaan ternak sapi potong dan domba di Kab. Cianjur dan Kabupaten/Kota Sukabumi, yang diarahkan pada tersedianya

- kawasan pengembangan ternak terpadu (sapi dan domba) di Kab. Cianjur dan Kab. Sukabumi.
- b. Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur, yang diarahkan oada tertatanya ODTW unggulan berbasis wisata alam (Gunung Padang di Kab. Cianjur, Pelabuhanratu/Cimaja di Kab. Sukabumi dan Puncak Kab. Bogor).
 - c. Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan pertambangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam rangka perintisan PKN Pelabuhanratu, yang diarahkan pada :
 - Tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan ikan di Pelabuhan Ratu dan Cisolok
 - Rencana peningkatan jalan lintas selatan Jawa Barat menjadi jalan nasional
 - Terbangunnya terminal Tipe A Kota Sukabumi
 - Terbangunnya Terminal Tipe B Pelabuhanratu
 - d. Pusat pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan internasional, yang diarahkan dengan tersedianya benih ikan air tawar dan ikan hias berkualitas sesuai permintaan pasar regional maupun internasional.
 - e. Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan wangi), yang diarahkan dengan tersedianya benih bibit unggul varietas pandan wangi yang bersertifikat.

2. Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP- II Purwakarta:

- a. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang-Bekasi, yang diarahkan dengan diusulkannya penetapan kawasan industri yang akan diarahkan menjadi kawasan Ekonomi Khusus Industri (KEKI) Karawang-Bekasi.
- b. Pengembangan Industri Manufaktur, yang diarahkan pada tersedianya rencana pengembangan klaster industri komponen otomotif (Kab. Bekasi).
- c. Pengembangan Industri Perberasan, yang diarahkan pada terbangunnya LDPM 10 Gapoktan per Kabupaten.
- d. Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta mangrove, yang diarahkan dengan :
 - Meningkatkan produktivitas, produksi dan ragam/macam usaha perikanan (Kota Bekasi-ikan hias, Kab. Karawang, Kab. Subang).
 - Terehabilitasinya ekosistem pantai dan muara melalui penataan kawasan *mangrove*, tata letak lahan pertambakan serta jaringan infrastruktur tambak (irigasi dan jalan produksi distribusi) (Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Subang).

- e. Pengembangan wisata sejarah dan wisata *pilgrimage* (ziarah), yang diarahkan pada pemanfaatan potensi-potensi ODTW sejarah dan wisata ziarah, melalui upaya destinasi dan promosi wisata yang melibatkan perekonomian masyarakat setempat.

3. Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP- III Cirebon:

- a. Pengembangan agribisnis mangadan industrialisasi perikanan, yang diarahkan pada meningkatnya produksi dan industri pengolahan mangga, serta pengembangan industri perikanan.
- b. Pengembangan sistem perdagangan komoditas beras dan palawija, yang diarahkan pada tersedianya system resi gudang komoditi beras, jagung dan kedelai.
- c. Pengembangan destinasi wisata *pilgrimage* (ziarah) dan cagar budaya, yang diarahkan pada tertatanya destinasi wisata berbasis wisata *pilgrimage* (ziarah) dan cagar budaya.
- d. Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai (Kebun Raya Kuningan) dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai yang diarahkan pada terbangunnya infrastruktur pendukung dan koleksi tumbuhan yang tertata serta diversifikasi usaha masyarakat sekitar hutan.
- e. Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan, yang diarahkan pada terjalinnya kerjasama pelaku usaha (hulu-hilir) dalam industri batik dan makanan olahan.

4. Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-IV Priangan:

- a. Pusat pengembangan pendidikan dan riset, yang diarahkan pada :
 - Tersusunnya Rencana tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jatinangor pengembangan kawasan pendidikan dan riset terpadu di jatinangor
 - Tersedianya sarana dan prasarana kawasan pendidikan terpadu jatinagor yang mengacu pada master plan selaras dengan pengembangan kawasan perdagangan dan pemukiman di sekitarnya.
- b. Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan dan kelautan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat; pengembangan ternak sapi perah di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang dan Garut; serta pengembangan domba garut di Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat dan jejaringnya, yang diarahkan pada :
 - Terbentuknya sentra pemurnian bibit domba Garut
 - Terkoneksinya klaster jagung dan ayam
 - Meningkatkan sentra-sentra benih untuk gurame.
 - Tersediaannya kecukupan pakan ternak

- Terwujudnya multi multiaktivatis agribisnis (jagung dan unggas)
- Tersedianya pabrik pakan ternak sapi potong di Kab. Garut
- Meningkatnya kelompok peternak domba di Kab. Garut
- c. Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Kota Cimahi, yang diarahkan pada tersedianya bibit sayuran dan tanaman hias yang berkualitas unggul
- d. Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Cimahi, Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung Barat, yang diarahkan pada tersusunnya rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya.
- e. Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran yang diarahkan pada :
 - Tersusunnya master plan dan pengembangan ODTW Pangandaran dan zoning kawasan pesisir
 - Optimalisasi Fungsi Bandar/Pangkalan Udara (Nusa Wiru Kab. Ciamis)
 - Peningkatan jalur jalan poros (Cirebon-Cikijing-Ciamis Pangandaran)
 - Pengembangan Terminal Tipe B di Pangandaran.

5.2 Rencana Program dan Kegiatan *Non Common Goals* (Non Tematik)

Rencana kerja *Non-Common Goals* adalah merupakan rencana kerja penunjang yang dikategorikan bukan merupakan kegiatan prioritas pembangunan. Rencana kerja *Non-Common Goals* diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Kegiatan yang termasuk dalam lingkup *Non-Common Goals* adalah kegiatan tetap dan mengikat (*fixed cost*) dan kegiatan rutin (*regular cost*). Cakupan kegiatan tetap dan mengikat yaitu kegiatan yang harus dialokasikan oleh OPD karena merupakan kebutuhan dasar untuk operasional dan penunjang kinerja. Sedangkan kegiatan rutin adalah kegiatan yang merupakan tugas fungsi OPD dan bukan kegiatan unggulan namun akan berdampak luas apabila tidak dilaksanakan.

Dalam Matriks Rencana Kerja *Non Common Goals* ini juga memuat rincian kegiatan dari 90 program pembangunan Provinsi Jawa Barat yang mengacu kepada RPJMD Transisi Tahun 2014 dan sudah dituangkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib dan Pilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Status kegiatan pada RKPD ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.3. Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan

Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 merupakan penjabaran dari uraian substansi yang dijelaskan dalam sub bab 5.1 dan 5.2. Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan tersebut diuraikan pada buku II yang berisi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2014. Buku II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku I.

Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dimaksud merupakan hasil pembahasan pada Forum OPD/Biro, Pra Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan di 4 (empat) Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) dan hasil pembahasan Forum Gabungan OPD Tahun 2013.

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2014. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2012. RKPD tahun 2014 merupakan Upaya memantapkan Pembangunan Secara Menyuluruh.

Selanjutnya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2014 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2014, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2014. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2014, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian 10 (sepuluh) tujuan bersama *Common Goals* dan *Non Common Goals*. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh OPD Provinsi Jawa Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Jawa Barat, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014, secara sinergis dan terintegrasi.
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh OPD, BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2014. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2014 menjadi dasar bahan penyusunan RKPD Tahun 2015.
4. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2014, RKPD Tahun 2014 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat
5. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2014.
6. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan, Mekanismenya difasilitasi melalui RKPD On-line, Forum OPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih

luas dapat terakomodasi. Oleh karena itu diharapkan tim penyusun RKPD 2014 harus mengawal secara seksama aspirasi dan kepentingan masyarakat mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

7. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi ,integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap OPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2014, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Gubernur, melalui Biro Administrasi Pembangunan, Biro Keuangan dan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.
8. Secara proaktif, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, wajib melakukan pengendalian dan monitoring pelaksanaan RKPD Tahun 2014 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing OPD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur.
9. Pada akhir tahun anggaran 2014, setiap kepala OPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2014, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan, Biro Keuangan dan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.
10. Tatacara penyusunan RKPD Tahun 2014 dan penyelenggaraan MUSRENBANG Serta forum OPD tahun 2014 mengacu kepada Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tingkat Nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan.
11. RKPD Tahun 2014 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 4.1.

Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Program Tahun 2014

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Tahun 2014		SKPD Penanggung Jawab		
			Target Kinerja	Pendanaan Pembangunan (Rp. Juta)	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung
	1	2	5	6	8	9	10
1	URUSAN WAJIB						
1	BIDANG PENDIDIKAN						
a.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	1. APM SD/MI sederajat	97,98	136.000	Dinas Pendidikan		
		2. APK SMP/MTs sederajat	95,74	90.000	Dinas Pendidikan		
		3. APM SMP/MTs sederajat	82	93.000	Dinas Pendidikan		
		4. Jumlah pelayanan pendidikan di daerah khusus	82	36.121	Dinas Pendidikan		
		5. Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	95,74	10.000	Dinas Pendidikan		
		6. Jumlah SD dan SMP unggulan percontohan bertaraf internasional					
		a. SD	26	15.000	Dinas Pendidikan		
		b. SMP	45	20.000	Dinas Pendidikan		
		7. jumlah Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) jenjang SD dan SMP					
		a. SD		5.727	Dinas Pendidikan		
		b. SMP		15.273	Dinas Pendidikan		
		8. Persentase dayaampung SMP/MTs	82	20.000	Dinas Pendidikan		
		9. Jumlah SMP Terbuka,	395	18.050	Dinas Pendidikan		
		10. SD-SMP Satu Atap	698	10.474	Dinas Pendidikan		
		11. Persentase ketersediaan buku teks pelajaran kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)	55	66.650	Dinas Pendidikan		
		12. Persentase Daya Tampung SMP/MTs	100	45.000	Dinas Pendidikan		
		13. Jumlah SMP Terbuka, SD-SMP Satu Atap	667	85.000	Dinas Pendidikan		
		14. Jumlah SBI Jenjang SMP	0	20.000	Dinas Pendidikan		
		15. Alat Praga Untuk SD Unggulan Bertaraf Internasional	45	10.000	Dinas Pendidikan		
		16. Alat Peraga Untuk SMP Unggulan Bertaraf Internasional	26	15.000	Dinas Pendidikan		
b.	Program Pendidikan Menengah dan Tinggi	1. Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	76	80.000	Dinas Pendidikan		
		2. Presentase dayaampung SMA, SMK, MA	89,07	45.000	Dinas Pendidikan		
		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA sederajat	85	90.000	Dinas Pendidikan		
		4. Jumlah anggaran untuk beasiswa jenjang pendidikan menengah dan tinggi	150 Milyar	150.000	Dinas Pendidikan		
		5. Rasio ideal SMA dan SMK	40:60	85.000	Dinas Pendidikan		
		6. Angka melanjutkan perguruan tinggi	25	125.000	Dinas Pendidikan		
		7. Jumlah perguruan tinggi negeri	11	50.000	Dinas Pendidikan		
		8. Jumlah SBI jenjang SMA dan SMK	5	20.000	Dinas Pendidikan		
		9. Jumlah SMA dan SMK unggulan percontohan bertaraf internasional	52	15.000	Dinas Pendidikan		
		10. Jumlah SSN jenjang SMA dan SMK	50	5.000	Dinas Pendidikan		
c.	Program Pendidikan Non Formal	1. Angka Melek Huruf	#REF!	7.000	Dinas Pendidikan		
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	75	30.000	Dinas Pendidikan		
		3. Jumlah lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini	14.400	23.040	Dinas Pendidikan		
		4. Angka partisipasi program paket A	#REF!	30.000	Dinas Pendidikan		
		5. Angka partisipasi program paket B	#REF!	40.000	Dinas Pendidikan		
		6. Angka partisipasi program paket C	#REF!	50.000	Dinas Pendidikan		
		7. Jumlah pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) berkualitas	7,00	25.000	Dinas Pendidikan		
		8. Jumlah kegiatan pendidikan keterampilan berbasis potensi lokal bagi masyarakat	1.500,00	7.000	Dinas Pendidikan		
		9. Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Kursus dan Kelembagaan	2.500,00	5.000	Dinas Pendidikan		
d.	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	1. Jumlah pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK)	19	1.000	Dinas Pendidikan		
		2. Jumlah penyelenggaraan PK dan PLK yang bermutu	10	1.000	Dinas Pendidikan		
e.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Presentase ketersediaan buku teks pelajaran, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)	100	15.000	Dinas Pendidikan		
		2. Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset yang memiliki sinkronisasi kegiatan dengan kegiatan pemerintah	11	5.000	Dinas Pendidikan		
		3. Jumlah fasilitas pembinaan dan pengembangan pendidikan menengah dan tinggi	6	5.000	Dinas Pendidikan		
		4. Jumlah fasilitas penyediaan sumber dan media belajar SMA, SMK	7	5.000	Dinas Pendidikan		
		5. Presentase sekolah terakreditasi	22	5.000	Dinas Pendidikan		
		6. Presentase penyelenggara pendidikan yang memahami manajemen berbasis sekolah (MBS)	70	2.000	Dinas Pendidikan		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Tahun 2014		SKPD Penanggung Jawab		
			Target Kinerja	Pendanaan Pembangunan (Rp. Juta)	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung
1	2	3	5	6	8	9	10
F	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7 Presentase penyelenggara pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan tentang kurikulum	70	2.000	Dinas Pendidikan		
		8 Presentase pelayanan terhadap data/informasi	70	500	Dinas Pendidikan		
		9 Presentase pelaksanaan ujian nasional / ujian sekolah bertaraf internasional (UN/USBN) yang bermutu	100	5.000	Dinas Pendidikan		
		10 Presentase pelayanan perpustakaan sekolah yang berkualitas	87	1.000	Dinas Pendidikan		
		11 Presentase lulusan siswa SMK berdaya saing	53	1.000	Dinas Pendidikan		
		1. Presentase SDM SSN dan SBI SMA/SMK yang kompeten (S1)	30	5.000	Dinas Pendidikan		
		2. Presentase SDM SSN dan SBI SMA/SMK yang kompeten (S2)	25	5.000	Dinas Pendidikan		
		3. Presentase guru berkualitas S1	30	5.000	Dinas Pendidikan		
		4. Presentase guru bersertifikasi	17	5.000	Dinas Pendidikan		
		5 Jumlah pendidik					
		a. Jumlah guru SD	#REF!	50.000	Dinas Pendidikan		
		b. jumlah guru SMP	#REF!	60.000	Dinas Pendidikan		
		c. jumlah tenaga kependidikan SD	#REF!	25.000	Dinas Pendidikan		
		d. jumlah tenaga kependidikan SMP	#REF!	25.000	Dinas Pendidikan		
		6 Presentase guru PK dan PLK yang kompeten	37	1.000	Dinas Pendidikan		
		2	BIDANGKESEHATAN				
a.	Program Upaya Kesehatan	1. Meningkatnya Persentase desa siaga aktif	0,75	600	Diskes,	PKK, Forum, LSM	BPMPD, Setda, BLH BPPKB
		2. Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	0,52	750	Diskes,	PKK, Forum, LSM dan jejaring promkes	Seluruh OPD
		3. Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan jaringannya	0,20	53.200	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		4. Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	30,00	50.000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		5. Ratio Kematian Bayi	2,64	800,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		6. Ratio Kematian Ibu	91	800,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		7. Meningkatnya cakupan persalinan yg ditolong oleh Nakes	100	800,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		8. Cakupan kunjungan Neonatus pertama (KN1)	95	800,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		9. Cakupan pelayanan kesehatan antenatal (K4)	98	800,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		10. Cakupan Kunjungan Neonatus lengkap (KN lengkap)	86	800,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		11. Cakupan Komplikasi Neonatus yang ditangani	35	800,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		12. Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan	7	800,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		13. Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (KF3)	88	800,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		14. Cakupan kunjungan Bayi	87	800,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		15. Cakupan kunjungan Balita	77	800,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		16. Cakupan peserta KB Aktif	86	800,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		17. Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjarangan anak sekolah	93	800,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		18. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas santun lanjut usia	65	800,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		19. Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu tatalaksana pelayanan kesehatan peduli Remaja (PKPR)	90	800,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		20. Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas mampu tatalaksana KTA	77	800,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		21. Cakupan keluarga sadar gizi	100	550,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		22. Menurunnya Prevalensi Gizi buruk menjadi	70,00	550,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		23. Menurunkan Prevalensi balita pendek menjadi	31,50	550,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		24. Cakupan balita naik timbangannya	81	550,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		25. Meningkatnya cakupan balita 6 - 59 bulan mendapat kapsul vitamin A	92	550,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		26. Meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe 90 tablet (Fe 3)	93	550,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		27. Gizi buruk mendapat perawatan sesuai standar	100	550,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		28. Meningkatnya cakupan bayi 0 - 6 bulan mendapat ASI eksklusif	45	550,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		29. Meningkatnya cakupan RT yang mengkonsumsi Garam Beryodium	65	550,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		30. Jumlah kab/kota yang melaporkan penggunaan obat rasional (POR)	26	150,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		31. Jumlah RS pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	17,00	175,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		32. Jumlah kab/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	26	300,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		33. Presentase penggunaan obat generik di sarana pelayanan pemerintah (RSUD)	75,00	100,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		34. Jumlah kab/kota yang melaporkan penggunaan narkotika dan psikotropika dengan software sipnap	26	100,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		35. Presentase produk Alkes yang diuji memenuhi syarat	80,00	200,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		36. Presentase produk obat yang diuji memenuhi syarat	80,00	150,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Tahun 2014		SKPD Penanggung Jawab		
			Target Kinerja	Pendanaan Pembangunan (Rp. Juta)	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung
1	2	3	5	6	8	9	10
		37. Presentase produk kosmetik yang diuji memenuhi syarat	80,00	150,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		38. Presentase produk obat tradisional otrad yang diuji memenuhi syarat	80,00	150,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		39. Presentase produk PKRT yang diuji memenuhi syarat	80,00	150,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		40. Jml sarana Industri Rumah Tangga yg dibina & diawasi	3000	300,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		41. Presentase Usaha Kecil Obat tradisional (UKOT) dibina & diawasi	90,00	175,000	Dinas Kesehatan	Biro Yansos, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan	
		42. Presentase pengobat tradisional mempunyai STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)	38,50	283,000	Dinas Kesehatan		
		43. Presentase pelayanan alternatif dan komplementer di minimal 2 Puskesmas per kabupaten/kota	38,50	283,000	Dinas Kesehatan		
		44. Presentase Puskesmas di kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan program kesehatan olah raga masyarakat	65,80	524,000	Dinas Kesehatan		
b.	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	1. Presentase RS Provinsi yang telah menjadi center of excellence sesuai dengan Bidangnyanya	30,00	1,900	Dinas Kesehatan		
		2. Tingkat pencapaian BPLK sebagai CoE pelayanan penunjang diagnostik dan laboratorium kesehatan masyarakat bertaraf internasional	75,00	200,000	Dinas Kesehatan		
		3. Presentase RS yang mampu melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit TB Paru sesuai standar	30,00	500,000	Dinas Kesehatan		
		4. Presentase RS yang mampu melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit HIV/AIDS Prov Jabar sesuai standar	30,00	550,000	Dinas Kesehatan		
		5. Jml RSD berfungsi sebagai RS rujukan kasus Flu Burung	7	400,000	Dinas Kesehatan		
		6. Terakreditasinya lembaga sertifikasi Sistem Mutu	1	30,000	Dinas Kesehatan		
		7. Jumlah Puskesmas memenuhi Klasifikasi Standar Mutu	5	109,000	Dinas Kesehatan		
		8. Presentase Puskesmas yang memenuhi standar Penilaian kinerja Puskesmas	52,00	5.000	Dinas Kesehatan		
		9. Presentase RS Pemerintah terakreditasi	90,00	81,805	Dinas Kesehatan		
		10. Presentase RS Swasta terakreditasi	75,00	62,255	Dinas Kesehatan		
		11. Presentase UTDC sesuai standar	30,00	13.405	Dinas Kesehatan		
		12. Presentase Puskesmas terakreditasi	30,00	194.220	Dinas Kesehatan		
		13. Presentase Pelayanan Kesehatan dasar terakreditasi	17,50	19.090	Dinas Kesehatan		
		14. Presentase Laboratorium Kesehatan (Labkesda) pemerintah yg terakreditasi	100,00	65.500	Dinas Kesehatan		
		15. Presentase Laboratorium Kesehatan swasta yg terakreditasi	80,00	65.500	Dinas Kesehatan		
		16. Presentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang mendapat izin perndirian	40,00	65.500	Dinas Kesehatan		
		17. Presentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi	40,00	65.500	Dinas Kesehatan		
c.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Presentase kab/kota dengan jumlah desa UCI ≥ 80%	95,00	350,000	Dinas Kesehatan		
		2. Presentase kab/kota yang melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular	80,00	1.000	Dinas Kesehatan	Bappeda, Biro Yansos, Dishub, Disdik	Dinsos, RS
		3. Jumlah kab/kota yg menyelenggarakan sero survei pada kelompok risiko tinggi.	22	440	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja	Satpol PP, Kepolisian, Kom isi
		4. Proporsi kab/kota dg kelengkapan laporan surveilans terpadu ≥ 90%	100,00	100	Dinas Kesehatan		
		5. Proporsi kab/kota dg kelengkapan laporan mingguan W2 ≥ 80%	92,00	100	Dinas Kesehatan		
		6. Proporsi kab/kota dg AFP rate ≥ 2/100.000 anak bawah 15th	100,00	100	Dinas Kesehatan		
		7. Proporsi kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan calon dan jemaah haji 100% (Kepmenkes 422 th.2009, ttg Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji)	100,00	100	Dinas Kesehatan		
		8. Case Detection Rate TB	80,00	54,700	Dinas Kesehatan		
		9. Cure Rate (angka kesembuhan) penderita TB BTA dan kasus baru	87,00	7.500	Dinas Kesehatan		
		10. kesembuhan penderita TB yang berobat ke BKPM	85,00	5.000	Dinas Kesehatan		
		11. Kunjungan pasien TB ke BKPM	100,00	5.000	Dinas Kesehatan		
		12. BKPM menjadi CoE TB Prov Jabar	100,00	5.000	Dinas Kesehatan		
		13. Proporsi kab/kota dengan angka kesakitan demam berdarah (DBD) < 55/100.000.	65,00	100	Dinas Kesehatan	RS	BPMPD
		14. Proporsi kab/kota dengan angka kematian (DBD) <1%.	77,00	100	Dinas Kesehatan		
		15. Proporsi penderita flu burung yg ditemukan dan ditangani	100,00	120	Dinas Kesehatan	Disnask, Depdagri, Setda	disnask kab/kota,
		16. Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk	< 0,9‰	2.000	Dinas Kesehatan		
		17. Presentase Kabupaten kota > 15 Puskesmas yang menangani pelayanan kesehatan jiwa	77,00	250	Dinas Kesehatan		
		18. Presentase Kabupaten kota dengan 50 Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi	74,00	50	Dinas Kesehatan		
		19. Menurunnya kebutaan di Jawa Barat	1,56	1.000	Dinas Kesehatan		
		20. Jumlah Healthy Eye District	7	50	Dinas Kesehatan		
		21. Presentase kabupaten/kota dengan 50% Puskesmas yg melaksanakan kesehatan indra	63,35%	500	Dinas Kesehatan		
		22. Presentase pekerja formal dan informal sehat dan produktif di 4 Puskesmas per kabupaten/kota	57,59%	800	Dinas Kesehatan		
		23. Presentase kabupaten/kota yang mempunyai sentra keperawatan	4,40%	120	Dinas Kesehatan		
		24. Jumlah Pos UKK Percontohan di Kab./Kota	13	3.200	Dinas Kesehatan		
		25. Presentase Puskesmas di Kawasan Industri yang memberikan pelayanan Kesehatan Kerja	5%	20.000	Dinas Kesehatan		
		26. Presentase Pekerja dengan Suspek PAK/PAHK di Puskesmas Kawasan Industri	1%	20.000	Dinas Kesehatan		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Tahun 2014		SKPD Penanggung Jawab		
			Target Kinerja	Pendanaan Pembangunan (Rp. Juta)	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung
1	2	3	5	6	8	9	10
		27. Percontohan pengelolaan ASI ditempat kerja	2	5.000	Dinas Kesehatan		
		28. Proporsi kab/kota dgn kelengkapan laporan KLB < 24 jam	90%	100	Dinas Kesehatan		
		29. Proporsi kab/kota dgn kelengkapan laporan STP KLB ≥ 90%.	95%	100	Dinas Kesehatan		
		30. Tertanggulangnya masalah kesehatan akibat bencana (tidak terjadi KLB penyakit di lokasi bencana)	95%	100	Dinas Kesehatan		
		31. Persentase kab/kota dengan cakupan imunisasi Campak ≥ 100%	95%	100	Dinas Kesehatan		
		32. Menurunnya Case Fatality Rate Diare saat KLB	<1%	1.000	Dinas Kesehatan		
		33. Microfilaria rate < 1%	<1%	450	Dinas Kesehatan		
		34. Meningkatnya kab/kota dengan prevalensi kusta < 1/10.000 pddk	23	500	Dinas Kesehatan	Bappeda, Yansos, Dinsos	Disdik, Disnak, KUKM
		35. Menurunnya proporsi cacat tingkat 2 pada penderita kusta baru	9	600	Dinas Kesehatan		
		36. Proporsi Kab/Kota dengan Cakupan Pneumonia balita 86%	25	1.000	Dinas Kesehatan		
		37. Kasus rabies yang ditemukan dan ditatalaksana sesuai Standar	90	1.000	Dinas Kesehatan	Disnak, Depdagri, Setda	disnak kab/kota,
		38. Kasus anthraks yang ditemukan dan ditatalaksana sesuai Standar	80	1.000	Dinas Kesehatan	Disnak, Depdagri, Setda	disnak kab/kota,
		39. Kasus pes pada manusia yang ditemukan dan ditatalaksana sesuai Standar	80	1.000	Dinas Kesehatan	Disnak, Depdagri, Setda	disnak kab/kota,
		40. Proporsi Kab/Kota yg cakupan pelayanan Diare 100%	50	1.000	Dinas Kesehatan		
		41. Kasus leptospirosis pada manusia	80	1.000	Dinas Kesehatan	Disnak, Depdagri, Setda	disnak kab/kota,
		42. Persentase Kabupaten/Kota dengan Rapid Health Assesment (RHA) Bencana ≥ 80 %	82	100	Dinas Kesehatan		
		43. Proporsi Kabupaten kota yang melaksanakan manajemen faktor risiko	80	3.500	Dinas Kesehatan		
		44. Proporsi pembinaan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan di sasaran prioritas provinsi	85	3.500	Dinas Kesehatan		
		45. Proporsi kab yang dibina dalam penerapan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	100	60.000	Dinas Kesehatan		
d.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah RSD mampu PONEK	80	5.000	Dinas Kesehatan		
		2. Jumlah Puskesmas mampu PONEK	485	75.000	Dinas Kesehatan		
e.	Program Sumber Daya Kesehatan	1. Prosentase puskesmas ada dokter min 2	34,44	18.900	Dinas Kesehatan		
		2. Prosentase Puskesmas Poned ada dokter min 3	36,31	18.900	Dinas Kesehatan		
		3. Prosentase puskesmas ada dokter gigi minimal 1	62,00	1.134	Dinas Kesehatan		
		4. Prosentase puskesmas ada perawat min 7	55,00	2.460	Dinas Kesehatan		
		5. Prosentase puskesmas ada tenaga Perawat Gigi minimal 1	74,00	240	Dinas Kesehatan		
		6. Prosentase puskesmas ada tenaga bidan min 3	94,00	2.460	Dinas Kesehatan		
		7. Prosentase Puskesmas Poned ada bidan min 7	13,00	2.460	Dinas Kesehatan		
		8. Prosentase puskesmas ada tenaga nutrisonis minimal 1	70,00	640	Dinas Kesehatan		
		9. Prosentase puskesmas ada tenaga sanitarian minimal 1	72,00	640	Dinas Kesehatan		
		10. Prosentase puskesmas ada tenaga epidemiologi minimal 1	14	640	Dinas Kesehatan		
		11. Prosentase puskesmas ada tenaga PKM minimal 1	24	640	Dinas Kesehatan		
		12. Prosentase puskesmas ada tenaga Apoteker minimal 1	9	1.134	Dinas Kesehatan		
		13. Prosentase puskesmas ada tenaga Analis Kesehatan minimal 1	37,00	640	Dinas Kesehatan		
		14. Prosentase RSUD ada tenaga spesialis 4 dasar & 4 penunjang	40	2.880	Dinas Kesehatan		
		15. Prosentase PKM PONEK mendapat pembinaan Dokter Spesialis /PPDS	5	1.200	Dinas Kesehatan		
		16. Prosentase desa tersedia tenaga bidan	95	2.460	Dinas Kesehatan		
		17. Jml tenaga kesehatan teladan/ berprestasi	15	1.900	Dinas Kesehatan		
		18. Meningkatnya prosentase tenaga kesehatan berpendidikan minimal D3	70	3.500	Dinas Kesehatan		
		19. Meningkatnya prosentase tenaga kesehatan berpendidikan minimal S-1	47	3.700	Dinas Kesehatan		
		20. Prosentase peserta uji kompetensi tenaga Kes. Tertentu sesuai usulan	100	800	Dinas Kesehatan		
		21. Prosentase Penerbitan SK PAK jafung tenaga kesehatan provinsi sesuai usulan	100	30	Dinas Kesehatan		
		22. Prosentase Penerbitan registrasi tenaga kesehatan tertentu sesuai usulan	100	180	Dinas Kesehatan		
		23. Prosentase institusi Nakes yang difasilitasi sesuai usulan	100	180	Dinas Kesehatan		
		24. Prosentase Penerbitan surat tugas dokter spesialis yang diusulkan	100	78	Dinas Kesehatan		
		25. Prosentase pelatihan yg dilaksanakan di Bapelkes terakreditasi	100	1.000	Dinas Kesehatan		
		26. Prosentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional di Bapelkes	100	7.100	Dinas Kesehatan		
		27. Prosentase Diklat di Bapelkes yang telah dilakukan evaluasi pasca pelatihan	30	100	Dinas Kesehatan		
		28. Jumlah Kab/Kota terpenuhi 36 obat esensial	26	2.700	Dinas Kesehatan	DINAS KESEHATAN KAB/KOTA	
		29. Prosentase ketersediaan OGB di sarana distribusi	60	2.150	Dinas Kesehatan	RSUD DAN APOTEK	
3	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Tahun 2014		SKPD Penanggung Jawab		
			Target Kinerja	Pendanaan Pembangunan (Rp. Juta)	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung
1	2	3	5	6	8	9	10
a.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Kriteria mutu air (kelas peruntukan air)	Kriteria mutu air kelas 4 (TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 65mg/L, fecal coli 850.000/100ml)	15.000	BPLHD	Diskimrum, Disperindag, Dinas ESDM, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Dinas PSDA, Dinas KLHK	
		2. Kualitas udara berkategori baik di kota-kota besar berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	55	1.000	BPLHD	Disperindag, Dinas Perhubungan	
		3. Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan	25	2.000	BPLHD	Disperindag, Dinas Kesehatan, Dinas ESDM, Dinas Pertanian, Dinas KLHK	
b.	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Prosentasi Lahan Kritis (%)	15	25.000	Dinas Kehutanan	Biro Binprod, Biro Yansos	
		2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi (%)	10	2.000	Dinas Kehutanan	Biro Yansos	Biro Binprod
		3. Luas kawasan hutan mangrove dan hutan pantai yang direhabilitasi (Hektar)	1740	5.000	Dinas Kehutanan	BPLHD, Dinas Perikanan dan Kelautan	Biro Binprod, Biro Yansos
c.	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	1	500	BPLHD	Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Diskimrum,	Bappeda, Dinas PSDA, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
4.	BIDANG PEKERJAAN UMUM						
a.	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;	1. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	99,05	1.281.093	Dis Bina Marga	Bappeda, Biro Adbang, Biro Adrek	
		2. Tingkat Indeks Aksesibilitas	0,97619	273.734	Dis Bina Marga	Bappeda, Biro Adbang, Biro Adrek	
b.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;	1. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	99,05	336.024	Dis Bina Marga	Bappeda, Biro Adbang, Biro Adrek	
c.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;	1. Tingkat ketersediaan sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan	65,00	15.000	Dis Bina Marga	Bappeda, Biro Adbang, Biro Adrek	
d.	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;	1. Tingkat ketersediaan informasi jalan dan jembatan	100	2.200	Dis Bina Marga	Bappeda, Biro Adbang, Biro Adrek	
e.	Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya;	1. Meningkatnya ketersediaan air permukaan pada sumber air	41,59	352.000	Dinas PSDA	Dinas Kehutanan, Diskimrum, BPLHD	Bappeda, Biro Adbang, Biro Adrek
f.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1. Tingkat kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi	68,50	312.500	Dinas PSDA	Dinas Pertanian	Bappeda, Biro Adbang, Biro Adrek
		2. Intensitas tanam padi	>200	10.000	Dinas PSDA	Dinas Pertanian	Bappeda, Biro Adbang, Biro Adrek
g.	Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai;	1. Berkurangnya lokasi banjir di Jawa Barat	33,33 (4 titik)	PM	Dinas PSDA, BBWS Citarum, BBWS Cimanuk, BBWS Citanduy, BBWS Cidahu	Dinas Kehutanan, Diskimrum, BPBD	Bappeda, Biro Adbang, Biro Adrek
h.	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	1. Tingkat cakupan layanan air minum	62,5	3.331.169	Diskimrum	Dinas PSDA, Dinas ESDM	BPMPD
		2. Jumlah Pemanfaatan air bersih bersumber dari air tanah dalam dan di wilayah rawan air	17,00	2.000	Dinas ESDM	Diskimrum	
		3. Tingkat cakupan layanan air limbah domestik	65,00	40.000	Diskimrum	BPLHD	
		4. Tingkat cakupan layanan persampahan	67,00	35.000	Diskimrum	BPLHD	
		5. Tingkat kinerja Drainase (kawasan dengan genangan lebih dari 30 cm, selama 2 jam di seluas 20 Ha)	90,00	10.000	Diskimrum	Dinas Binamarga	
		6. Tingkat ketersediaan landasan hukum dan peraturan/NSPK daerah bidang permukiman untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan administrasi teknis	58,00	1.000	Diskimrum		
i.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1. Tingkat sertifikasi tukang/pekerja konstruksi	30,00	1.480	Diskimrum		
		2. Tingkat ketersediaan NSPK Jasa Konstruksi	100,00	750	Diskimrum		
		3. Tingkat tertib administrasi teknis dalam pengelolaan dan pembangunan gedung negara, khususnya dengan pelayanan administrasi/teknis pengalihan status dan pengalihan hak, penaksiran/penilaian bangunan serta pendataan teknis bangunan gedung	100,00	1.500	Diskimrum		
5.	BIDANG PENATAAN RUANG						
	Program Penataan Ruang	1. Tingkat Penanganan Perda KSP	38,00	900	Diskimrum	Bappeda	
		2. Tingkat penanganan Perda RDTR kab/kota	66,66	500	Diskimrum	Bappeda	
		3. Tingkat penanganan Rencana Strategis PKW	33,00	600	Diskimrum	Bappeda	
6.	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
a.	Program Kerjasama Pembangunan	1. Jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri		4.000	Biro Ottda & KS	Bappeda	Semua OPD
		a. Kerjasama antar daerah	6				
		b. Kerjasama antar provinsi	10				
		c. Kerjasama Luar Negeri	3				
		2. Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri		5.000	Biro Ottda & KS	Bappeda	
		a. Perguruan Tinggi	3				

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Tahun 2014		SKPD Penanggung Jawab		
			Target Kinerja	Pendanaan Pembangunan (Rp. Juta)	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung
1	2	3	5	6	8	9	10
		b. BUMD/BUMN	3				
		c. Swasta	2				
		c. LSM	3				
		3. Tingkat kesesuaian antara komitmen kerjasama dengan implementasi	60	1.000	Biro Otda & KS	Bappeda	
b.	Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	1. Tersedianya pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	15	4.000	Bappeda		
		2. Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan	95	1.000	Bappeda		
		3. Tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi	90	1.000	Bapped, Inspektora	Biro Administrasi Pembangunan, BKPP	
		4. Jumlah temuan penyimpangan	20	1.000	Bappeda		
		5. Jumlah tindak lanjut temuan penyimpangan	80	500	Bappeda		
		6. Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan provinsi dengan pusat dan kab/kota	75	2.000	Bappeda	BKPP, Kantor Perwakilan, Biro Adbang, BPPT	Semua OPD
		7. Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah : spasial dan sektoral	95	1.000	Bappeda		
		8. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah	75	1.000	Bappeda		
7.	BIDANG PERUMAHAN						
a.	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Tingkat penurunan kawasan kumuh	3,79	10.000	Diskimrum	Dinas Kesehatan	BPMPD
		2. Tingkat penurunan rumah tidak layak huni	8,47	379.900	Diskimrum	BPMPD	
8.	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
a.	Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda	1. Jumlah sarpras kepemudaan yang memenuhi standar mutu	12	1.000	Disorda		
		2. Jumlah lembaga dan organisasi kepemudaan terbina	1	650	Disorda		
b.	Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga	1. Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu	4	400	Disorda		
		2. Presentase partisipasi masyarakat dalam berolahraga	85	2.000	Disorda		
		3. Jumlah olahragawan berprestasi secara berkelanjutan	30	600	Disorda		
		4. Jumlah tenaga keolahragaan berkualitas	30	500	Disorda		
		5. Jumlah sarana olahraga untuk pusat dan pertandingan, diantaranya pembangunan West Java Stadion berkualitas	9	175	Disorda		
9.	BIDANG PENANAMAN MODAL						
	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	1. Jumlah calon investor yang memperoleh informasi mengenai peraturan ketentuan penanaman modal di Jawa Barat	175	400	BKPPMD		
		2. Jumlah pelaksanaan forum investor Jawa Barat	2	350	BKPPMD		
		3. Prosentase kepastian & ketepatan biaya pelayanan perizinan	1100	350	BKPPMD		
		4. Presentase ketepatan waktu pelayanan perizinan	97	400	BKPPMD		
		5. Jumlah perusahaan (PMA/PMDN) yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	700	650	BKPPMD		
		6. Persentase penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN	25	650	BKPPMD		
		8. Jumlah <i>promotion business center</i> yang representatif	100	500	BKPPMD		
		9. Jumlah sarana promosi investasi (event, skala, bentuk)	16	3.500	BKPPMD		
		10. Persentase peserta business meeting/event promosi BKPPMD yang menindaklanjuti	20	3.000	BKPPMD		
		11. Jumlah kerjasama investasi <i>Government to Government, Private to Government, Private to Private</i>	2	750	BKPPMD		
10.	BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						
a.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1. Jumlah KUMKM yang mengikuti promosi dan pameran KUMKM	600	3.000	KUMKM		
		2. Jumlah KUMKM yang mempunyai Akses permodalan ke lembaga keuangan mikro per tahun	300	2.500	KUMKM		
		3. Jumlah Pemantapan dan Pengembangan wirausaha per tahun	5000	1.000	KUMKM		
		4. Jumlah wirausaha yang berdaya saing per tahun	250	600	KUMKM		
		5. Tingkat penyerapan tenaga kerja per tahun	40000	300	KUMKM		
b.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1. Kualitas kelembagaan Koperasi pertahun	200	2.000	KUMKM		
		2. Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi	1150	750	KUMKM		
		3. Jumlah KUMKM terhadap Akses terhadap teknologi tepat guna per tahun	1200	100	KUMKM		
		6. Tingkat kapasitas SDM KUMKM per tahun	5800	1.800	KUMKM		
c.	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Bank	1. Pertumbuhan PAD yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10	1.000	Biro Admrek	KUMKM	
		2. Jumlah kredit yang disalurkan PD. BPR dan PD. PK	925.9	850	Biro Admrek	KUMKM	
11.	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						
a.	Program Penataan Administrasi Kependudukan;	1. Laju Pertumbuhan Penduduk	1,77	1.500	BPPKB		
		Jumlah Sektor yang Melaksanakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	3		BPPKB		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Tahun 2014		SKPD Penanggung Jawab		
			Target Kinerja	Pendanaan Pembangunan (Rp. Juta)	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung
	1	2	5	6	8	9	10
12.	BIDANG KETENAGAKERJAAN						
a.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan perwujudan peningkatan kualitas dan produktivitas	462	1.135	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		2. Jumlah kegiatan tersertifikasi Tenaga Kerja	396	921	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		3. Jumlah peserta pemagangan Dalam Negeri dan Seleksi Magang ke Jepang	602	743	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		4. Jumlah lembaga Pelatihan kerja swasta dan pemerintah yang di akreditasi	40	130	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		5. Pelatihan Berbasis Masyarakat Melalui Mobile Training Unit	68	2.823	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		6. Pelatihan Alih Profesi Bidang Jasa (Dampak pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kab. Majalengka)	22	2.442	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		7. Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi	400	3.700	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		8. Jumlah Calon Pencari Kerja ke Luar Negeri yang mengikuti pelatihan	1000	8.437	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
b.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	85	1.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		2. Persentase pemberdayaan sarana hubungan industrial	50	900	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		3. Tingkat Ketersediaan sistem pengupahan	1	850	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		4. Jumlah koperasi Pekerja/Buruh dan usaha produktif di perusahaan	12	1.560	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		5. Pemeriksaan perusahaan	772	426	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		6. Kelembagaan K3 di perusahaan	226	432	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		7. Jumlah Ahli K3 di perusahaan	420	3.200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		8. Petugas P3K di Perusahaan	41	63	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
c.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Jumlah Calon Tenaga Kerja yang mengikuti Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (PBJ)	3000	75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		2. Jumlah Kegiatan Bursa Kerja (job fair)	4	920	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		3. Pembinaan Terhadap Bursa Kerja Khusus	250	375	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		4. Layanan Antar Kerja dan Konseling	60	246	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		5. Pendataan Informasi Pasar Kerja (IPK)	27	627	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		6. Padat Karya Infrastruktur	6000	3.650	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		7. Padat Karya Produktif	200	897	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		8. Pembekalan Antar Kerja Lokal (AKL)	300	1.200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		9. Pembekalan Tenaga Kerja Penyandang Cacat	80	300	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		10. Jumlah Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mengikuti Diseminasi Informasi Ketenagakerjaan Luar Negeri	1300	920	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		11. Tingkat penanganan kasus TKI	15	250	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		12. Pembinaan terhadap Purna TKI	170	230	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		13. Pembinaan terhadap Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS)	140	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
13	BIDANG KETAHANAN PANGAN						
a.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Jumlah cadangan pangan pemerintah	400 ton	4.000	BKPD		
		2. Tingkat Ketersediaan Informasi, harga dan akses pangan	100	2.000	BKPD		
		3. Konsumsi Beras perkapita	90,16	10.000	BKPD		
		4. Tingkat Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	70	2.000	BKPD		
		5. Tingkat Penanganan Daerah rawan pangan	72,50	25.000	BKPD		
14	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
a.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1. Indeks Pemberdayaan Gender	67,07	750	PPKB		
		2. Indeks Pembangunan Gender	63,00	1.000	PPKB		
		3. Jumlah sektor yang menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)	10	3.000	PPKB		
		Data Terpilah Gender dan Anak	2	500	PPKB		
		Jumlah Kelembagaan Pokja PUG	17	750	PPKB		
		Produk Hukum PUG		750	PPKB		
		KepGub/Kep. Bupati/Kep. Walikota	17				
		PerGub/Peraturan Bupati/ Peraturan Walikota	17				
		Dukungan Jejaring/Kelembagaan Perempuan	90	750	PPKB		
b.	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindunganPerempuan dan anak	4. Jumlah Kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang berusaha	398	4.000	PPKB		
		5. Jumlah Desa/Kelurahan P2WKSS	157	2.000	PPKB		
		6. Prosentase anggota parlemen perempuan	30	500	PPKB		
		7. Prosentasi kasus kekerasan terhadap perempuan	0	1.000	PPKB		
		8. Jumlah kasus trafficking (perempuan) yang tertangani	309	3.500	PPKB		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Tahun 2014		SKPD Penanggung Jawab		
			Target Kinerja	Pendanaan Pembangunan (Rp. Juta)	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung
	1	2	5	6	8	9	10
		9. Jumlah P2TP2A	53	260	PPKB		
		1. Jumlah Kota Layak Anak	106	500	PPKB		
		2. Jumlah Forum Anak Daerah	53	500	PPKB		
		3. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	15	1.000	PPKB		
		4. Jumlah Sekolah Ramah Anak	52	5.000	PPKB		
		5. Jumlah Rumah Sakit Ramah Anak	5	10.000	PPKB		
		6. Jumlah Tempat Penitipan Anak (TPA)	27	500	PPKB		
15	BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA						
a.	Program Keluarga Terencana	1. Prosentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur	64,60	5.000	BPPKB		
		2. Prosentase Peserta KB Mandiri	50,00	6.000	BPPKB		
		3. Prosentase Peserta KB Pria	4,15	500	BPPKB		
		4. Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	19,8	500	BPPKB		
		5. Jumlah Kelompok Generasi Berencana	158	500	BPPKB		
		6. Jumlah Kelompok Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera yang Memiliki Usaha	150	1.000	BPPKB		
		7. Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita	1277	500	BPPKB		
16	BIDANG PERHUBUNGAN						
a.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	1. Tingkat ketersediaan transportasi massal (MRT, Monorail, KA, Bus)	6	20.000	Dishub	Bappeda, Biro Admrek, Biro Admbang	Dinas Bina Marga
		2. Tingkat Kecepatan (km/jam)	22	500	Dishub	Bappeda, Biro Admrek, Biro Admbang	Dinas Bina Marga
		3. Tingkat pelayanan transportasi udara	#REF!	20.000	Dishub	Bappeda, Biro Admrek, Biro Admbang	
		4. Tingkat penyelesaian pembebasan lahan BJB Kertajati	49,94	300.000	Dishub	Bappeda, Biro Admrek, Biro Admbang	Diskimrun, PSDA, ESDM,
		5. Tingkat penataan lahan Bandara Nusawiru Ciamis	100,00	150.000	Dishub	Bappeda, Biro Admrek, Biro Admbang, Biro PBD, Biro Adpem	
		6. Tingkat ketersediaan transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya	#REF!	15.000	Dishub	Bappeda, Biro Admrek, Biro Admbang	
b.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Tingkat ketersediaan fasilitas LLAJ	18	20.000	Dishub	Bappeda, Biro Admrek, Biro Admbang	Dinas Bina Marga
c.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1. Tingkat kenyamanan angkutan (AKAP/AKDP)	32	1.500	Dishub	Bappeda, Biro Admrek, Biro Admbang, BPPT	
d.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;	1. Tingkat kecelakaan angkutan umum	1,50	1.000	Dishub	Bappeda, Biro Admrek, Biro Admbang	
e.	Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor;	1. Tingkat Kelaikan kendaraan bermotor (Administrasi)	#REF!	700	Dishub	Bappeda, Biro Admrek, Biro Admbang	
17.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
a.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah	100	1.500	Diskominfo	Semua OPD	
		2. Tingkat pelayanan data dan informasi perencanaan dan pembangunan	90	2.000	BPPT, Diskominfo	Biro Organisasi, Dispenda, Biro HPU,	
		3. Jumlah Penyebaran informasi melalui media	26	1.000	Diskominfo		
		4. Tingkat jaringan data yang terlayani	100	3.000	Diskominfo		
		5. Jumlah infrastruktur pendukung penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	26	700	Diskominfo		
		6. Jumlah aplikasi data	10	1.000	Diskominfo		
		7. Tingkat konten pada situs website Jabarprov Pemerintahan Provinsi	85	1.000	Diskominfo		
		8. Jumlah lokasi yang terlayani dengan jaringan komunikasi data	360	1.000	Diskominfo		
		9. Persentase Penyelesaian Proses Perizinan Penyiaran	292	67	KPID		
		10. Prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap isi penyiaran	100	500	KPID		
		11. Jumlah SDM Penyiaran Daerah yang memiliki kemampuan dan kecakapan	600	300	KPID		
		12. Jumlah Sosialisasi literasi (melek siaran) pada masyarakat	26	200	KPID		
		13. Tingkat penyebaran Informasi kepada masyarakat	375	419	KPID		
		14. Jumlah referensi teknologi informasi dan penyiaran	300	150	KPID		
		15. Jumlah Program siaran yang berkualitas	1	313	KPID		
		16. Tingkat fasilitasi koordinasi antar stake holder penyiaran di Jawa Barat	8	200	KPID		
		17. Tersedianya analisa terhadap pemberitaan di media massa dan audit media sebagai penunjang pelaksanaan publikasi dan bahan rujukan pengambilan keputusan	100	100	KPID		
		18. Terjalinya hubungan saling membutuhkan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Serta Media Massa	26	150	Diskominfo		
18.	BIDANG PERTANAHAN						
a.	Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	1. Persentase luas lahan bersertifikat dari keseluruhan luas lahan pemprov	95	3.000	Biro PBD	Biro Pemum	
		2. Tingkat penyelesaian sengketa pertanahan	85	3.000	Biro PBD	Biro Pemum	
19.	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI						
a.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1. Tingkat penyelenggaraan pendidikan partai politik	70	500	Bakesbang		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Tahun 2014		SKPD Penanggung Jawab		
			Target Kinerja	Pendanaan Pembangunan (Rp. Juta)	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung
1	2	3	5	6	8	9	10
		2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	90	500	Bakesbang		
		3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	90	500	Bakesbang		
		4. Tingkat penyelenggaraan pendidikan politik dasar	70	500	Bakesbang		
		5. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	87	500	Bakesbang		
h.	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1. Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	750	Pol PP	Biro Pemum, Bakesbang	
		2. Rasio jumlah linmas per penduduk	1:312	750	Pol PP		
		3. Rasio Pos Siskamling per desa/kelurahan	1:9	750	Pol PP	Biro Pemum	
		4. Tingkat keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilu	80	750	Pol PP		
		5. Jumlah unjuk rasa	330	750	Pol PP		
		6. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	100	750	Pol PP		
20.	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN						
a.	Program Pematapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;	1. Tingkat ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan urusan	5	1.000	Biro Organisasi	Semua OPD	
		2. Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja	90	1.000	Biro Organisasi		
		3. Proporsi SKPD yang bersertifikat ISO	40	6.000	Semua OPD		
		4. Proporsi SPM pada urusan pemerintahan	30	1.000	Semua OPD		
		5. Proporsi SOP pada SKPD	70	1.000	Semua OPD		
		6. Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	80	500	Semua OPD		
		7. Jumlah regulasi penegeasan batas daearah	2	1.000	Biro Pemum		
		8. Penerapan manajemen standar mutu dan penyederhanaan perijinan	100	1.000	Biro Organisasi		
		9. Penetapan & penerapan standar pelayanan publik & maklumat pelayanan	80	750	Biro Organisasi		
		10. Perluasan Pelaporan Harta Kekayaan	90	1.000	Biro Organisasi		
		11. Tingkat Kesesuaian Organisasi Perangkat Daerah dgn ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan manajemen	90	2.850	Inspektorat		
		12. Gerakan penerapan zona integritas	100	500	Inspektorat		
b.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Tingkat Kinerja aparatur	80	58.000	BKD, Bandiklat	Semua OPD	
		2. Tingkat Kompetensi aparatur	65	58.000	BKD, Bandiklat	Semua OPD	
		3. Proporsi Kesejahteraan Pegawai pada OPD	90	58.000	BKD, Bandiklat	Semua OPD	
		4. Tingkat kehadiran pegawai	100	58.000	Semua OPD		
		Tingkat Kehadiran Pegawai	95		BKD		
		PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	5		BKD		
		Prosentase PNS yang mengikuti diklat aparatur	20		BKD		
		Prosentase PNS yang tugas dan ijin belajar	5		Bandiklatda		
		Prosentasi PNS tersertifikasi keahlian	1		BKD		
		Jumlah PNS yang mendapat Penghargaan	5000		BKD		
		Prosentase pemenuhan formasi Jabatan Fungsional	60		BKD		
		Tingkat kepuasan pengguna layanan dan hasil kerja	60		BKD		
c.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Tingkat Ketrampilan aparatur	100	58.000	Semua OPD		
		2. Tingkat profesionalisme aparatur	100	58.000	Semua OPD		
		3. Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian internal dan eksternal	100	58.000	Semua OPD		
		Prosentase Pegawai mendapatkan fasilitas general Check Up	100		BKD	Semua OPD	
		Prosentase PNS yang mengikuti kegiatan pembinaan Jiwa Korsa	100		BKD	Semua OPD	
		Prosentase PNS yang berkategori kebugaran jasmani baik	70		BKD, Dinkes	Semua OPD	
d.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	100	366.000	Semua OPD		
		2. Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat	100	183.000	Semua OPD		
e.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah	100	183.000	Semua OPD		
		2. Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik	55	183.000	Semua OPD		
f.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana oprasional SKPD/Balai/UPT/UPTD	100	137.250	Semua OPD		
		2. Tingkat kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat	100	137.250	Semua OPD		
g.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM	1. Jumlah Raperda yang diagendakan dalam prolegda	20	1.000	Biro Hukum		
		2. Jumlah Produk hukum sebagai tindak lanjut peraturan perundang-undangan	1.000	1.000	Biro Hukum		
		3. pengharmonisasian produk hukum Provinsi dan produk hukum Kabupaten/Kota	160	750	Biro Hukum		
		4. Jumlah penyelesaian perkara/sengketa perdata, pidana, TUN dan HAM secara Litigasi dan Non Litigasi	45	1.000	Biro Hukum		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Tahun 2014		SKPD Penanggung Jawab		
			Target Kinerja	Pendanaan Pembangunan (Rp. Juta)	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung
	1	2	5	6	8	9	10
		5. Tingkat pendokumentasian dan penginformasian produk hukum	80	1.000	Pol PP		
		6. Tingkat kesadaran hukum dan penataan hukum masyarakat serta penegakan perda dan peraturan pelaksanaannya	0,98	1.000	Pol PP		
h.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1. Jumlah PERDA yang disetujui	13	1.000	Setwan	Biro Pemum	
		2. Jumlah PERDA inisiatif	8	1.000	Setwan		
		3. Jumlah rapat kerja inisiatif dewan	150	1.500	Setwan		
		4. Tingkat Produktivitas kinerja anggota DPRD	100	3.000	Setwan	Semua OPD	
i.	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	1. Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.	25	10.000	Biro PBD	Semua OPD	
		2. Jumlah aset yang diamankan	629	10.000	Biro PBD		
		3. Prosentase aset yang sudah terinventarisir	100	1.000	Biro PBD		
		4. Prosentase sistem dan prosedur pengelola keuangan daerah	100	1.000	Biro Keuangan		
		5. Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran	100	1.000	Biro Keuangan		
		6. Tingkat Pendapatan Daerah:		1.000	Dispenda, Biro Keuangan	OPD yang memiliki UPTD Penghasil	Biro Keuangan
		a. PAD	82,17		Dispenda, Biro Keuangan		
		b. Dana Perimbangan	19,32		Dispenda, Biro Keuangan		
		c. Sumber lainnya yang sah	0,12		Dispenda, Biro Keuangan		
		6. Efektivitas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau	75	750	Dispenda, Biro Keuangan		
j.	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD	100	5.800	Semua OPD		
		2. Tingkat ketersediaan dokumen operasional	100	5.800	Semua OPD		
21.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
a.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa	1. Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	130	1.000	BPMPD	Bakesbang	
		2. Tingkat keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	90	1.000	BPMPD		
		3. Jumlah LSM	230	500	BPMPD		
		4. Jumlah ormas	450	500	BPMPD		
		5. Tingkat keterlibatan LSM dan ormas dalam penetapan kebijakan	87	500	BPMPD		
		6. Revitalisasi posyandu	45	506.880	BPMPD		
		7. Jumlah BUMDES yang sudah diperdeskan	5.000	750	BPMPD		
		8. Jumlah pos pelayanan teknologi tepat guna	26	3.000	BPMPD		
b.	Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	1. Tingkat kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa	60	536.200	BPMPD	Biro Pemum	
		2. Tingkat pelayanan pemerintahan desa terhadap masyarakat	85	1.000	BPMPD		
		3. Tingkat Tertib pengelolaan dokumen Administrasi pemerintahan desa	85	2.000	BPMPD		
		4. Persentase desa berprestasi	95	1.000	BPMPD		
		6. Jumlah desa/kelurahan berprestasi	40	4.000	BPMPD		
		7. Tingkat kemampuan perangkat desa dalam mengelola pemerintahan desa	60	750	BPMPD		
22.	BIDANG SOSIAL						
a.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;	1. Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi serta peran	2.189	25.000	Dinas Sosial		
		2. Jumlah PMKS terlayani dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya	350	20.000	Dinas Sosial		
b.	Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);	1. Jumlah jaminan sosial yang diberikan	6		Dinas Sosial		
		2. Tingkat partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (karang taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial)		2.000	Dinas Sosial		
		a. Karang Taruna	35				
		b. Pekerja Sosial	35				
		c. Organisasi Sosial	45				
		3. Jumlah pekerja sosial yang memiliki pengetahuan dan kemampuan secara profesional	420	750	Dinas Sosial		
		4. Jumlah sumber dana sosial	6	15.000	Dinas Sosial		
		5. Jumlah masyarakat yang diberi pemahaman tentang pembangunan kesejahteraan sosial melalui peyuluhan sosial	550	500	Dinas Sosial		
		6. Jumlah PKRI/Janda PKRI dan Keluarga pahlawan tersantuni serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejujuran, dan kesetiakawanan sosial		1.500	Dinas Sosial		
		a. PKRI	211				
		b. Janda PKRI	6				
		c. Keluarga Pahlawan	5				
c.	Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;	1. Jumlah eks korban bencana yang mendapat bantuan bahan bangunan rumah	133	5.000	BPBD	Diskimrum, PU, Dinsos	Dinkes, BPLHD.
		2. Jumlah anggaran persediaan bantuan langgap darurat bencana	9,8	10	BPBD	Diskimrum, PU, Dinsos	Dinkes, BPLHD.
		3. Tingkat partisipasi si pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana	50	2.000	BPBD	Diskimrum, PU, Dinsos	Dinkes, BPLHD.
		4. Tingkat upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim oleh kab/kota	4	3.000	BPBD	Diskimrum, PU, Dinsos	Dinkes, BPLHD.

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Tahun 2014		SKPD Penanggung Jawab		
			Target Kinerja	Pendanaan Pembangunan (Rp. Juta)	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung
	1	2	5	6	8	9	10
		5. Presentase ketahanan masyarakat terhadap bencana	60	4.000	BPBD	Diskimrum, PU, Dinsos	Dinkes, BPLHD.
		6. Jumlah sumber daya penanggulangan bencana berkualitas	100	2.000	BPBD	Diskimrum, PU, Dinsos	Dinkes, BPLHD.
		7. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana	45	500	Bakesbang	Biro Pemum	
22.	BIDANG KEBUDAYAAN						
a.	Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Tingkat apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah	60	1.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
		2. Persentase pemanfaatan nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah	70	1.500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
b.	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	1. Persentase pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat	90	5.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
		2. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bidang seni dan budaya;	8	6.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
		3. Tingkat apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta;	80	2.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
		4. Jumlah sarana dan prasarana gelar karya dan kreativitas seni budaya daerah yang representatif.	12	10.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
24.	BIDANG STATISTIK						
a.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1. Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah	12	3.000	Bappeda	Diskominfo, KPID, BPPT	Semua OPD
		2. Tingkat Pengelolaan Satu Data Pembangunan di Jawa Barat	100	4.000	Bappeda		
25.	BIDANG KEARSIPAN						
a.	Program Pengembangan Kearsipan	1. Tingkat kelengkapan administrasi kearsipan	60	1.000	Bapusipda	Semua OPD	
		2. Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan	30	1.500	Bapusipda	Semua OPD	
		3. Tingkat penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pelestarian dokumen/arsip daerah	30	700	Bapusipda	Semua OPD	
		4. Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah	30	500	Bapusipda	Semua OPD	
		5. Tingkat keterbukaan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat	25	250	Bapusipda	Semua OPD	
		6. Tingkat ketersediaan pusat arsip OPD	60	2.500	Bapusipda	Semua OPD	
		7. Tingkat ketersediaan khasanah arsip bernilai sejarah	30	500	Bapusipda	Semua OPD	
		8. Tingkat Pelestarian dan penyelamatan arsip bernilai sejarah	30	1.000	Bapusipda	Semua OPD	
		9. Tingkat pengamanan arsip vital/arsip aset pemda	30	1.000	Bapusipda	Semua OPD	
26.	BIDANG PERPUSTAKAAN						
a.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Presentase kelembagaan teknis perpustakaan desa/keurahan di Jawa Barat	11	750	Bapusipda		
		2. Presentase sumber daya manusia pengelola perpustakaan desa/keurahan di Jawa Barat	35	500	Bapusipda		
		3. Presentase koleksi bahan perpustakaan di perpustakaan desa/keurahan di Jawa Barat	35	2.000	Bapusipda		
		4. Presentase pemanfaatan perpustakaan desa/keurahan di Jawa Barat	35	1.000	Bapusipda		
		5. Presentase pemberdayaan perpustakaan umum kabupaten/kota berbasis TIK di Jawa Barat	35	500	Bapusipda		
		6. Presentase pemberdayaan layanan perpustakaan keliling berbasis TIK di Jawa Barat	55	750	Bapusipda		
2.	URUSAN PILIHAN						
27.	BIDANG PERIKANAN						
a.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi Perikanan budidaya melalui :		28.298	Diskanlaut		
		1. Produksi perikanan budidaya tambak	237.176	7.951	Diskanlaut	Dishut	BPPT, BPMD, Indag
		2. Produksi perikanan budidaya kolam	343.714	11.523	Diskanlaut	Distan	BPPT, BPMD, Indag
		3. Produksi perikanan budidaya karamba	595	20	Diskanlaut	Dinas PSDA	BPPT, BPMD, Indag
		4. Produksi perikanan budidaya laut	9.689	325	Diskanlaut	Dishub	BPPT, BPMD, Indag
		5. Produksi perikanan budidaya sawah	30.958	1.038	Diskanlaut	Distan	BPPT, BPMD, Indag
		6. Produksi perikanan budidaya kolam air deras	16.263	545	Diskanlaut	Dinas PSDA	BPPT, BPMD, Indag
		7. Produksi perikanan budidaya jaring apung	224.508	7.526	Diskanlaut	Dinas PSDA, BPLHD	BPPT, BPMD, Indag
b.	Program engembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi Perikanan tangkap melalui :		98.127	Diskanla		
		1. Produksi perikanan laut	180.960	96.127	Diskanlaut	Dishub	BPPT, BPMD, Indag
		2. Produksi perikanan perairan umum	9.150	2.000	Diskanlaut	Dishub, PSDA, BPLHD	BPPT, BPMD, Indag
28.	BIDANG PERTANIAN						
a.	Program Peningkatan Produksi Pertanian	1. Jumlah Produksi Padi	11.705.075	37.593	Distan		
		2. Jumlah Produksi Jagung	1.145.000,00	3.500	Distan		
		3. Jumlah Produksi Kedelai	100.371	3.500	Distan		
		4. Jumlah Produksi Kacang Tanah	129.736	1.361	Distan		
		5. Jumlah Produksi Kacang Hijau	23.874	1.000	Distan		
		6. Jumlah Produksi Ubi Kayu	2.744.300	1.000	Distan		
		7. Jumlah Produksi Ubi Jalar	511.971	750	Distan		
		8. Jumlah produksi Sayuran	3.240.344,98	1.500	Distan		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Tahun 2014		SKPD Penanggung Jawab		
			Target Kinerja	Pendanaan Pembangunan (Rp. Juta)	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung
	1	2	5	6	8	9	10
		9. Jumlah Produksi Buah-buahan	2.988.602,24	2.000	Distan		
		10. Jumlah Produksi Tan. Obat	2.242.196,70	500	Distan		
		11. Jumlah Produksi Tan. Hias	98.788.117,92	1.000	Distan		
		12. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Perkebunan			Disbun		
		a. Jenis Tanaman Tahunan (Teh, Kopi, Karet, Kakao, Kelapa, Cengkeh, Kemiri Sunan)	2	6.000	Disbun		
		b. Jenis Tanaman Semusim (Tebu, Akar Wangi)	2	2.500	Disbun		
		13. Tingkat pemanfaatan benih unggul tanaman perkebunan bersertifikat	4	4.000	Disbun		
		14. Meningkatnya Produksi Peternakan :		27.000	Disnak		
		a. Daging					
		- Jumlah Produksi Daging	731.474	5.000	Disnak		
		b. Telur					
		- Jumlah Produksi Telur	199.620	2.500	Disnak		
		c. Susu					
		- Jumlah Produksi Susu	361.988	2.500	Disnak		
b.	Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian	1. Jumlah Peserta Pelatihan bagi petugas, penyuluh dan petani	200	21.041	Distan		
		2. Jumlah Infrastruktur pertanian:					
		a. Jitit (ha)	1.000	1.250	PSDA	Distan	
		b. Jides (ha)	1.000	1.250	PSDA	Distan	
		3. Kemantapan Kelembagaan Perkebunan	40	2.500	Disbun		
		4. Kesesuaian pemanfaatan sumber daya perkebunan	60	2.500	Disbun		
		5. Jumlah Peserta Pelatihan Bagi Peternak dan Petugas	900	2.900	Disnak		
c.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan	1. Jumlah Luas serangan 9 OPT Utama	116.201	1.320	Distan		
		2. Persentase Luas dan Intensitas serangan OPT tanaman perkebunan	< 10	2.500	Disbun		
		3. Jumlah Kasus Penyakit Hewan :		9.500	Disnak		
		a. Antraks	0	1.500	Disnak		
		b. Flu Burung	72	1.500	Disnak		
		c. Brucellosis	<2%	1.500	Disnak		
		d. Rabies	5	1.500	Disnak		
d.	Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan.	1. Persentase tingkat kehilangan hasil pasca panen padi	11,3	2.500	Distan		
		2. Jumlah Kelompok penerapan sistem jaminan mutu	5	1.000	Distan		
		3. Persentase margin usahatani tanaman pangan dan hortikultura					
		a. Padi	24	500	Distan		
		b. Palawija	22,8	500	Distan		
		c. Sayuran	23	500	Distan		
		4. Jumlah Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu	5,00	1.000	Disnak		
		5. Peningkatan Mutu Hasil, Transaksi dan Kavasitas Usaha Perkebunan	2	5.000	Disbun		
29.	BIDANG KEHUTANAN						
a.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	1. Produksi Kayu Rakyat	2.500.000	500	Dishut	DiskUMKM, Disperindag	Biro Binprod
		2. Peningkatan Produksi Aneka Usaha Kehutanan	10	1.000	Dishut	DiskUMKM, Disperindag	Biro Binprod
		3. Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Lestari	2	1.000	Dishut	DiskUMKM, Disperindag	Biro Binprod
		4. Jumlah Unit Hutan Rakyat bersertifikat lestari	2	1.500	Dishut	DiskUMKM, Disperindag	Biro Binprod
		5. Tingkat Tertib Administrasi Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan	100	500	Dishut	DiskUMKM, Disperindag	Biro Binprod
		6. Tingkat Tertib Administrasi Penatausahaan Hasil Hutan	100	1.000	Dishut	DiskUMKM, Disperindag	Biro Binprod
		7. Peningkatan Penerimaan retribusi TAHURA Ir. H. Djuanda	10	1.000	Dishut	Dispenda, Disparbud, BKPPMD	Biro Binprod
		8. Peningkatan Pengembangan Objek Wisata Alam Hutan	10	1.500	Dishut	Dispenda, Disparbud, BKPPMD	Biro Binprod
		9. Peningkatan Nilai Manfaat Objek Wisata Alam Hutan dan Jasa Lingkungan	200	1.000	Dishut	Dispenda, Disparbud, BKPPMD	Biro Binprod
		10. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Hutan	92	500	Dishut	Dispenda, Disparbud, BKPPMD	Biro Binprod
b.	Program Pengelolaan Kawasan Lindung	1. Persentase luas kawasan lindung	40,1	1.000	BPLHD	Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas	Biro Yansos
		2. Tingkat Perambahan Hutan	0,8	1.000	Dinas Kehutanan	BPLHD, Biro Yansos, Satpol PP, BBKSDA, TN, Perhutani, Polisi	Biro Binprod
30.	BIDANG PERINDUSTRIAN						
a.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1. Jumlah unit usaha industri kecil menengah	255,225	250	Disindag		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Tahun 2014		SKPD Penanggung Jawab		
			Target Kinerja	Pendanaan Pembangunan (Rp. Juta)	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung
	1	2	5	6	8	9	10
		2. Jumlah tenaga kerja industri kecil menengah	2.490.337	250	Disindag		
		3. Jumlah unit usaha Industri dan Dagang Kecil yang difasilitasi	3.596	1.600	Disindag		
		4. Jumlah tenaga kerja Industri dan Dagang Kecil yang difasilitasi	10.377	900	Disindag		
		5. Persentase Tingkat pelayanan usaha IKM	91	400	Disindag		
b.	Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1. Tingkat Koordinasi dan Konsolidasi Industri	26	3.000	Disindag		
		2. Jumlah Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk industri	1.725	850	Disindag		
		3. Jumlah penyerapan tenaga kerja oleh industri besar	4.525.337	250	Disindag		
		4. Persentase peningkatan produktivitas industri	92,50	1.600	Disindag		
31.	BIDANG PERDAGANGAN						
a.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri	1. Tingkat persentase kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat	5,9-7	285,5	Disindag		
		2. Jumlah transaksi lelang komoditi agro Jawa Barat	101.525	385	Disindag		
		3. Persentase aktivitas fasilitasi penggunaan produk dalam negeri	77	650	Disindag		
		4. Persentase peningkatan sarana perdagangan	60	30.000	Disindag		
b.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1. Volume dan nilai ekspor Jawa Barat per tahun		2.000	Disindag		
		a. Volume	13				
		b. Nilai	US \$ 25,70 Milyar				
		2. Jumlah penerbitan SKA	106.285 buah	500	Disindag		
		3. Volume dan nilai impor Jawa Barat per tahun		2.000	Disindag		
		a. Volume	5				
		b. Nilai	US \$ 11 Milyar				
		4. Jumlah penerbitan API	800	500	Disindag		
c.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1. Tingkat pengawasan barang beredar per tahun	30	800	Disindag		
		2. Tingkat fasilitasi advokasi perlindungan konsumen per tahun	10	300	Disindag		
		3. Jumlah legalitas perusahaan		150	Disindag		
		a. TDP	16266				
		b. SIUP	22.356				
		4. Jumlah peneraan UTTP dan BDKT per tahun		8.800	Disindag		
		a. UTTP	6.577.980				
		b. BDKT	3.348				
32.	BIDANG PARIWISATA						
a.	Program Pengembangan Destinasi Wisata	1. Jumlah Event Pariwisata	3	3.000	Disparbud		
		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	10	5.000	Disparbud		
		3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata	120	2.000	Disparbud		
		4. Peningkatan Produk Pariwisata	3	3.000	Disparbud		
b.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5. Jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Barat per tahun		2.500	Disparbud		
		a. Wisatawan Nusantara	4.200.000				
		b. Wisatawan mancanegara	1.100.000				
33.	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
a.	Program Pengelolaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	1. Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara	32,4%	2.000	Dinas ESDM		
		2. Data dan Informasi Teknis Daerah Bencana Alam Geologi	69,2%	1.500	Dinas ESDM		
		3. Tingkat Pengelolaan Air Tanah pada Cekungan Airtanah Lintas Kabupaten/Kota	56,3%	2.500	Dinas ESDM		
b.	Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi	1. Tingkat Ketersediaan Infrastruktur dan Cakupan Layanan Ketenagalistrikan	76,80%	100.000	Dinas ESDM		
		2. Tingkat Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	4,7%	5.000	Dinas ESDM		
		3. Tingkat Penghematan Energi di Sektor Industri dan Komersil	5,4%	1.500	Dinas ESDM		
c.	Program Pengelolaan, Pengembangan Panas Bumi dan Miqas	1. Tingkat Pemanfaatan Panas Bumi	18,5%	3.500	Dinas ESDM		
		2. Tingkat Pemanfaatan Potensi Migas (<i>Asumsi Tidak Ada Penemuan Baru</i>)		1.000	Dinas ESDM		
		- Minyak Bumi dan Kondensat	18,3%				
		- Gas Alam	33,0%				
34.	BIDANG KETRANSMIGRASIAN						
a.	Program Pengembangan Transmigrasi	1. Pengarahan dan pemindahan Transmigrasi	500	6.500	Disnakertrans		

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Tahun 2014		SKPD Penanggung Jawab		
			Target Kinerja	Pendanaan Pembangunan (Rp. Juta)	OPD Utama	OPD Mitra Utama	OPD Pendukung
	1	2	5	6	8	9	10
		2 Pembedayaan Masyarakat Transmigran	21,00	2.000	Disnakertrans		
		3 MoU Antar Provinsi	10	6.500	Disnakertrans	Biro Pengembangan Sosial	
		4 a. Jumlah Kepala Keluarga calon transmigran yang terlatih	350	1.500	Disnakertrans		
		b. Jumlah istri calon transmigran yang terlatih	350		Disnakertrans		
		c. Jumlah Anak Calon Transmigran yang terlatih	350		Disnakertrans		
		5 Jumlah masyarakat resettlement terlatih	600	1.300	Disnakertrans		